KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
PUSAT PERBUKUAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Muhammad Sapei,
Trezadigjaya, dan Prayogo

SMP Kelas VIII

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Untuk SMP Kelas VIII

Penulis
Muhammad Sapei
Trezadigjaya
Prayogo

Penelaah
Sapriya
Darma Indra

Penyelia/Penyelaras
Supriyatno
E. Oos M. Anwas
Arifah Dinda Lestari
Futri F. Wijayanti

Ilustrator
Yuntarto

Penyunting
Yocta Nur Rahman

Penata Letak (Desainer)
Gunadi Kartosentono

Penerbit
Pusat Perbukuan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Komplek Kemdikbudristek Jalan RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
https://buku.kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, 2021
ISBN 978-602-244-312-4 (jilid lengkap)
ISBN 978-602-244-448-0 (jilid 2)

Isi buku ini menggunakan huruf Noto Serif 10/24 pt, Google
xii, 156 hlm.: 17,6 × 25 cm.

Kata Pengantar

Pusat Perbukuan; Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai tugas dan fungsinya mengembangkan kurikulum yang mengusung semangat merdeka belajar mulai dari satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk mendukung pelaksanaan kurikulum tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, pemerintah dalam hal ini Pusat Perbukuan memiliki tugas untuk menyiapkan Buku Teks Utama.

Buku teks ini merupakan salah satu sumber belajar utama untuk digunakan pada satuan pendidikan. Adapun acuan penyusunan buku adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 958/P/2020 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Sajian buku dirancang dalam bentuk berbagai aktivitas pembelajaran untuk mencapai kompetensi dalam Capaian Pembelajaran tersebut. Penggunaan buku teks ini dilakukan secara bertahap pada Sekolah Penggerak, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak.

Sebagai dokumen hidup, buku ini tentunya dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, saran-saran dan masukan dari para guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan buku teks ini. Pada kesempatan ini, Pusat Perbukuan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini mulai dari penulis, penelaah, penyunting, ilustrator, desainer, dan pihak terkait lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga buku ini dapat bermanfaat khususnya bagi peserta didik dan guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

Jakarta, Oktober 2021
Plt. Kepala Pusat,

Supriyatno
NIP 19680405 198812 1 001

Prakata

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa. Atas anugerah hidayah dan ilmu-Nya lah, penulisan buku teks siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini diperuntukkan bagi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pesatnya perkembangan teknologi informasi turut memberikan dampak pada dunia pendidikan. Siswa dapat dengan mudah mengakses informasi dengan berselancar di internet. Kondisi ini melahirkan generasi *digital native*. Karenanya, ini menjadi tantangan bagi penulis buku teks pelajaran untuk dapat menulis buku yang tidak hanya informatif, tetapi juga menarik, memantik proses berpikir, dan menggugah makna.

Karena itulah, buku ini ditulis dengan pendekatan berbeda. Buku ini dirancang untuk memantik kemampuan berpikir abad ke-21 pada siswa level SMP. Kaya akan ragam aktivitas pembelajaran, menjadikan buku ini dapat memacu semangat belajar siswa. Tautan pengayaan dalam buku ini, memotivasi siswa untuk belajar lebih dalam dan luas.

Selain itu, sesuai dengan penekanan capaian pembelajaran PPKn yang lebih berdimensi sikap, baik sosial maupun spiritual, buku ini juga dirancang untuk mengokohkan pembentukan sikap dan kepribadian siswa. Konten refleksi pada buku ini mengasah rasa siswa untuk cerdas emosional dan spiritual.

Kehadiran buku ini juga taklepas dari jasa para penelaah, Prof. Dr. Sapriya, M. Ed. dan Adi Darma Indra, M. Pd. yang telah berbaik hati menelaah dan memberikan masukan dalam proses penulisan buku ini. Kemudian, pengolah naskah, Tim Rumah Buku, yang telah mendesain buku ini menjadi artistik, sehingga nyaman dibaca oleh siswa. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya.

Semoga buku ini menghadirkan kebermanfaatan yang besar, terutama bagi siswa SMP. Selamat belajar!

Jakarta, Desember 2020

Tim Penulis

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Sebelum kalian menggunakan buku ini, kalian perlu membaca bagian petunjuk ini untuk mempermudah kalian dalam memahami isi dari buku ini. Selamat belajar!

Tujuan Pembelajaran, merupakan sasaran yang akan dicapai dalam proses pembelajaran.

Peta Konsep, merupakan peta pembahasan dalam setiap bab agar kalian memperoleh gambaran materi yang dibahas dalam setiap babnya.

Apersepsi, merupakan pembukaan pembahasan untuk mengantarkan kalian masuk ke dalam materi setiap bab.

Siswa Aktif, merupakan aktivitas pembelajaran supaya kalian semakin memahami, menghayati, dan menguasai materi yang dibahas dalam setiap bab.

Ringkasan Materi, merupakan poin-poin utama materi pembelajaran agar kalian mudah mengingatnya.

Refleksi, merupakan penilaian diri untuk memperkuat pembentukan akhlak mulia pada diri kalian.

Tautan Pengayaan, merupakan pengembangan materi pembelajaran bagi kalian untuk lebih mendalami dan memperluas wawasan.

Uji Kompetensi, merupakan penilaian kompetensi setelah kalian mempelajari materi setiap bab.

Glosarium, merupakan penjelasan kata-kata asing dan sulit dipahami.

Daftar Pustaka, merupakan daftar referensi yang digunakan dalam menulis buku ini.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2021
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Untuk SMP Kelas VIII
Penulis : Muhammad Sapei, Trezadigjaya, Prayogo
ISBN : 978-602-244-448-0

Bab I
Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Tujuan Pembelajaran:

1. Peserta didik mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila.
2. Peserta didik mampu menghayati pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila.
3. Peserta didik mampu mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.

Peta Konsep
Kedudukan dan Fungsi Pancasila
Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
Pancasila sebagai kepribadian bangsa
Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa

Bersatu untuk Kejayaan Bangsa

Gambar 1.1 Tontowi dan Liliyana bersatu padu untuk kejayaan bangsa
Sumber: AFP/Goh Chai Hin/www.liputan6.com (2016)

Apakah kalian mengenal atlet bulutangkis nasional, Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir? Keduanya adalah pasangan atlet bulutangkis cabang ganda campuran terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Tontowi dan Liliyana adalah atlet berprestasi. Banyak sekali prestasi bergengsi yang telah diraih keduanya. Prestasi puncaknya adalah medali emas Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brazil.

Tahukah kalian, Tontowi dan Liliyana memiliki perbedaan suku, bahasa, dan agama. Tontowi memiliki latar belakang suku dan bahasa Jawa serta beragama Islam. Sementara, Liliyana memiliki latar belakang suku dan bahasa Manado serta beragama Katolik. Namun, perbedaan itu tidak menghalangi keduanya untuk bersatu menampilkan performa terbaik di lapangan untuk kejayaan bangsa.

Momen paling mengharukan terjadi saat Tontowi dan Liliyana berhasil meraih medali emas bulutangkis cabang ganda campuran pada Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brazil. Pasalnya partai final berlangsung bertepatan dengan perayaan Ke-71 kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada 17 Agustus 2016.

Perjalanan Tontowi dan Liliyana menuju puncak sangat berliku. Beberapa bulan menjelang olimpiade, grafik permainan Tontowi dan Liliyana tidak stabil alias naik turun. Keduanya juga sempat saling kurang percaya satu sama lain. Namun demikian, Tontowi dan Liliyana berhasil saling menyesuaikan diri dan membangun *chemistry*. Perbedaan bukan halangan untuk bersatu padu mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.

Perjuangan itu pun berbuah manis. Tontowi dan Liliyana berhasil merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro 2016 setelah mengalahkan ganda campuran Malaysia, Chan Peng Soon/Goh Liu

Ying, pada partai final bulutangkis, 17 Agustus 2016. Mereka menang dua set langsung dengan skor 21-14, 21-12.

Kemenangan itu dipersembahkan keduanya untuk Indonesia tercinta. "Saya tidak bisa berkata-kata. Luar biasa rasanya. Ini saya persembahkan untuk hari kemerdekaan Republik Indonesia," ucap Tontowi dalam sebuah wawancara media. Tontowi dan Liliyana telah mengamalkan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia.

Detik-detik Tontowi dan Liliyana memenangkan pertandingan dan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya di Olimpiade 2016 dapat kalian saksikan pada tautan video berikut ini.

Tontowi-Liliyana Raih Emas, Indonesia Raya Berkumandang di Olimpiade Rio (Berita Satu)
https://www.youtube.com/watch?v=5HN9JQnYiNc

Siswa Aktif

Buatlah kelompok belajar. Lalu, diskusikan bersama dalam kelompok, contoh-contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Buatlah dalam bentuk rekaman video sederhana. Kemudian, kalian unggah rekaman video tersebut ke media sosial kalian.

Ketika kelas VII, kalian sudah belajar materi Sejarah Kelahiran Pancasila. Nah di kelas VIII ini, kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Apa saja kedudukan dan fungsi Pancasila? Ayo kita belajar bersama!

Pancasila berarti lima dasar. Kelima sila ini merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan. Tidak bisa dipisahkan antara satu sila dengan sila lainnya. Juga tidak bisa dipecah-pecah atau diringkas menjadi tiga atau satu sila. Sila pertama mendasari dan menjiwai empat sila lainnya. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan kedua, serta menjiwai sila keempat dan kelima. Demikian seterusnya.

Landasan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Maha Esa mewujudkan perikemanusiaan yang adil. Dengan keadilan itu kualitas peradaban bangsa akan terus meningkat. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa hendaknya meyakinkan segenap Bangsa Indonesia untuk bersatu padu dan mewujudkan persatuan nasional. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengarahkan musyawarah mufakat sebagai bentuk implementasi kedaulatan rakyat. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa juga mendorong kepada cita-cita terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

A. Pancasila sebagai Dasar Negara

Kalian pasti tahu bangunan, kan? Semakin tinggi bangunan, maka semakin dalam pula fondasinya. Mengapa? Fondasi itulah yang menopang tegaknya bangunan tersebut. Ia akan tetap tegak berdiri meski dihempas badai. Kalian juga pasti tahu pohon kan? Apa yang membuat pohon tegak dan kokoh? Ya, akar yang menghunjam ke dalam tanah, menjadikan pohon tegak tinggi menjulang.

Gambar 1.2 Layaknya pohon beringin yang berakar kuat, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang kokoh.
Sumber: Lumajang Satu/Redaksi/www.lumajangsatu.com (2021)

Demikianlah gambaran Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan fondasi bagi tegaknya Bangsa Indonesia. Semakin kokoh pengamalan Pancasila dalam bernegara, maka semakin kokoh pula bangunan Negara Indonesia. Indonesia negara besar dengan puluhan provinsi, belasan ribu pulau, dan ratusan juta jiwa penduduknya dengan keragamannya. Maka, perlu landasan atau fondasi kokoh untuk dapat tetap menopang tegak berdirinya Negara Indonesia.

Landasan tersebut merupakan nilai-nilai yang mendasari Negara Indonesia. Nilai-nilai itu pula yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Dan, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dalam menyelenggarakan Negara Indonesia. Setiap negara mesti memiliki landasan dengan cara apa negara tersebut diselenggarakan.

Ada negara yang mendasarkan penyelenggaraan negaranya atas dasar kapitalisme, komunisme, sekularisme, dan lainnya. Bagi Negara Indonesia dasar penyelenggaraan negara tersebut adalah Pancasila, yaitu lima sila dasar yang menjadi fondasi dalam semua aspek penyelenggaraan negara.

Pancasila sebagai dasar negara termaktub jelas dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada alinea keempat, yaitu "...*maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."*

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

BAHWA SESUNGGUHNYA KEMERDEKAAN ITU IALAH HAK SEGALA BANGSA DAN OLEH SEBAB ITU, MAKA PENJAJAHAN DI ATAS DUNIA HARUS DIHAPUSKAN, KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERIKEMANUSIAAN DAN PERIKEADILAN.

DAN PERJUANGAN PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA TELAH SAMPAILAH KEPADA SAAT YANG BERBAHAGIA DENGAN SELAMAT SENTAUSA MENGANTARKAN RAKYAT INDONESIA KE DEPAN PINTU GERBANG KEMERDEKAAN NEGARA INDONESIA, YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR.

ATAS BERKAT RAKHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA DAN DENGAN DIDORONGKAN OLEH KEINGINAN LUHUR, SUPAYA BERKEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG BEBAS, MAKA RAKYAT INDONESIA MENYATAKAN DENGAN INI KEMERDEKAANNYA.

KEMUDIAN DARI PADA ITU UNTUK MEMBENTUK SUATU PEMERINTAH NEGARA INDONESIA YANG MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL, MAKA DISUSUNLAH KEMERDEKAAN KEBANGSAAN INDONESIA ITU DALAM SUATU UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA, YANG TERBENTUK DALAM SUATU SUSUNAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DENGAN BERDASAR KEPADA KETUHANAN YANG MAHA ESA, KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, PERSATUAN INDONESIA DAN KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, SERTA DENGAN MEWUJUDKAN SUATU KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

Gambar 1.3 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Sumber: efullama/Fitri Reubun/www.pinterest.com (2010)

Mengacu pada kalimat "...*negara Indonesia* yang berkedaulatan *rakyat dengan berdasar kepada*...", menegaskan bahwa dasar Negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsekuensi bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara mesti mengacu dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mulai dari penyelenggaraan pada lingkup pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang terkecil.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan pengertian bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti didasarkan pada nilai Ketuhanan. Maka, dalam pasal 29 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang menyalahi nilai Ketuhanan. Misalnya, negara membolehkan atheisme ada dan menyebar di Indonesia. Ini menyalahi Pancasila sila kesatu.
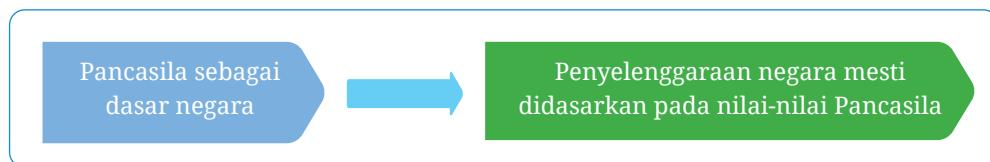
Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan makna dalam menyelenggarakan negara mesti menghormati nilai kemanusiaan yang didasari atas sifat adil dan beradab. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang mencederai nilai kemanusiaan yang beradab dan rasa keadilan. Misalnya, negara mengeluarkan kebijakan pembangunan, tetapi mengorbankan hak-hak rakyat.

Sila Persatuan Indonesia memberikan makna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti menjaga nilai persatuan bangsa. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Sebaliknya, negara harus menjaga keutuhan dan kesatuan Indonesia. Misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan perundangan yang menyudutkan nilai-nilai luhur salah satu masyarakat daerah di Indonesia.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan memberikan makna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti mendahulukan nilai musyawarah untuk mufakat. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang dalam proses pengambilan keputusannya diambil secara otoriter tanpa memperhatikan nilai-nilai musyawarah untuk mufakat. Misalnya, pemerintah mengeluarkan perundangan tanpa melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan makna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti mengutamakan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang hanya menyejahterakan sebagian warga negara. Sebaliknya, negara harus mewujudkan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya, pemerintah mengutamakan kepentingan para pengusaha dalam perizinan eksplorasi sumberdaya alam tanpa mempertimbangkan masyarakat sekitarnya.

Gambar 1.4 Pembangunan jembatan gantung di daerah terpencil mencerminkan perwujudan keadilan sosial.
Sumber: Antara Aceh/Syifa Yulinnas/https://aceh.antaranews.com (2019)

Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara yuridis konstitusional berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara.

Rumusan lengkap sila-sila dalam Pancasila dimuat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 tentang Tata Urutan dan Rumusan dalam Penulisan/Pembacaan/Pengucapan sila-sila Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Kalian sekarang menjadi paham kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah dalam kehidupan di sekolah, kalian bisa mempraktikannya ketika pengambilan keputusan-keputusan dalam lingkup Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Lakukanlah musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan organisasi. Ketua OSIS tidak boleh otoriter memutuskan sendiri tanpa bermusyawarah dengan pengurus OSIS lainnya.

Siswa Aktif

Berdasarkan data dari *Credit Suisse Global Wealth Databooks,* disebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat keempat dunia dalam hal ketimpangan distribusi kekayaan negara, di bawah Rusia, India, dan Thailand. Angka statistiknya menyebutkan 1% populasi menguasai 49.3% kekayaan negara.

Diskusikan bersama kelompokmu, melihat data di atas, apakah ini merupakan data dan fakta terjadinya penyimpangan nilai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan tersebut? Bagaimana cara dan strategi mengurangi dan mengatasinya? Lalu, presentasikan di depan kelas dan lakukan diskusi antar kelompok

B. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Kalian pasti memiliki nilai-nilai dalam diri yang menjadi acuan bagi kalian dalam bergaul, baik dalam kehidupan di sekolah maupun sehari-hari. Nilai-nilai itu terbentuk dari serangkaian proses belajar dan pengalaman hidup yang kalian jalani sampai saat ini. Lalu, nilai-nilai itu membentuk pandangan hidup kalian.

Demikianlah gambaran Pancasila bagi Negara dan Bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai dan norma yang telah membentuk menjadi pandangan hidup bangsa.

Pandangan hidup sendiri adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Artinya, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur Bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
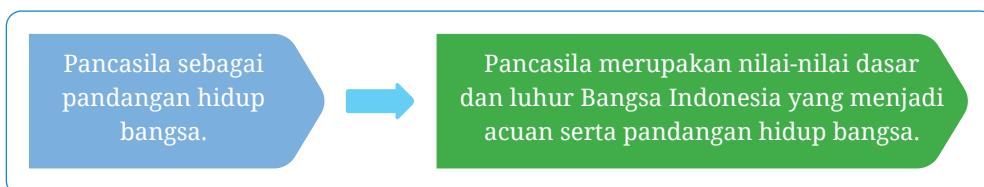
Nilai ketuhanan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang religius. Nilai-nilai agama terinternalisasi dalam diri dan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, pandangan hidup ini mewarnai berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai contoh dalam bidang pendidikan, maka disusunlah tujuan pendidikan nasional, sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 3 tertulis, *"Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia…".*

Pasal 3 Undang-undang Sisdiknas tersebut menjadi bukti bahwa Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa. Sehingga, ketika merumuskan peraturan perundang-undangan, pandangan hidup ini mewarnainya. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional menjadi senapas dan seirama dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Gambar 1.5 Kegiatan beribadah di sekolah merupakan cerminan pengamalan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sumber: Pemkot Semarang/https://semarangkota.go.id (2019)

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadikan Bangsa Indonesia sebuah bangsa yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan. Tidak boleh ada eksploitasi manusia atas manusia lainnya. Maka, bangsa ini membuat peraturan perundangan yang melarang human trafficking (perdagangan manusia).

Bangsa Indonesia juga menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Hal ini tegas disebutkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) alinea pertama.

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Nilai persatuan menjadikan Bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mencintai persatuan. Ketika detik-detik akhir pengumuman dan pengesahan Piagam Jakarta, ada keberatan dari Perwakilan Indonesia Timur yang berpotensi memecah persatuan bangsa, maka para pemimpin bangsa dari kalangan Islam ketika itu dengan lapang dada bersedia mengubah rumusan sila pertama dari semula, "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Ini merupakan bukti bahwa nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila telah menjadi pandangan hidup Bangsa Indonesia sebelum Pancasila itu lahir. Pandangan hidup ini mempengaruhi dalam bersikap dan mengambil keputusan mengenai persoalan berbangsa dan bernegara.

Nilai permusyawaratan menjadikan Bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk memecahkan persoalan. Juga memberikan hak kepada warga negara untuk berpendapat di muka publik. Hal ini ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28, *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."*

Gambar 1.6 Keragaman suku dalam kesatuan bangsa
Sumber: UNS/www.wp.com (2020)

Karena itulah, Bangsa Indonesia menolak tindakan pemaksaan kepada seseorang untuk mengikuti pendapatnya atau mendukungnya melakukan sesuatu. Bangsa Indonesia mengedepankan cara-cara musyawarah untuk pengambilan keputusan dan mengatasi persoalan bangsa dan negara.

Nilai keadilan sosial menjadikan Bangsa Indonesia sebuah bangsa yang dermawan dan gemar berbagi. Mereka hidup guyub dalam tradisi gotong-royong. Membantu warga masyarakat yang kesusahan sudah menjadi pandangan hidup yang mewarnai kehidupan bangsa. Distribusi kesejahteraan sosial secara adil telah lama menjadi nilai dan pandangan hidup Bangsa Indonesia. Karena itulah, negara melaksanakan program BPJS kesehatan sebagai bentuk layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kalian bisa mempraktikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian tidak ikut-ikutan ketika mendapati beberapa pelajar laki-laki yang mengenakan anting dan tato. Karena, itu tidak sesuai dengan pandangan hidup Bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila. Kalian merasa bangga menampilkan perilaku santun dan pakaian sopan sebagai ciri khas Bangsa Indonesia.

Siswa Aktif

Buatlah kelas menjadi beberapa kelompok. Kemudian, tentukan nama daerah yang menjadi pilihan untuk dipentaskan. Jika memungkinkan, sewalah pakaian daerah sesuai pilihan dan pentaskan di depan kelas menggunakan bahasa daerah tersebut.

Misalnya, kalian memilih daerah Sumatera Barat, maka kenakanlah pakaian adat *Limpapeh Rumah Nan Gadang,* lalu jelaskan pakaian adat tersebut menggunakan Bahasa Minang. Demikian seterusnya, setiap kelompok mementaskan pakaian adat dan bahasa daerah masing-masing.

Apa yang terjadi? Kalian pasti tidak saling mengerti satu sama lain kan, ketika setiap kelompok menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nah jelaskan ulang pakaian adat kelompok kalian menggunakan Bahasa Indonesia. Inilah persatuan Indonesia. Beragam suku, bahasa, adat, tetapi satu bangsa, yakni Bangsa Indaonesia.

C. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Sekolah kalian pasti memiliki aturan dan hukum yang menjadi acuan untuk mewujudkan ketertiban kehidupan dan lingkungan sekolah. Ketika tiada aturan dan hukum di sekolah, maka kehidupan di sekolah akan kacau dan berantakan. Bisa kalian bayangkan apa jadinya bila warga sekolah hidup dalam lingkungan sekolah yang tidak memiliki aturan dan hukum.

Demikian pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara serta menjadi acuan dalam merumuskan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Mengacu kepada teori norma Hans Nawiasky, sebagaimana dikutip oleh Dimas Hutomo, *die Stuferordnung der Rechtnormen* (teori hierarki hukum), terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan, yaitu pertama, *staatsfundamentalnorm* (Norma fundamental negara/abstrak/sumber hukum, contoh: Pancasila); kedua, *staatsgrundgesetz* (Aturan dasar/aturan pokok negara/konstitusi/ UUD); ketiga, *formell gesetz* (Undang-undang); keempat, *verordnung & utonome satzung* (Aturan pelaksana/Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah).

Merujuk pada teori di atas, maka Pancasila menempati posisi *staatsfundamentalnorm* sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Karena itu, setiap produk hukum yang dihasilkan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar atau prinsip, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Karenanya, dalam merumuskan hukum dan peraturan negara mesti bernafaskan pada sila-sila dalam Pancasila.
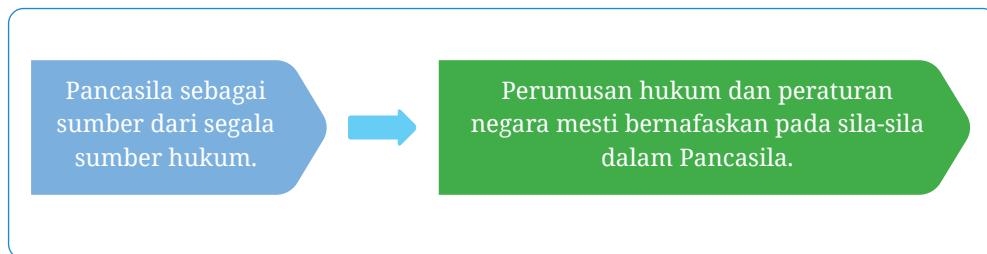
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan negara yang berhubungan dengan kehidupan beragama. Melalui perangkat hukum, negara harus mengarahkan warganya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat menjalankan ajaran agamanya. Saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mesti menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan yang melindungi harkat dan martabat kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh ada tebang pilih dalam

pelaksanaan hukum. Setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan memperoleh perlakuan yang sama.

Sila persatuan Indonesia mesti menjadi arah kebijakan hukum untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak boleh ada kebijakan hukum yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa.

Gambar 1.7 Keadilan adalah prinsip mendasar dalam bernegara
Sumber: Reqnews/www.reqnews.com (2020)

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mesti menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan tentang mekanisme implementasi kedaulatan rakyat. Negara harus mampu mengarahkan warganya untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan bernegara dan kehidupan berbangsa.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mesti menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada perangkat hukum yang menguntungkan sebagian golongan dan mengorbankan kepentingan rakyat.

Siswa Aktif

Buatlah kelas menjadi beberapa kelompok. Lakukanlah pengamatan dan wawancara ke masyarakat untuk mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian, diskusikan dalam kelompok untuk memecahkan persoalan yang kalian temui dan rumuskan rencana aksinya.

Misalnya, kalian mendapati kondisi lingkungan tempat tinggal kalian mengalami persoalan sampah. Masih banyak warga yang kurang menjaga kebersihan lingkungan. Saluran air tersumbat dibeberapa titik oleh sampah plastik bekas makanan.

Nah, coba kalian lakukan diskusi untuk merumuskan pemecahan masalahnya. Kalian juga bisa mewawancarai tokoh masyarakat untuk meminta pandangan pemecahan masalah tersebut. Kemudian, rumuskan rencana aksinya.

D. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa

Kalian pasti memiliki kepribadian masing-masing. Cermati kepribadian teman-temanmu! Mungkin kalian akan mendapati ada temanmu yang cenderung kaku dan disiplin, ada yang fleksibel dan mudah beradaptasi, ada pula yang cara berpikirnya sederhana dan tidak mau ambil pusing. Itu semua dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, lingkungan yang membentuk dan membesarkan, dan faktor lainnya.

Demikianlah gambaran Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Bangsa Indonesia memiliki watak, karakter, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Watak dan karakter ini membentuk kepribadian Bangsa Indonesia yang membedakannya dengan kepribadian bangsa-bangsa lain.

Era globalisasi yang membuat dunia seperti tanpa batas, memiliki tantangan tersendiri bagi Bangsa Indonesia. Tidak sedikit masyarakat Indonesia, khususnya generasi mudanya, yang mengalami krisis identitas. Mereka seperti kehilangan jati dirinya sebagai Bangsa Indonesia. Mereka meniru kepribadian bangsa-bangsa lain yang dianggap keren dan modern. Padahal, itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai kepribadian bangsa mestinya tercermin dalam sikap mental dan perilaku keseharian. Tidak mudah terpengaruh oleh kepribadian bangsa lain. Setiap bangsa pasti memiliki kepribadian yang dipengaruhi oleh pandangan hidupnya. Bangsa Indonesia memiliki kepribadian luhur, bahkan sebelum Pancasila dirumuskan. Kepribadian luhur inilah yang tercermin dalam perilaku sehari-hari.

Kepribadian Bangsa Indonesia yang terwarnai oleh sila pertama tercermin dari sikap hidup taat menjalankan ajaran agama. Berusaha senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antarumat beragama.

Kepribadian Bangsa Indonesia yang diwarnai oleh sila kedua tercermin dari sikap mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap

saling mencintai sesama manusia, sikap saling tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan berani membela kebenaran dan keadilan.

Kepribadian Bangsa Indonesia yang terwarnai oleh sila ketiga tercermin dari sikap menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, rela berkorban bagi kepentingan negara dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan Indonesia dan bertanah air Indonesia. Mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

Gambar 1.8 Musyawarah merupakan salah satu kepribadian Bangsa Indonesia
Sumber: SMP Nurul Jadid/http://smpnj.sch.id (2020)

Kepribadian Bangsa Indonesia yang terwarnai oleh sila keempat tercermin dari sikap mengutamakan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan bersama. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang ambil dengan jalan musyawarah. Mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil secara moral kepada Tuhan Maha Esa.

Kepribadian Bangsa Indonesia yang terwarnai oleh sila kelima tercermin dari sikap mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menghormati hak orang lain, gemar memberikan pertolongan. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur dan kepribadian Bangsa Indonesia. Karena itu, kalian mesti bangga menampilkan kepribadian Bangsa Indonesia saat berinteraksi dengan para pelajar lain ketika mengikuti kegiatan internasional, seperti pertukaran pelajar internasional.

Siswa Aktif

Akhir-akhir ini para remaja begitu terpengaruh oleh budaya K-Pop. Sebuah tren budaya yang dipopulerkan oleh kelompok musik dan film Korea. Praktis, remaja Indonesia mengikuti apa yang dilakukan oleh para bintang Korea tersebut.

Diskusikan bersama kelompok kalian, melihat fenomena di atas, apakah ini merupakan fakta tergerusnya kepribadian generasi remaja bangsa ini? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tergerusnya Pancasila sebagai kepribadian bangsa di kalangan para remaja? Bagaimana cara dan pendekatan untuk mengurangi dan mengatasinya? Presentasikan di depan kelas dan lakukan diskusi antarkelompok.

E. Pancasila sebagai Cita-cita dan Tujuan Bangsa

Kalian masih ingat saat sekolah dasar (SD) dulu? Umumnya saat duduk di bangku SD, setiap peserta didik pernah menyampaikan cita-citanya di depan kelas. Setiap kalian pasti punya cita-cita yang ingin dituju. Dengan memiliki cita-cita membuat kalian bersemangat belajar dan berkarya karena ada pencapaian yang ingin dituju.

Nah coba tuliskan cita-cita kalian saat ini dan jelaskan langkah dan cara yang akan kalian tempuh untuk menggapainya. Presentasikan di depan kelas secara bergantian agar kalian merasakan kembali semangat menyala-nyala untuk menggapai cita-cita kalian.

Demikianlah gambaran Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Dalam Pancasila terkandung cita-cita dan tujuan bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, baik material terlebih spiritual yang berdasarkan Pancasila.

Selain itu, dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 disebutkan pula tujuan bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa.

Pancasila memberikan arah dan tujuan hendak dibawa ke mana Bangsa dan Negara Indonesia.
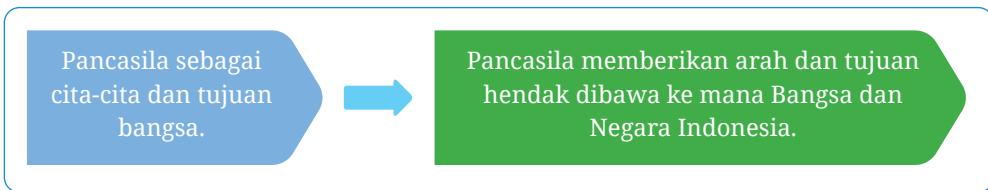
Gambar 1.9 Salah satu tujuan Bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa
Sumber: Lombokpost/Redaksi/https://lombokpost.jawapos.com (2021)

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan yang jelas dan mulia, sebagaimana disebutkan di atas. Cita-cita dan tujuan bangsa yang didasari nilai-nilai Pancasila ini mesti diterjemahkan dalam program-program pembangunan di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara; politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Siswa Aktif

Buatlah beberapa kelompok dan buatlah video edukasi tentang pentingnya wajib belajar. Kemudian, sosialisasikan kepada masyarakat sekitar kalian. Selain itu, unggah video tersebut di akun *YouTube* kalian sebagai bentuk kampanye menyukseskan salah satu tujuan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bila tidak memungkinkan, buatlah dalam bentuk reportase. Kemudian, tempelkan pada mading sekolah.

Ringkasan Materi

1. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara.

2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia.

3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara berarti Pancasila menjadi sumber acuan dalam merumuskan penjabaran hukum dan peraturan perundangan dalam menyelenggarakan negara.

4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa berarti Bangsa Indonesia memiliki watak, karakter, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa berarti Pancasila memberikan arah dan tujuan hendak dibawa ke mana Bangsa dan Negara Indonesia.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari kedudukan dan fungsi Pancasila, cobalah kalian identifikasi perilakumu sehari-hari di sekolah, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum dengan mengisi kolom perbandingan antara idealita dengan realita.

No	Perilaku Ideal	Perilaku Realita	Rencana Perbaikan
1.	Menghargai teman	Terkadang masih suka mengejek teman	Mengurangi mengejek teman secara bertahap sampai menghilangkannya.
2.			
3.			
4.			
5.			

Tautan Pengayaan

Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan negara Indonesia. Nah agar lebih menghayati lagi, kalian simak tautan video berikut ini. Kemudian, yang lebih penting lagi, kalian harus mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Arti Kedudukan dan Fungsi Pancasila
Widia Kusuma Wardani
https://www.youtube.com/watch?v=yVewx4ELYiQ

Uji Kompetensi

Cermatilah peristiwa-peristiwa di bawah ini. Lalu, tuliskan pendapatmu untuk menjawab persoalan yang diajukan.

1. Rita sudah tiga hari tidak masuk sekolah. Ketua kelas mengusulkan untuk menjenguk Rita. Semua pengurus kelas setuju. Sepulang sekolah, mereka menuju rumah Rita untuk menjenguk. Mereka membawa jeruk dua kilogram sebagai buah tangan. Sesampainya di rumah Rita, semua masuk ke ruang tamu rumah Rita. Hanya, Sella yang tidak masuk. Ia memilih menunggu di teras. Rupanya, Sella merasa minder untuk masuk rumah Rita yang megah. Rita pernah meledek Sella sebagai anak miskin.

   Jika kamu sebagai ketua kelas, bagaimana cara kamu mengajak Sella agar mau masuk ke ruang tamu rumah Rita? Jelaskan nilai-nilai Pancasila yang berhubungan dengan peristiwa tersebut!

2. Rudi sedang menyapu halaman sekolah. Lalu, secara tidak sengaja Andi yang tengah berlari menabrak Rudi yang sedang mengambil sampah. Akibatnya, Rudi terjatuh dan sampahnya berserakan. Menyadari kesalahannya, Andi segera meminta maaf. Namun, Rudi tidak begitu saja mau memaafkan Andi. Rudi mencaci Andi untuk melampiaskan kekesalannya. Rudi menilai Andi berlari dengan ceroboh.

   Jika kamu diminta menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut dan mendamaikan antara Rudi dan Andi? Jelaskan pula sila ke berapa dalam Pancasila yang berhubungan dengan peristiwa itu!

3. OSIS mengadakan kegiatan *class meeting* selepas Penilaian Akhir Semester (PAS). Ada lima cabang olahraga yang dipertandingkan. Pada hari pelaksanaan, penanggung jawab empat cabang olahraga telah siap. Namun, ada satu penanggung jawab cabang olahraga yang tidak hadir. Akibatnya, cabang olahraga tersebut tertunda pelaksanaannya. Ketua OSIS menyalahkan kepada ketua panitia karena dinilai tidak mengawal timnya dengan baik.

   Jika kamu diminta menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut dan mencari solusi terbaik? Jelaskan sila ke berapa dalam Pancasila yang berhubungan dengan peristiwa itu!

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2021

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Untuk SMP Kelas VIII

Penulis : Muhammad Sapei, Trezadigjaya, Prayogo

ISBN : 978-602-244-448-0

Bab II
Bentuk dan Kedaulatan Negara

Tujuan Pembelajaran:

1. Peserta didik mampu menunjukkan sikap syukur atas terjaganya negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.
2. Peserta didik mampu menampilkan perilaku menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkungan sekolah dan masyarakat.
3. Peserta didik mampu menampilkan perilaku taat hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat.
4. Peserta didik mampu mempraktikkan kedaulatan pada organisasi di sekolah.

Peta Konsep
Bentuk dan Kedaulatan Negara
Indonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara Republik
Indonesia sebagai Negara Hukum
Indonesia sebagai Negara yang Berkedaulatan Rakyat

Gambar 2.1 Indonesia merupakan negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke
Sumber: Republik Seo/www.republikseo.net (2020)

Republik Indonesia Serikat (RIS) yang Seumur Jagung

Apakah kalian pernah mendengar nama Den Haag? Den Haag merupakan nama kota di Belanda tempat dilangsungkannya Konferensi Meja Bundar (KMB). Pada waktu itu, dilakukan perundingan antara perwakilan Indonesia dengan Belanda tentang kemerdekaan Indonesia. Perundingan ini berlangsung cukup lama, yaitu mulai 23 Agustus – 2 November 1949.

Hasil KMB menyepakati Belanda akan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949. Namun, ada konsekuensi mahal yang harus dibayar, yaitu berubahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Sejak saat itulah, bentuk Negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat atau federal. Namun, usia RIS tidak sampai satu tahun. Sejak diberlakukannya pemerintahan federal pada 27 Desember 1949, gejolak politik terjadi diberbagai daerah. Bahkan, sempat terjadi beberapa pemberontakan dan gerakan bersenjata.

Menyadari ancaman tersebut, rakyat Indonesia di berbagai daerah menuntut dibubarkannya RIS dan diberlakukan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka, pada 15 Agustus 1950 RIS resmi dibubarkan dan Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

Untuk lebih memahami dan menghayati perjalanan Republik Indonesia Serikat menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalian saksikan atau pindai tautan video berikut ini.

Kembalinya RIS ke NKRI (Aldi Prayoga)
https://www.youtube.com/watch?v=tJ5i7FhlLSU

Siswa Aktif

Menurut kalian, mengapa bentuk negara serikat atau federal tidak cocok bagi Indonesia? Bacalah data-data sejarah, lalu tuliskan analisis kalian dan diskusikan dalam kelompok. Sajikan dalam bentuk *powerpoint.* Jika tidak memungkinkan, boleh menggunakan catatan diskusi kalian dan presentasikan di depan kelas secara bergantian.

Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mempelajari kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalian sudah memahaminya 'kan? Sebaiknya bukan hanya memahami, namun juga mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah kali ini kita akan belajar bersama tentang bentuk dan kedaulatan negara.

A. Indonesia sebagai Negara Kesatuan

Apakah kalian pernah bermain *puzzle? Puzzle* berupa potongan-potongan yang membentuk satu gambar atau motif tertentu ketika disatukan. Selain bermain *puzzle,* apakah kalian juga tahu sapu lidi? Lidi mudah dipatahkan ketika tercerai-berai. Namun, lidi menjadi kuat ketika disatukan menjadi sapu lidi. Demikianlah gambaran negara kesatuan.

Perdebatan tentang bentuk Negara Indonesia mewarnai lintasan sejarah Bangsa Indonesia. Soekarno berpendapat bentuk negara kesatuan merupakan pilihan paling tepat untuk Indonesia. Namun, berbeda dengan Mohammad Hatta. Hatta berpandangan, justru bentuk negara federal-lah yang lebih cocok bagi Indonesia. Karena, keluasan wilayah dan keragaman karakteristik setiap wilayah dari berbagai aspek. Lain lagi dengan Soepomo, ia berpandangan bentuk negara integral adalah pilihan terbaik.

Menurut Mohammad Yamin, gagasan negara kesatuan sudah ada sejak 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda mencerminkan adanya keinginan untuk membentuk negara kesatuan *(unitaris).* Kesadaran ini teraktualisasi dengan lahirnya sumpah pemuda. Sebuah komitmen kebangsaan untuk berbangsa satu, bertanah air satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

Pada akhirnya, para tokoh bangsa bersepakat memilih bentuk negara kesatuan. Namun, dalam perjalanannya bentuk Negara Indonesia berubah menjadi serikat atau federal sebagai konsekuensi Konferensi Meja Bundar (KMB). Maka, terbentuklah Republik Indonesia Serikat dengan Soekarno sebagai Presiden, sementara Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri.

Gambar 2.2 Konferensi Meja Bundar di Den Haag.
Sumber: members.chello.nl/www.liputan6.com (2015)

Pada perjalanannya, karena dinilai berpotensi terjadi disintegrasi bangsa, maka RIS dibubarkan pada 15 Agustus 1950. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan hingga saat ini. Negara kesatuan dinilai sebagai bentuk paling tepat bagi bangsa Indonesia. Ini adalah kesepakatan final.

Bentuk negara kesatuan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Karenanya, seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan. Setiap provinsi ibarat potongan *puzzle* yang membentuk satu kesatuan Negara Indonesia.

Pada praktiknya, Indonesia menjalankan konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Artinya, ada pendelegasian tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah

memiliki kekuasaan yang terperinci sesuai dengan pendelegasian dari pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang, sedangkan pemerintah pusat mempunyai kekuasaan yang luas.

Gambar 2.3 Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan seluruh kepala daerah.
Sumber: tribunnews/www.tribunnews.com (2018)

Relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai perwujudan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dalam Pasal 18 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Ayat 2, Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.

Kemudian pada ayat 5, Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pada akhirnya, praktik pelaksanaan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi ini guna mewujudkan tujuan bernegara. Tujuan bernegara termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Tabel 2.1 Perbandingan Sentralisasi dan Desentralisasi

	Kelebihan	Kelemahan
Sentralisasi	1. Lebih hemat dalam penggunaan anggaran negara. 2. Pemerintah pusat secara langsung dapat mengurusi semua persoalan sampai level daerah. 3. Peraturan di seluruh wilayah negara sama. 4. Keseragaman dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan.	1. Lamanya pengambilan keputusan di level daerah karena dilakukan oleh pemerintah pusat. 2. Berpotensi melahirkan pemerintahan yang otoriter. 3. Potensi daerah melakukan inovasi sangat terbatas. 4. Kekayaan daerah berpotensi tidak dinikmati oleh daerah bersangkutan.
Desentralisasi	1. Potensi dan sumber daya daerah dapat berkembang dengan maksimal. 2. Partisipasi dan tanggung jawab rakyat terhadap daerahnya akan meningkat. 3. Peraturan yang berlaku dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal daerah. 4. Pemerintah daerah bisa lebih mandiri dalam mengambil keputusan terkait daerah.	1. Pembangunan daerah berpotensi tidak merata. Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tinggi akan lebih cepat pembangunannya 2. Membutuhkan biaya besar dalam proses pemilihan kepala daerah. 3. Berpotensi memunculkan sifat kedaerahan.

	Kelebihan	Kelemahan
	5. Pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah. 6. Pemerintahan lebih demokratis.	4. Bila pengawasan dan koordinasi pemerintah pusat rendah, bisa berpotensi daerah yang kaya melepaskan diri dari NKRI.

Nah setelah kalian membaca dan mempelajari penjelasan di atas, kalian jadi tahu 'kan sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan konsep negara kesatuan? Namun demikian, tentu saja tidak cukup dengan memahaminya. Kalian juga harus mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai gambaran pentingnya menjaga keutuhan NKRI, simaklah jejak para Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut yang menjaga kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia melalui tautan video berikut ini.

Menjaga Perbatasan Indonesia Malaysia di Pulau Borneo (NEWS MNCTV)
https://www.youtube.com/watch?v=IsutabyCwP0

Kalian dan kita semua pasti ingin keutuhan NKRI tetap terjaga. Bangsa Indonesia terhindar dari konflik dan perpecahan yang mengancam keutuhan NKRI. Tidak ada lagi gerakan bersenjata yang ingin memisahkan diri dari pangkuan NKRI.

Dengan wilayah Negara Indonesia yang luas dan beragam karakteristiknya, menjadi tantangan tersendiri untuk tetap terjaga dan utuh dalam bingkai NKRI. Kalian mesti bersyukur hingga hari ini negara kesatuan Indonesia masih tetap terjaga. Ini merupakan anugerah luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa.

Karena itulah, menjadi tugas kita bersama, termasuk kalian, untuk menjaga keutuhan NKRI. Mari mulai dari diri sendiri dalam lingkup paling kecil dan sederhana. Kita bisa memulainya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Perilaku yang mencerminkan menjaga keutuhan NKRI di antaranya:

Gambar 2.4 Berteman dan bersosialisasi dengan baik adalah bentuk menjaga keutuhan NKRI.
Sumber: Tribunsumsel/M.A. Fajri/ https://sumsel.tribunnews.com

1. Menghormati teman-teman yang beragam suku, agama, ras, dan bahasa. Kalian tidak boleh mengejek atau merendahkan teman kalian yang berkulit hitam dan berambut keriting, misalnya.
2. Mendamaikan teman-teman yang bertikai dan berselisih. Bila kalian tidak mampu, sampaikan kepada guru dengan cara yang baik. Mintalah bantuan guru untuk mendamaikannya.
3. Membantu teman-teman yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan sekolah atau masyarakat. Jangan mengucilkan atau mengasingkannya. Mereka juga Warga Negara Indonesia.
4. Berteman dan bersosialisasi secara baik, saling menghormati dan menghargai perbedaan.
5. Menjaga ketertiban sosial dan umum dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Jangan melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan perselisihan. Misalnya, menyalakan musik keras-keras pada malam hari.

Siswa Aktif

Lakukanlah wawancara kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) di tempat tinggalmu. Ajukan pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana cara yang ditempuh dan dilakukan Ketua RT dalam menjaga ketertiban, kerukunan, dan kedamaian di lingkungannya sebagai bentuk menjaga keutuhan NKRI.

Susunlah terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan wawancara agar lebih terstruktur. Lalu, tuliskan jawaban-jawabannya dalam bentuk reportase. *Display*-lah reportase kalian pada *display* kelas. Jika sekolahmu memiliki majalah dinding, bisa juga diterbitkan di majalah dinding.

B. Indonesia sebagai Negara Republik

Apakah kalian pernah ke Inggris atau Saudi Arabia? Semoga pada masa mendatang kalian bisa kuliah di sana ya. Informasi apa yang bisa kita dapatkan dari Inggris dan Saudi Arabia? Kedua negara tersebut mengambil bentuk pemerintahan monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang turun-temurun. Bila seorang kepala negara meninggal, maka digantikan oleh anaknya yang menjadi putra mahkota.

Sebelum terbentuk Negara Republik Indonesia, nusantara ini berupa kerajaan-kerajaan Islam dan masa sebelumnya kerajaan-kerajaan Hindu-Budha. Kerajaan-kerajaan tersebut mengambil bentuk pemerintahan monarki. Suksesi atau pergantian kepemimpinan dilakukan turun-temurun. Dari sekian anak raja atau sultan, dipilih yang terbaik untuk menggantikan raja atau sultan ketika sudah meninggal.

Setelah Indonesia merdeka, para pendiri bangsa bermusyawarah untuk menentukan bentuk pemerintahan Negara Indonesia. Setelah disepakati bentuk negaranya kesatuan, lalu disepakati pula bentuk pemerintahan adalah republik. Artinya, suksesi kepemimpinan tidak berdasarkan turun-temurun, melainkan melalui pemilihan.

Tabel 2.2 Perbandingan Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan

Bentuk Negara	Bentuk Pemerintahan
Susunan atau organisasi secara keseluruhan mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur negara (daerah dan penduduk). Dibedakan menjadi dua; 1. Kesatuan, yaitu negara yang bersusunan tunggal. 2. Federasi, yaitu negara yang bersusunan jamak.	Susunan yang menerangkan struktur organisasi dan fungsi pemerintahannya saja dengan tidak menyinggung struktur daerah maupun penduduknya. Dibedakan menjadi dua; 1. Monarki, yaitu suksesi pemerintahan diwariskan secara turun-temurun. 2. Republik, yaitu suksesi pemerintahan dilakukan melalui mekanisme Pemilu.

Pada praktiknya, pemilihan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan pernah dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari berbagai elemen bangsa. Namun, kemudian seiring perkembangannya, pemilihan kepala negara dan bahkan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Gambar 2.5 Pemilihan umum oleh rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden
Sumber: Bibli/Michael Tohar/www.bibli.com (2019)

Menurut Jimly Asshiddiqie, bentuk pemerintahan Negara Indonesia bisa dipahami dari pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, yaitu Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut Jimly, kesatuan adalah konsepsi bentuk negara, sementara republik adalah konsepsi bentuk pemerintahan yang dipilih oleh Bangsa Indonesia sesuai UUD NRI Tahun 1945.

Negara Indonesia dengan bentuk pemerintahan republik, memberikan kesempatan kepada putra-putra terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Baik itu pemimpin daerah, atau bahkan pemimpin nasional.

Karena itu, sebagai pelajar, kalian harus memiliki etos belajar dan cita-cita yang tinggi. Kalian harus memiliki kapasitas keilmuan dan kompetensi yang unggul. Dengan demikian, kalian bisa memiliki peluang untuk dipilih menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin sejatinya salah satu sarana untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa ini.

Nah bentuk pemerintahan republik ini, bila dalam lingkup sekolah terwujud pada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Setiap siswa berhak dan berpeluang menjadi Ketua OSIS. Suksesi Ketua OSIS dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum oleh Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK) atau ada juga yang secara langsung oleh seluruh siswa. Kandidat dengan hasil perolehan suara terbanyak, dialah yang diangkat menjadi Ketua OSIS.

Gambar 2.6 Pemilihan Ketua OSIS oleh para siswa merupakan praktik berdemokrasi di sekolah
Sumber: MTs 1 Bogor/Zahrotul Oktaviani/www.republika.co.id (2018)

Nah apakah kalian aktif berorganisasi? Sejatinya, dengan aktif berorganisasi kalian telah belajar bernegara. Hanya bedanya dalam lingkup kecil atau terbatas di lingkungan sekolah. Karena itu, aktiflah berorganisasi

di sekolah. Ada banyak organisasi di sekolah. Selain OSIS, ada MPK, PMR, Pramuka, Paskibra, Teater, dan lainnya.

Siswa Aktif

Simulasikanlah proses pemilihan ketua kelas. Pertama kali bentuklah tim formatur. Tim formatur terdiri atas ketua kelompok belajar. Tim formatur menyeleksi calon atau kandidat yang memenuhi persyaratan.

Kemudian, tim formatur menjadi presidium yang memimpin musyawarah pemilihan ketua kelas. Rekamlah dalam bentuk video, lalu unggah di akun *YouTube* kalian atau bisa dalam bentuk poster yang terpajang di mading sekolah.

C. Indonesia sebagai Negara Hukum

Kalian pernah pergi ke hutan? Minimal kalian pasti tahu apa itu hutan. Iya 'kan? Apa yang terjadi dengan kehidupan di hutan? Ya, binatang yang kuat, yang berkuasa. Binatang yang kuat bebas memangsa binatang mana pun yang menjadi target buruannya. Inilah yang biasa disebut dengan istilah hukum rimba.

Nah dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih bernegara tentu saja tidak boleh terjadi hukum rimba. Derajat manusia jauh lebih mulia daripada binatang. Manusia diberikan hati untuk beriman dan akal untuk berpikir. Dengan iman dan akalnya, manusia bisa memahami bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang baik, mesti diatur dengan hukum.

Kalian bisa bayangkan, apa jadinya bila di sekolah kalian tidak ada hukum yang berlaku. Siswa akan datang ke sekolah seenaknya. Guru mengajar pun sesuka seleranya. Siswa tidak menghormati guru-gurunya. Guru juga tidak peduli dengan murid-muridnya. Singkatnya, kehidupan sekolah pasti kacau.

Nah jika dalam lingkup sekolah saja, perlu keberadaan dan penegakan hukum, terlebih lagi dalam kehidupan bernegara. Maka, mengatur kehidupan bernegara dengan hukum adalah sebuah kebutuhan dan keniscayaan. Dengan keberadaan dan penegakan hukum, maka kehidupan bernegara akan berjalan baik.

Indonesia merupakan negara hukum. Ini tegas dinyatakan dalam perubahan keempat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Indonesia adalah negara hukum.

Gambar 2.7 Para hakim wajib memutuskan persoalan hukum dengan adil.
Sumber: Tribunnews/Glery Lazuardi/www.tribunnews.com (2016)

Menurut Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum tata negara, dalam konsep negara hukum, maka hukumlah yang mesti menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Kenegaraan, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam Bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *'the rule of law, not of man'* (hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya).

Indonesia sebagai negara hukum mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Perangkat hukum ini dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur. Kemudian, agar perangkat hukum itu bisa berjalan baik, maka perlu dilakukan upaya membangun budaya dan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut A.V. Dicey, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, ciri negara hukum ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *Supremacy of law* (supremasi hukum), yaitu semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bernegara diselesaikan dengan hukum.
2. *Equality before the law* (persamaan dalam hukum), yaitu setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Tidak ada perbedaan penerapan hukum antara pejabat dengan rakyat.
3. *Due process of law* (asas legalitas hukum), yaitu semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

Sementara Jimly Asshiddiqie menambahkan, dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka tidak bisa dilepaskan dari sila ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan sila pertama dan utama dalam Pancasila.

Negara hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemahaesaan dan kemahakuasaan Tuhan. Artinya, diakuinya prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila.
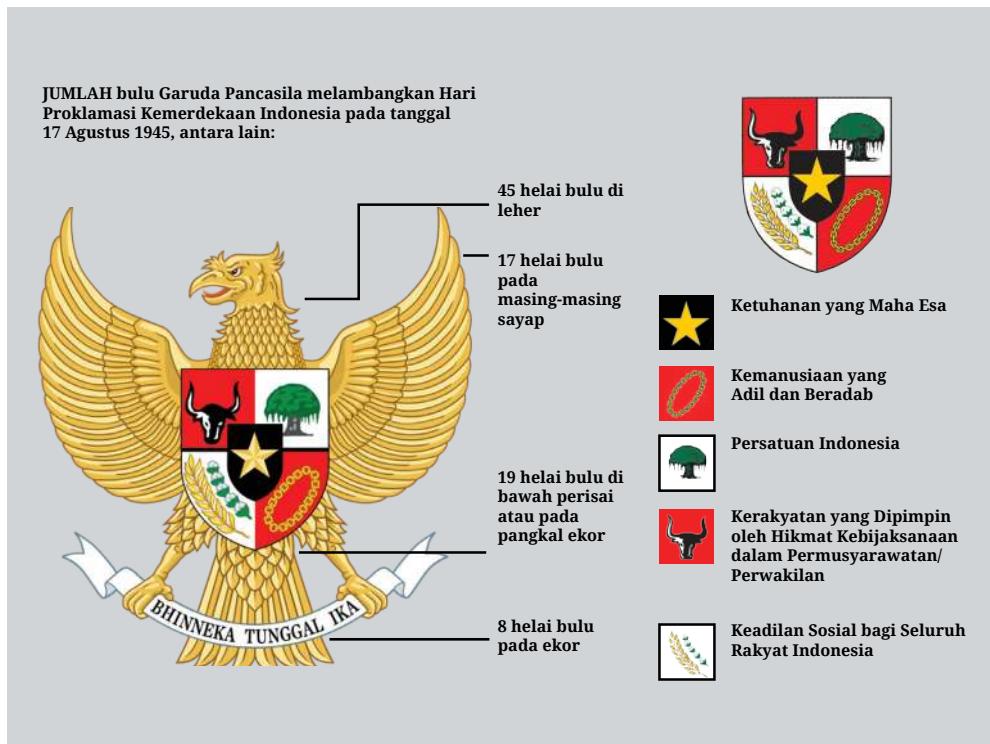
Gambar 2.8 Negara hukum Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemahaesaan dan kemahakuasaan Tuhan.
Sumber: Theogorbalsa/www.theogorbalsa.com (2017)

Dari penjelasan di atas, kita semakin memahami betapa pentingnya sebuah negara dibangun dan dijalankan berdasarkan hukum. Nah pengamalan Indonesia sebagai negara hukum ini bisa dimulai dari lingkungan sekolah dan masyarakat.

Perilaku yang mencerminkan sikap taat hukum, di antaranya:

1. Hadir ke sekolah tepat waktu dan tidak pulang sekolah sebelum waktunya.
2. Melaksanakan tugas piket kelas dengan penuh tanggungjawab.
3. Mengerjakan tugas pembelajaran yang diberikan guru dan mengumpulkannya tepat waktu.
4. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya.
5. Mengikuti seluruh kegiatan di sekolah dengan baik dan amanah.

Siswa Aktif

Bersama kelompokmu buatlah poster yang berisi imbauan untuk menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Misalnya, imbauan untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, tempelah poster tersebut di titik-titik yang tepat di lingkungan sekolah kalian.

D. Indonesia sebagai Negara yang Berkedaulatan Rakyat

Pernahkah kalian menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK)? Pada beberapa sekolah pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS dilakukan oleh MPK. Ketua MPK dan anggotanya merupakan perwakilan dari setiap kelas. MPK inilah yang kemudian berhak dan bertugas melakukan mekanisme pemilihan dan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua OSIS.

Namun, pada beberapa sekolah lagi, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS dilakukan secara langsung oleh seluruh siswa melalui mekanisme pemilihan raya. MPK hanya menjadi panitia pemilihan yang mempersiapkan prosesnya. Kemudian, menetapkan Ketua dan Wakil Ketua OSIS berdasarkan suara terbanyak.

Tahukah kalian, gambaran tersebut tidak jauh berbeda dengan Negara Indonesia. Pada awalnya, sebelum dilakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi negara. MPR, sebagai perwakilan rakyat, berhak dan bertugas memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden Republik Indonesia (RI).

Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Keanggotaan MPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 di atas, terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah, dan golongan menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.

Gambar 2.9 Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
Sumber: Merdeka.com/Imam Buhori/www.liputan6.com (2019)

Namun kemudian, seiring perjalanan Negara Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 mengalami amandemen mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Ketentuan pasal 1 ayat 2 diamandemen menjadi, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Pasal tersebut memiliki makna bahwa rakyatlah yang memiliki kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden RI, pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan ketentuan perundang-undangan yang dibuat untuk mengaturnya.

Simaklah atau pindai tautan video berikut ini agar kalian semakin memahami konsep negara yang berkedaulatan rakyat.

Simulasi Pemungutan Suara Pemilihan Serentak 2020 (KPU RI)
https://www.youtube.com/watch?v=xUb8dWT1dSg

Secara umum, kedaulatan rakyat dipercayakan kepada MPR yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Badan-badan perwakilan rakyat yang melaksanakan kedaulatan rakyat menurut perundang-undangan terdiri atas:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi)
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten (DPRD Kota/Kabupaten)
5. Badan Permusyawaratan Desa

Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat sekaligus berkedaulatan hukum. Artinya, kedaulatan rakyat di sini ada batasan atau aturan mainnya. Tidak bisa dilaksanakan sebebasnya. Itulah mengapa kedaulatan rakyat ini dilaksanakan berdasarkan Undang-undang.

Kedaulatan yang berlaku Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Artinya, konsepsi kedaulatan yang mengacu pada sila-sila Pancasila, terutama sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan keempat (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan).

Menurut Jimly Asshiddiqie, UUD NRI Tahun 1945 menganut paham kedaulatan yang unik. UUD NRI Tahun 1945 menggabungkan kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum. Artinya, kedaulatan rakyat bukan bermakna kedaulatan rakyat yang sebebas-bebasnya sebagaimana di Eropa dan Amerika, melainkan kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan didasarkan pada perundang-undangan.

Kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila memiliki dua asas pokok, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Asas kerakyatan adalah asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan cita-cita rakyat, berjiwa kerakyatan, menghayati kesadaran seperjuangan, dan cita- cita bersama. Asas musyawarah bermakna setiap kebijakan harus memperhatikan aspirasi rakyat, baik yang disampaikan melalui MPR maupun secara langsung, dan dilaksanakan dengan mengedepankan mekanisme musyawarah.
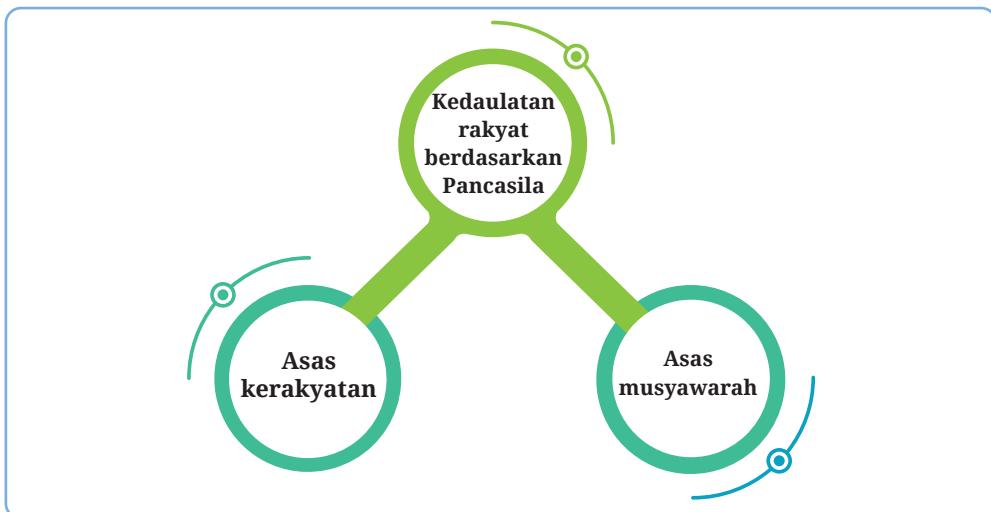
Gambar 2.10 Kedaulatan yang berlaku di Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila

Prinsip-Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu sebagai berikut:

1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat 2).
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah dan menetapkan UUD. MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 3).
3. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7C)
4. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang (Pasal 17).

Setelah mempelajari penjelasan di atas, kita menjadi paham bahwa kedaulatan rakyat yang diterapkan di Negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Bukan kedaulatan rakyat yang liberal, sebagaimana di negara-negara Eropa dan Amerika.

Nah sebagai warga negara yang baik, kalian bisa menyalurkan hak kedaulatan rakyat kalian dalam bentuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan organisasi di sekolah ataupun di masyarakat, misalnya melalui OSIS organisasi karang taruna. Kalian bisa menyampaikan masukan maupun kritik kalian kepada Ketua OSIS di sekolah demi kemajuan kegiatan kesiswaan di sekolah.

Siswa Aktif

Bersama kelompokmu buatlah poster publikasi yang berisi ajakan untuk menyalurkan aspirasi pada pemilihan raya Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Kemudian, kampanyekan kepada siswa-siswa di sekolah kalian. Diskusikan juga antarkelompok apakah poster publikasi tersebut sudah sesuai dengan tujuan.

Ringkasan Materi

1. Bentuk Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Artinya, seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan. Terdapat pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur melalui undang-undang.

2. Bentuk pemerintahan Indonesia merupakan republik. Artinya, suksesi kepemimpinan nasional dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum, bukan turun-temurun sebagaimana pada monarki.

3. Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, hukumlah yang menjadi panglima dalam memutuskan dinamika kehidupan kenegaraan.

4. Indonesia merupakan negara berkedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Artinya, kedaulatan rakyat di sini dijiwai oleh Pancasila dan dilaksanakan dengan acuan peraturan perundang-undangan.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi bentuk dan kedaulatan negara, cobalah kalian identifikasi perilakumu sehari-hari di sekolah dan di masyarakat. Tulislah perilakumu yang mencerminkan aspek-aspek di bawah ini!

No	Aspek	Perilaku
1.	Menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian di sekolah atau masyarakat	1. Menghormati dan menghargai teman yang berbeda suku dan warna kulit. 2. 3.
2.	Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan organisasi sekolah	1. 2. 3
3.	Menaati hukum dan taat tertib di sekolah dan masyarakat	1. 2. 3
4.	Berpartisipasi dalam proses suksesi kepemimpinan di sekolah	1. 2. 3

Tautan Pengayaan

Negara kesatuan merupakan bentuk ideal bagi negara Indonesia. Karena itu, kalian harus menjaga kesatuan dan persatuan bangsa agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Nah agar lebih menghayati pentingnya negara kesatuan Republik Indonesia, kalian simak tautan video berikut ini ya.

Mengapa Indonesia adalah Negara Kesatuan?
(Maetani Aitisisi Nurul)
https://www.youtube.com/watch?v=RiO-fYb0gqk

Uji Kompetensi

Cermatilah peristiwa-peristiwa di bawah ini. Lalu, tuliskan pendapatmu untuk menjawab persoalan yang diajukan.

1. Andi melakukan *bullying* kepada Tibo secara verbal. Karena merasa di-*bully,* Tibo membalas melakukan *bully* secara verbal dan fisik kepada Andi. Merasa terdesak, Andi melibatkan dua temannya untuk membalas Tibo. Tidak tinggal diam, dua orang teman Tibo pun membantu Tibo.

   Apa yang akan kalian lakukan bila berada pada posisi salah satu pihak? Mengapa kalian memilih melakukan tindakan tersebut? Apa alasannya?

2. Di sekolahmu akan diadakan pemilihan raya untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Terdapat tiga pasang calon yang akan memperebutkan suara dalam pemilihan raya. Salah seorang pasangan calon memintamu untuk menjadi tim sukses kampanye. Ia berpesan kepadamu untuk mencuri *start* dalam kampanye. Ia menjanjikan akan mengangkatmu menjadi ketua bidang I dalam OSIS jika terpilih.

   Bagaimana sikap kalian menanggapi situasi tersebut? Mengapa kalian memilih sikap tersebut?

3. Sebagai Ketua OSIS, kamu mendapati salah seorang ketua bidang melakukan kelalaian dalam laporan keuangan sebuah kegiatan. Ia salah melakukan pembayaran sewa kendaraan kepada pihak perusahaan organda. Akibat kelalaiannya, keuangan OSIS dirugikan sebesar Rp. 200.000.

   Sebagai Ketua OSIS, apa sikap yang kamu ambil terhadap tim kamu? Mengapa mengambil sikap dan keputusan tersebut?

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2021
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Untuk SMP Kelas VIII
Penulis : Muhammad Sapei, Trezadigjaya, Prayogo
ISBN : 978-602-244-448-0

Bab III
Tata Negara dan Pemerintahan

Tujuan Pembelajaran:

1. Peserta didik mampu menyadari pentingnya fungsi lembaga penyelenggara negara dan sistem pemerintahan dalam menjalankan negara.
2. Peserta didik mampu membedakan kewenangan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota.
3. Peserta didik menunjukkan sikap disiplin mematuhi peraturan daerah sebagai bentuk pengamalan ajaran agama.
4. Peserta didik menunjukkan sikap berjiwa besar sebagai meneladani sikap para pemimpin Daerah Swapraja.

Peta Konsep
Tata Negara dan Pemerintahan
Lembaga Penyelenggara Negara
Sistem Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
Pemerintahan Daerah Istimewa
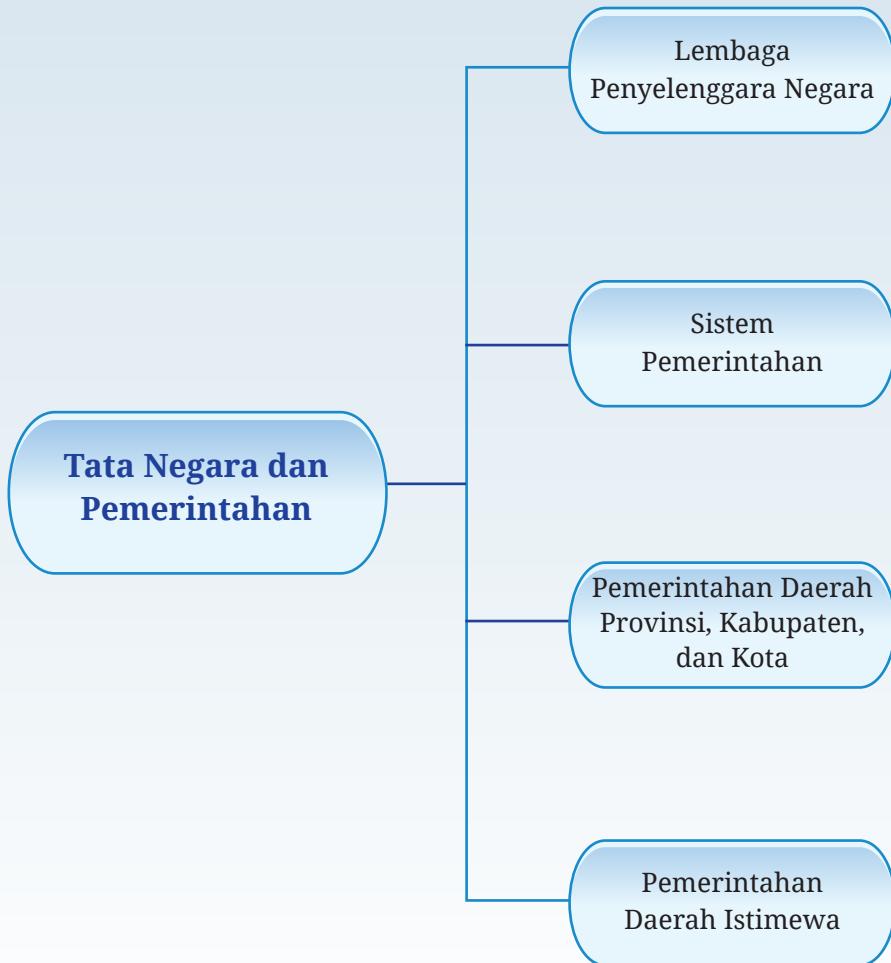
Gambar 3.1 Perdana Menteri M. Natsir bersama kabinetnya
Sumber gambar : Wikipedia/www.wikipedia.org (2016)

Dari Presidensil ke Parlementer

Tahukah kalian, Indonesia pernah memasuki era Demokrasi Parlementer sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Sistem pemerintahan Negara Indonesia yang semula presidensil berubah menjadi parlementer. Artinya, pemerintahan dijalankan oleh Dewan Menteri atau kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen.

Pada masa ini sering terjadi pergantian kabinet. Sistem parlementer membuat posisi kabinet rentan dijatuhkan oleh parlemen. Hal ini terbukti dengan terjadinya delapan kali pergantian kabinet dalam rentang waktu 1950 – 1959. Mulai kabinet pertama yang dipimpin oleh Perdana Menteri M. Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951) berakhir pada kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli 1959).

Sistem parlementer juga menjadikan posisi wakil presiden menjadi tidak terlalu terlihat perannya. Inilah salah satu yang menyebabkan Wakil Presiden Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden Republik Indonesia.

Pada 1 Desember 1956, DPR secara resmi mengabulkan pengunduran diri Wakil Presiden Mohammad Hatta. Sejak saat itu, Presiden Soekarno tidak didampingi wakil presiden dalam memimpin Negara Republik Indonesia hingga akhir periode kepemimpinannya.

Untuk lebih memahami lagi sistem pemerintahan dalam bernegara, simak tautan atau pindai video pembelajaran berikut ini.

Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer (Selfhy Ginting)
https://www.youtube.com/watch?v=eGi3rXAVO4c

Siswa Aktif

Menurut kalian, mengapa sistem pemerintahan parlementer tidak cocok bagi Indonesia? Bacalah data-data sejarah, lalu tuliskan analisis kalian dan diskusikan dalam kelompok. Sajikan dalam bentuk presentasi *powerpoint*, *prezi*, atau catatan diskusi kalian. Kemudian, presentasikan di depan kelas secara bergantian. Berikan tanggapan atas presentasi setiap kelompok.

Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mempelajari bentuk dan kedaulatan negara. Semoga kalian semakin mengenali Indonesia, ya. Ternyata Indonesia itu luas, membentang dari Sabang sampai Merauke, kurang lebih sepanjang 5.245 Km.

Jika mau disepadankan, sama dengan dari Inggris di Eropa Barat sampai Turkmenistan di Asia Tengah. Bayangkan betapa panjangnya wilayah Indonesia. Kita bersyukur hingga saat ini masih utuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga tetap terjaga sampai masa yang akan datang.

Nah kali ini kita akan belajar bersama tentang tata negara dan pemerintahan. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kalian juga perlu memahami ketatanegaraan dan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

A. Lembaga Penyelenggara Negara

Kalian pasti tahu berbagai organisasi yang ada di sekolah. Jika kalian cermati, komposisi organisasi di sekolah merupakan miniatur organisasi negara. Ada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang menjalankan fungsi eksekutif. OSIS menyusun berbagai rencana kerja dan anggaran tahunan

serta melaksanakannya dalam satu periode kepengurusan. Ada juga Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK), di beberapa sekolah namanya Kongres Siswa, yang menjalankan fungsi legislatif.

Demikian pula halnya dalam lingkup negara. Ada lembaga penyelenggara negara yang menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sesuai undang-undang. Jika di sekolah hanya ada lembaga eksekutif dan legislatif, maka dalam konteks negara ada tambahan satu lagi, yaitu lembaga yudikatif.

Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang Tupoksi ketiga lembaga negara tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia, kita bahas dulu mengapa perlu ada pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. Hal ini agar kalian lebih mudah dalam memahami materi. Selain itu, juga bisa menjadi pelajaran dalam berorganisasi di sekolah.

Dalam perjalanan sejak kemerdekaannya, Bangsa Indonesia pernah dipimpin oleh pemerintahan yang berlangsung cukup lama. Pertama masa orde lama dan kedua masa orde baru. Pada dua masa pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif sangat besar dan luas.

Lembaga legislatif dan yudikatif kurang menjalankan Tupoksi sebagaimana mestinya. Keduanya terlemahkan oleh kekuasaan eksekutif dan kehilangan independensinya. Akibatnya, pemerintahan menjadi tidak sehat. Kekuasaan eksekutif menjadi sangat kuat. Karena, tidak ada fungsi *check and balances* (mengawasi dan mengimbangi).

Gambar 3.2 Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan sidang di gedung DPR/MPR
Sumber: Suara Pembaruan/www.tribunnews.com (2019)

Menurut Mahfud MD, salah satu kelemahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebelum amandemen adalah tidak adanya mekanisme *check and balances*. Lembaga eksekutif (presiden) menjadi pusat kekuasaan dengan berbagai hak prerogatif.

Presiden, dalam kegentingan yang memaksa, berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Masalahnya, tidak ada kriteria yang jelas apa yang dimaksud dan indikator "kegentingan yang memaksa".

Masih menurut Mahfud, UUD NRI Tahun 1945 juga tidak mengatur mekanisme *judicial review.* Padahal, seringkali lahir produk legislatif yang dipersoalkan konsistensinya dengan UUD karena lebih banyak didominasi oleh keinginan-keinginan politik dari pemerintah.

Karena itulah, dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu pembahasan amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengenai *distribution of power* (pembagian kekuasaan) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip *check and balances.*

Dalam hukum ketatanegaraannya, Indonesia lebih dekat kepada pembagian kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan. Kekuasaan didistribusikan menjadi tiga lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun demikian, ketiga lembaga negara ini tidak terpisah, melainkan saling terkait menjalankan prinsip *check and balances* (saling mengawasi dan mengimbangi).

Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara. Dalam hal ini, diwujudkan dengan dipilihnya Dewan Perwakilan Rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Anggota DPR menjadi mitra sekaligus pengawas bagi eksekutif (presiden).

Lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, diwujudkan dengan lembaga kepresidenan beserta kabinetnya. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Lembaga kepresidenan bekerja sama dengan DPR dalam menjalankan negara. Misalnya, dalam penyusunan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Gambar 3.3 Mahkamah Agung menjalankan fungsi yudikatif

Sumber: SindoNews/Sabil Laluhu/www.sindonews.com (2020)

Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara. Dalam hal ini, diwujudkan dengan adanya lembaga kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga kehakiman bertugas mengadili pelanggaran pelaksanaan undang-undang oleh eksekutif.

Tabel 3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Penyelenggara Negara

Legislatif	Eksekutif	Yudikatif
Lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara.	Lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang.	Lembaga negara yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara.

Nah setelah mempelajari penjelasan di atas, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan organisasi di sekolah. Kegiatan kesiswaan di sekolah tidak akan berjalan baik dan mencapai tujuan tanpa ada sinergi dari OSIS dan MPK. OSIS mesti mampu menyerap aspirasi para siswa yang disampaikan melalui MPK. Berdasarkan inputan tersebut, OSIS bisa merancang program kerja yang tepat sasaran dan manfaat.

Kalian bisa bayangkan bila tidak ada sinergi antara OSIS dan MPK, apa yang akan terjadi? OSIS merasa telah merancang program kerja yang bermanfaat dan sesuai kebutuhan, tetapi para siswa merasa itu tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Akibatnya, tujuan bersama organisasi sekolah tidak tercapai.

Gambar 3.4 Sinergi antara OSIS dan MPK untuk mencapai tujuan sekolah
Sumber: Ukhuwah/www.ukhuwah.sch.id (2020)

Karenanya, pelajaran penting dari materi ini adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif mesti bekerja dalam kerangka sinergi. Pembagian kekuasaan bukan bermakna pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan bermakna adanya tupoksi masing-masing dalam menjalankan negara, tetapi

dalam bingkai kelembagaan negara yang mesti bersinergi untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Inilah pentingnya keberadaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam sebuah negara.

Siswa Aktif

Dengan bimbingan guru kalian, lakukanlah simulasi pemilihan umum (Pemilu). Siapkanlah alat-alat yang dibutuhkan, seperti kotak suara, kertas suara, bilik suara, dan lainnya. Kalian bisa memanfaatkan kardus bekas untuk membuatnya.

Tentukan yang bertugas sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU bertugas mengawal jalannya simulasi Pemilu. Rekam kegiatan ini dan unggah pada akun *YouTube* kalian. Bila tidak memungkinkan, buatlah dalam bentuk reportase. Kemudian, tempelkan pada mading sekolah.

B. Sistem Pemerintahan

Apakah kalian pernah berkunjung ke Amerika Serikat? Setidaknya membaca-baca seputar Negara Amerika, baik bidang politik, pertahanan, ekonomi, maupun sosial budaya. Tahukah kalian Negara Amerika menganut sistem pemerintahan presidensil?

Namun demikian, apakah sistem presidensil yang diterapkan di Amerika sama dengan sistem presidensil yang diterapkan di Indonesia? Bagaimana pula dengan sistem pemerintahan parlementer yang diadopsi oleh Malaysia, Inggris, Australia, dan lainnya. Mari kita bahas bersama!

Secara umum, ada dua jenis sistem pemerintahan yang berjalan di berbagai negara di dunia, yaitu sistem presidensil dan sistem parlementer. Dalam sistem presidensil, presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh sejumlah menteri yang diangkat oleh presiden. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden, namun presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.

Tabel 3.2 Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensil dengan Parlementer

Presidensil	Parlementer
1. Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan	1. Presiden/raja/ratu berfungsi sebagai kepala negara, sementara perdana menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan.

Presidensil	Parlementer
2. Presiden dibantu oleh sejumlah menteri yang diangkat oleh presiden.	2. Perdana menteri memimpin para menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan.
3. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden, tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.	3. Perdana menteri dan kebinetnya bertanggung jawab kepada parlemen.
4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.	4. Parlemen bisa membubarkan pemerintahan dengan mengajukan mosi tidak percaya.
5. Parlemen tidak dapat menurunkan presiden.	5. Pemerintah melalui kepala negara juga dapat membubarkan parlemen dengan dasar parlemen tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat.

Sedangkan, dalam sistem parlementer, presiden/raja/ratu berfungsi sebagai kepala negara, sementara perdana menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Perdana menteri memimpin para menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan. Perdana menteri dan kebinetnya bertanggung jawab kepada parlemen.

Dalam sistem parlementer, parlemen bisa membubarkan pemerintahan dengan mengajukan mosi tidak percaya. Sebaliknya, pemerintah melalui kepala negara juga dapat membubarkan parlemen dengan dasar parlemen tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat.

Dalam sejarahnya, Negara Indonesia pertama kali menganut sistem presidensil. Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebelum amandemen, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-udang Dasar.

Kemudian, mengalami perubahan mulai masa Republik Indonesia Serikat (RIS) 27 Desember 1949 sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dalam rentang waktu itu, sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Hal ini tertuang dalam pasal 69 ayat 1 Konstitusi RIS 1949, presiden adalah kepala negara. Sebelumnya, pada pasal 74 ayat 2 disebutkan, presiden mengangkat seorang perdana menteri dan menteri-menteri lainnya. Artinya, kepala pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri.

Namun, seiring perjalanannya, sistem parlementer menimbulkan ketidakstabilan politik. Hal ini ditandai dengan sering bergantinya kabinet. Kalian bisa bayangkan dalam kurun waktu itu terjadi delapan kali pergantian kabinet. Kemudian, pada 5 Juli 1959, keluarlah Dekrit Presiden. Dengan keluarnya Dekrit Presiden, maka sistem pemerintahan Negara Indonesia kembali menganut sistem presidensil.

Gambar 3.5 Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Sumber: Kemendikbud/www.kompas.com (2020)

Nah bagaimana dengan sekarang? Apakah sistem pemerintahan Indonesia masih menganut presidensil? Jika kita cermati, Negara Indonesia tidak sepenuhnya menganut sistem presidensil, sebagaimana Amerika Serikat. Ada beberapa penyesuaian yang dilakukan. Ada sisi parlementer yang diadaptasi.

Menurut Syamsul Bachri, dalam Jurnal Konsep Pemerintahan Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945 yang dikutip oleh Daniel Susilo, istilah yang sering digunakan adalah sistem presidensil konstitusional. Menurutnya, sistem presidensil konstitusional adalah kekuasaan pemerintahan presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar, baik dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara.

Syamsul mendasarkannya pada rumusan pasal 4 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.” Selain itu, merujuk juga pada pasal 6 A ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, tentang dipilihnya presiden secara langsung oleh rakyat. Artinya, sistem pemerintahan Indonesia mengadaptasi sistem presidensil, tetapi dilakukan penyesuaian berdasarkan undang-undang.

Karakteristik sistem pemerintahan presidensil konstitusional adalah sebagai berikut:

1. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
2. Sistem partai politik adalah multipartai.
3. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara.
4. Presiden dan atau wakil presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh parlemen jika terbukti melanggar hukum.
5. Terdapat prinsip *checks and balances.*
6. Presiden memiliki kewenangan menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang, mengajukan dan mengesahkan ataupun tidak mengesahkan rancangan undang-undang dan/atau undang-undang.
7. Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi.
8. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.
9. Pembatasan kekuasaan presiden dalam menjalankan pemerintahan bukan hanya terhadap masa jabatannya, tetapi juga pada kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan negara.
10. Presiden adalah eksekutif tunggal.
11. Parlemen memiliki hak angket dan hak interpelasi guna mengawasi pemerintahan (kabinet) dalam melaksanakan kebijakan publik.

Gambar 3.6 Menteri adalah pembantu presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan
Sumber: Tribunmanado/www.tribunmanado.com (2019)

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan terdapat sembilan karakter sistem pemerintahan presidensil, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif;
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja;
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah kepala pemerintahan;
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya;
6. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen;
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensil berlaku supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi;
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

Dengan kesembilan prinsip sistem presidensil ini, menurut Jimly Asshiddiqie, pascaperubahan UUD NRI Tahun 1945, sistem pemerintahan presidensil yang diterapkan Indonesia dapat dikatakan lebih murni. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan tugas dan wewenangnya masing-masing menurut Undang-Undang Dasar. Karena itu, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak perlu dibedakan apalagi dipisahkan. Wakil presiden juga tidak dapat diartikan atau diberi peran semacam jabatan perdana menteri.

Nah kalian jadi paham 'kan sistem presidensil yang diterapkan di Negara Indonesia? Dengan pengetahuan yang didapatkan sekarang, kalian bisa mengikuti perkembangan yang terjadi dalam perpolitikan nasional.

Siswa Aktif

Bersama kelompokmu lakukanlah kajian pustaka dan telusur informasi. Buatlah perbandingan antara sistem presidensil yang diterapkan di Indonesia dengan sistem presidensil yang diterapkan di Amerika Serikat.

Kemudian, tuliskan pendapat kalian apakah sistem presidensil yang diterapkan di Indonesia sudah sesuai dan tepat? Buatlah dalam bentuk video sederhana dan unggah di media sosial. Bila tidak memungkinkan, buatlah dalam bentuk tulisan opini. Kemudian, tempelkan pada mading sekolah.

C. Pemerintahan Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten

Jika diibaratkan sebuah keluarga, dalam sebuah keluarga ada orang tua dan beberapa anak. Setiap anak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Namun, setiap anak terikat dan tergabung dalam satu keluarga yang sama. Nah jika kita tarik dalam konteks negara, kalian pasti tahu Negara Indonesia terdiri atas berbagai provinsi. Dalam setiap provinsi, terdapat beberapa kota dan kabupaten.

Nah bagaimanakah relasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah? Bagaimana posisi pemerintahan daerah dalam ketatanegaraan Indonesia? Inilah yang akan kita pelajari bersama.

Gelombang reformasi tak bisa dibendung pada 1998. Pasca reformasi yang mengakhiri era orde baru, semangat daerah untuk memperoleh haknya demikian menguat. Ada yang menyuarakan untuk mengubah bentuk negara dari kesatuan menjadi federal. Ada yang menuntut sebagai daerah otonom. Ada juga yang menuntut otonomi khusus. Bahkan, ada yang sampai menyuarakan keinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selama kurang lebih 32 tahun masa orde baru, sistem yang diterapkan adalah sentralisasi. Pemerintahan pusat sangat dominan, sementara pemerintahan daerah perannya terpinggirkan. Ketika reformasi bergulir, momentum tersebut diimanfaatkan daerah untuk menuntut hak-haknya.

Merespons tuntutan tersebut, Presiden BJ. Habibie segera menyusun dan mengeluarkan rancangan undang-undang (RUU) tentang pemerintah daerah. RUU ini kemudian dibahas dan disahkan oleh DPR menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan.

Kelahiran UU Nomor 22 Tahun 1999 memiliki semangat memberikan otonomi kepada daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, tetapi bertanggung jawab. Otonomi daerah juga mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Gambar 3.7 Bupati merupakan pelaksana otonomi daerah di tingkat kabupaten
Sumber: Pemda Karawang/www.karawang.go.id (2019)

Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman masing-masing daerah. Namun demikian, otonomi daerah harus tetap ditempatkan dalam kerangka negara kesatuan. Otonomi daerah berbeda dengan negara bagian dalam negara federal. Dalam negara kesatuan, tidak ada negara dalam negara.

Pada perkembangan selanjutnya, UU Nomor 22 Tahun 1999 disempurnakan dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Otonomi daerah diterapkan dalam asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dilaksanakan di ranah kabupaten dan kota;
3. Asas tugas pembantuan dilaksanakan di daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa;
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun kemudian, UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mengalami penyesuaian dan direvisi dengan disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 dinilai tidak relevan lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
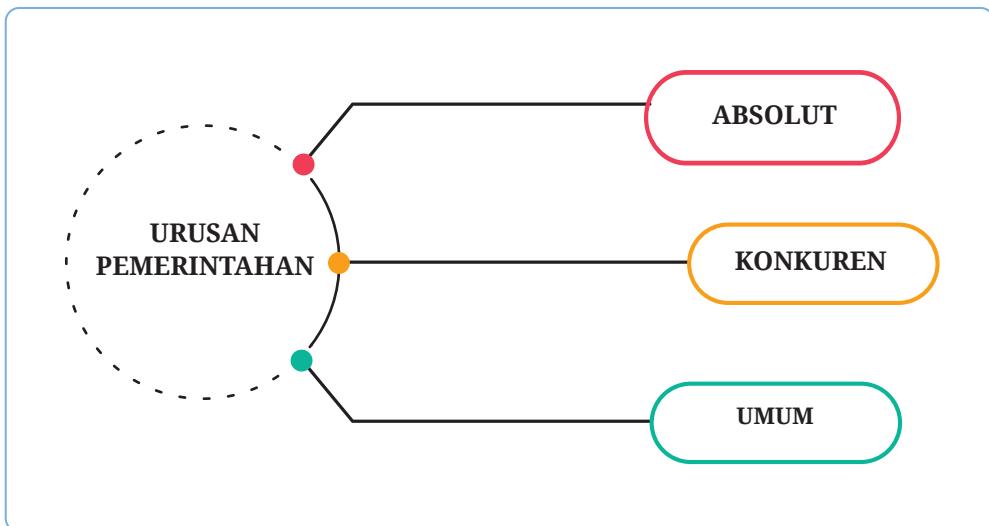
UU Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi tiga, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karenanya, tidak ada hubungannya dengan otonomi atau desentralisasi. Ruang lingkup yang menjadi urusan pemerintah pusat diterangkan dalam pasal 10 ayat 1, yaitu agama, pertahanan, keamanan, yustisi, politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota. Urusan konkuren dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Ruang lingkupnya meliputi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, sebagaimana diterangkan dalam pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Ruang lingkup pelayanan dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; sosial.

Sementara, ruang lingkup non-pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga

berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; dan perpustakaan.
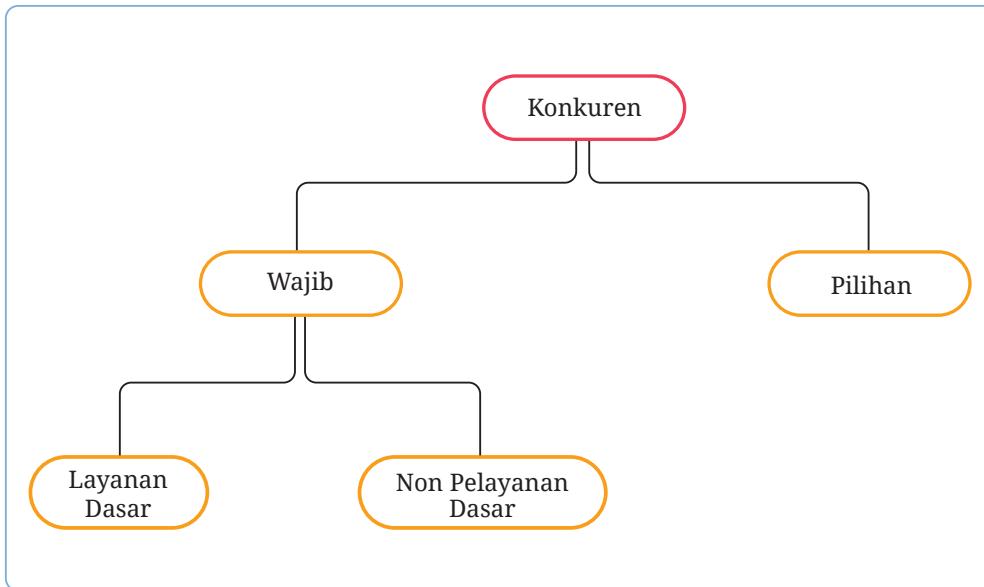
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat;
5. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
2. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/ kota;
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota;
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
2. Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/ kota;
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota;
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya, urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

4. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Adapun urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Ruang lingkup urusan pemerintahan umum berdasarkan pasal 25 ayat 1 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan dan memeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
3. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
6. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Relasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka UU Nomor 23 tahun 2014 dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.
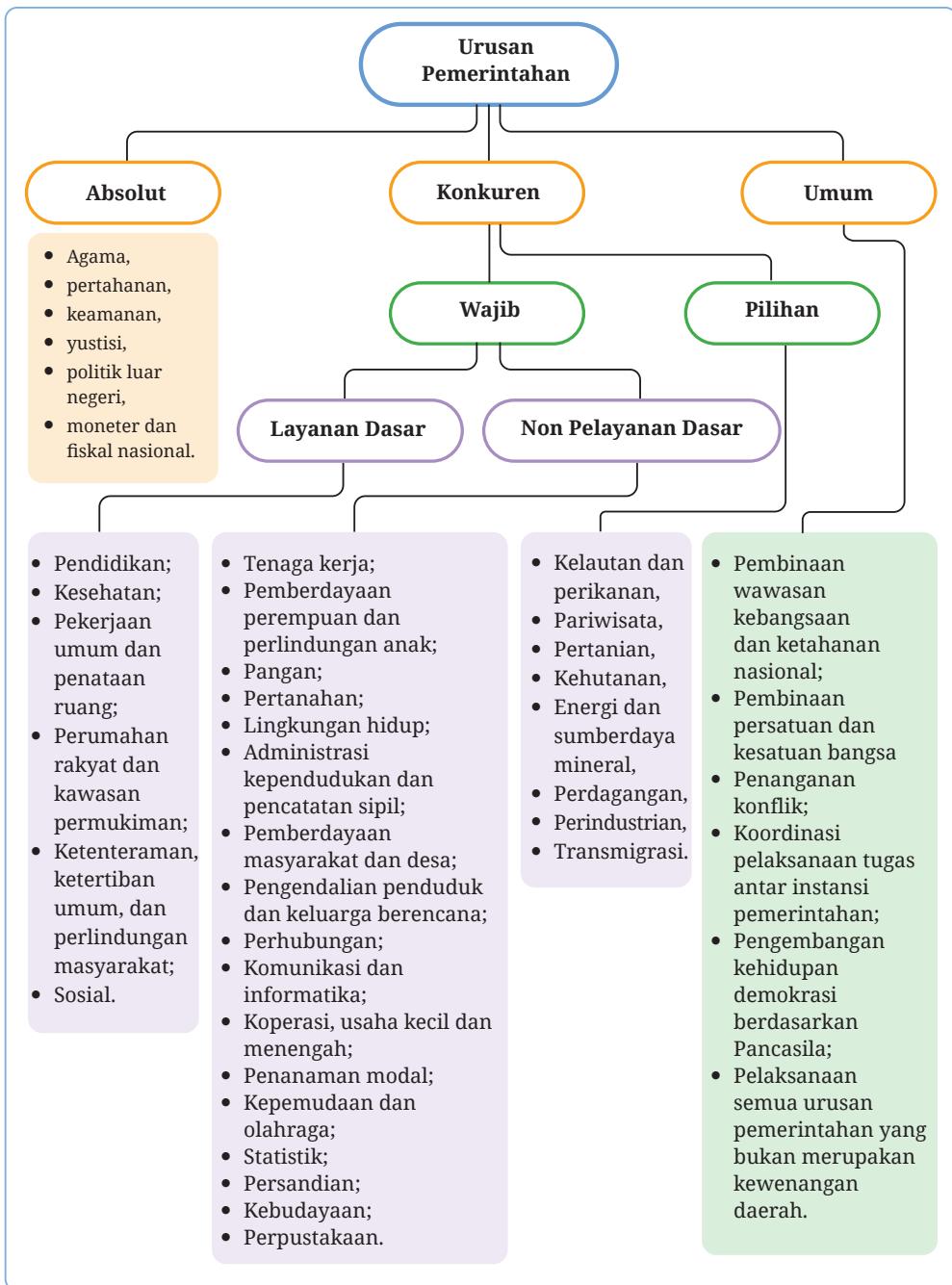
Nah apakah kalian tinggal di wilayah kabupaten atau kota? Baik tinggal di wilayah kabupaten ataupun kota, sebagai warga negara yang baik, kalian mesti mematuhi peraturan-peraturan daerah yang berlaku, misalnya dalam tertib berlalu lintas. Peraturan lalu lintas dibuat dan diterapkan agar terwujud ketertiban dalam berlalu lintas dan terjaga keselamatan pengguna jalan.

Karena itu, kalian mesti menunjukkan sikap disiplin dalam menaati tata tertib berlalu lintas. Beberapa contoh tertib berlalu lintas di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyebrang di jembatan penyebrangan atau di *zebra cross.*
2. Tidak menyerobot lampu merah.
3. Tidak mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi.
4. Berkendara di lajur jalan yang benar, tidak *zig zag* dalam berkendara (bergonta-ganti lajur).
5. Menggunakan helm bagi pengendara motor.
6. Mengenakan sabuk keselamatan bagi pengendara mobil.
7. Tidak menyalip kendaraan dari sebelah kiri jalan.

Gambar 3.8 Menyebrang jalan di zebra cross merupakan bentuk tertib lalu lintas
Sumber: Polres Agam/Humas/ https://agam.sumbar.polri.go.id (2018)

Sikap disiplin kalian dalam mena'ati peraturan lalu lintas merupakan bentuk pengamalan ajaran agama. Karena, agama mengajarkan pemeluknya agar tertib berlalu lintas dan menjaga keselamatan nyawa. Bahkan, agama juga mengajarkan agar kita menyingkirkan duri dari jalan.

Artinya, kita tidak boleh membuang benda sembarang di tengah jalan yang bisa membahayakan pengguna jalan. Misalnya, membuang batu di tengah jalan karena bisa menyebabkan pengendara motor tergelincir dan terjatuh.

Siswa Aktif

Sebuah kabupaten memiliki masalah rendahnya mutu pendidikan. Banyak lulusan SMA di kabupaten tersebut yang kalah bersaing untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri di kota. Sementara, pada sisi lain kabupaten tersebut juga memiliki masalah rendahnya layanan kesehatan ibu dan anak. Hanya sedikit desa dan kelurahan yang memiliki layanan posyandu.

Jika kalian seorang kepala daerah kabupaten tersebut, program apa yang akan kalian prioritaskan? Mengapa memilih program tersebut? Buatlah jawabanmu dalam bentuk rekaman video atau Bila tidak memungkinkan, buatlah dalam bentuk tulisan opini. Kemudian, tempelkan pada mading sekolah.

D. Pemerintahan Daerah Istimewa

Kalian pernah berkunjung ke Yogyakarta? Selain terkenal dengan Malioboro sebagai pusat perbelanjaan khas Yogyakarta dan gudeg sebagai makanan khasnya, tahukah kalian bahwa Yogyakarta adalah salah satu Daerah Istimewa di Indonesia selain Nangro Aceh Darussalam. Bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan Daerah Istimewa? Nah inilah yang akan kita bahas bersama.

Ketentuan tentang Daerah Istimewa diatur dalam Pasal 18 B ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.”

Namun demikian, UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga tidak ditemukan apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa.

Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 juga tidak menjelaskan indikator yang menjadi acuan sebuah daerah menjadi Daerah Istimewa. Keduanya juga tidak menjelaskan pada level pemerintahan apa sebuah daerah bisa menyandang Daerah Istimewa. Karena itu, untuk memahami apa yang dimaksud Daerah Istimewa dalam pasal tersebut, mesti menggunakan pendekatan sejarah.

Sejarah menjelaskan bahwa Daerah Istimewa merupakan daerah yang asal mulanya berbentuk kerajaan/kesultanan (Daerah Swapraja). Daerah Swapraja adalah daerah otonom dalam lingkungan susunan pemerintahan Hindia Belanda.

Ketika itu, pengaturannya melalui kontrak politik dengan penguasa kerajaan/kesultanan, sebagaimana diatur dalam *zelfbestuurregelen* 1938. Pada masa Hindia Belanda disebut sebagai *zelfbestuur landschappen.* Sementara, pada masa pemerintahan pendudukan Jepang disebut sebagai *Kooti.* Semua istilah tersebut maknanya sama dengan Daerah Istimewa.

Gambar 3.9 Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang menyandang status Daerah Istimewa
Sumber: Sanjaya/www.sanjayatour.com (2020)

Pada saat pengesahan UUD NRI Tahun 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, Soepomo memberikan penjelasan tentang maksud ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Ia menyatakan, *"Dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati, kooti-kooti, sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunannya yang asli. Akan tetapi, itu keadaanya sebagai daerah, bukan negara; jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah Zelfbesturende Landschappen, itu bukan negara, sebab hanya ada satu negara. Jadi, Zelfbesturende Landschappen hanyalah daerah saja, tetapi daerah istimewa, yaitu yang mempunyai sifat istimewa. Jadi, daerah-daerah istimewa itu suatu bagian dari Staat Indonesia, tetapi mempunyai sifat istimewa, mempunyai susunan asli."*

Kemudian, secara bertahap melalui proses diskusi yang panjang, para pemimpin Daerah Swapraja tersebut dengan besar hati bergabung dengan Negara Republik Indonesia dalam bingkai negara kesatuan. Salah satu di antaranya adalah Sultan Syarif Kasim II dari Kesultanan Siak Sri Inderapura.

Pada 28 November 1945, Sultan Syarif Kasim II mengirimkan pernyataan pendek kesetiaan Kesultanan Siak Sri Inderapura kepada pemerintah Republik Indonesia dan menyerahkan harta kekayaan kesultanan untuk perjuangan senilai ± f. 13.000.000 (tiga belas juta gulden).

Inilah sikap jiwa besar para pemimpin Daerah Swapraja yang mesti kalian teladani. Mereka tidak egois dengan memilih menjadi negara terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan bergabung dengan NKRI. Bahkan, memberikan sumbangan kekayaan kerajaan atau kesultanan untuk membangun Negeri Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUDS 1950 juga tetap mengakui kedudukan Daerah Swapraja. Pasal 64 Konstitusi RIS mengatur tentang pengakuan terhadap Daerah Swapraja dan pasal 65 mengatur tentang kedudukan Daerah Swapraja. Dalam UUDS 1950, kedudukan Daerah Swapraja diatur dalam pasal 132 – 133. Jadi, baik Konstitusi RIS maupun UUDS 1950 mengakui Daerah Swapraja.

Dari rumusan antara UUD NRI Tahun 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950, meskipun menggunakan istilah yang berbeda, tetapi bisa dipahami Daerah Swapraja yang dimaksud adalah sama dengan Daerah Istimewa, sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

Kedudukan Daerah Istimewa dalam UUD NRI Tahun 1945, diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, *"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan daripada sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa."*

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa status Daerah Istimewa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 B ayat 1, bersifat dinamis. Artinya, pada dasarnya tidak ada larangan dalam UUD NRI Tahun 1945 jika pemerintah bersama-sama DPR menyetujui pembentukan Daerah Istimewa yang baru.

Selain itu, satuan pemerintahan daerah untuk Daerah Istimewa tidak dibatasi hanya pada lingkup daerah provinsi, tetapi dapat dibentuk dalam lingkup kabupaten/kota, dan bahkan desa. Sampai saat ini, wilayah yang menyandang status Daerah Istimewa hanya ada dua, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Nangro Aceh Darussalam berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012.

Gambar 3.10 Nangro Aceh Darussalam merupakan salah satu provinsi yang menyandang status Daerah Istimewa
Sumber: Pemda Aceh/www.acehprov.go.id (2016)

Siswa Aktif

Dalam sebuah kecamatan, terdapat lima desa. Ada sebuah desa yang mengajukan status desa istimewa. Aspirasi yang disampaikan adalah suksesi kepala desa tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh warga desa, melainkan oleh para tokoh desa tersebut.

Jika kalian seorang camat, keputusan apa yang akan kalian ambil terhadap aspirasi tersebut? Mengapa kalian memilih memutuskan demikian? Diskusikan bersama kelompok kalian. Sajikan hasilnya dalam format presentasi *powerpoint*, *prezi*, atau *mind mapping*, lalu presentasikan di depan kelas secara bergantian.

Ringkasan Materi

1. Lembaga penyelenggara negara dibagi menjadi tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
2. Indonesia menerapkan sistem presidensil konstitusional.
3. Peraturan tentang pemerintahan daerah diatur menjadi tiga urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
4. Daerah istimewa berasal dari Daerah Swapraja pada masa penjajahan Hindia Belanda yang masih eksis pada saat Indonesia merdeka.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi tata negara dan pemerintahan, cobalah kalian identifikasi perilakumu sehari-hari di sekolah dan di masyarakat. Tulislah perilakumu yang mencerminkan aspek-aspek di bawah ini!

No	Aspek	Perilaku
1.	Berpartisipasi aktif dalam upaya penegakan hukum di sekolah atau masyarakat	1. 2. 3
2.	Berpartisipasi aktif dalam memajukan organisasi di sekolah.	1. 2. 3
3.	Berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemajuan masyarakat.	1. 2. 3
4.	Meneladani sikap jiwa besar para pemimpin Daerah Swapraja yang memilih bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	1. 2. 3

Tautan Pengayaan

Lembaga legislatif sebagai salah satu lembaga penyelenggara negara memiliki peran penting dengan fungsi *check and balances.* Nah agar lebih mengenal tugas pokok dan fungsi legislatif, kalian simak tautan video berikut ini.

Apa sih Kerjanya Anggota DPR? (Kompas TV)
https://www.youtube.com/watch?v=QMoJDGlqb3E

UJI KOMPETENSI

Cermatilah peristiwa-peristiwa di bawah ini. Lalu, tuliskan pendapatmu untuk menjawab persoalan yang diajukan.

1. Seorang ketua RT bersilang pendapat dengan para tokoh masyarakat di tempatnya perihal tata kelola iuran keamanan warga. Sebagai pelaksana eksekutif di tingkat RT, ketua RT tersebut merasa lebih berhak untuk memutuskan dibanding para tokoh masyarakat.

   Bila kalian dimintai pendapat, apa pendapat kalian sebagai solusi dari persoalan di atas?

2. Seorang ketua bidang OSIS mengambil keputusan tanpa berkoordinasi dengan Ketua OSIS. Sebagai pucuk pimpinan organisasi, ketua OSIS merasa dilangkahi. Ketua OSIS menuding ketua bidang tersebut tidak paham organisasi.

   Jika kalian menjadi ketua bidang lainnya, bagaimana cara kalian memutuskan persoalan di atas?

3. Pada awal kemerdekaan, pada mulanya beberapa Daerah Swapraja enggan menyatakan kesetiaan dan bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Setelah, melalui proses diskusi yang panjang, barulah Daerah-daerah Swapraja itu bergabung dengan Negara Republik Indonesia.

   Menurut analisis kalian, apa faktor yang memberatkan Daerah Swapraja bergabung dengan Negara Republik Indonesia? Apa pula faktor yang menyebabkan Daerah Swapraja akhirnya bersedia bergabung dengan Negara Republik Indonesia?

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2021**

**Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Untuk SMP Kelas VIII**

Penulis : Muhammad Sapei, Trezadigjaya, Prayogo

ISBN : 978-602-244-448-0

Bab IV
Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda

Tujuan Pembelajaran:

1. Peserta didik mampu menceritakan latar belakang semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda.
2. Peserta didik mampu mempraktikkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda.
3. Peserta didik mampu mensyukuri persatuan Bangsa Indonesia sebagai bentuk karunia Tuhan Yang Maha Esa.
4. Peserta didik mampu menuliskan rencana kontribusi bagi bangsa dan negara serta peta jalannya sebagai perwujudan spirit Sumpah Pemuda di era reformasi.

Peta Konsep

Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda
Sejarah Lahirnya Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda
Nilai-Nilai Luhur dalam Sumpah Pemuda
Sumpah Pemuda dan Kontribusi di Era Reformasi

Gambar 4.1 Di gedung inilah para pemuda melaksanakan Kongres Pemuda II
Sumber: Kemdikbud/www.kemdikbud.go.id (2013)

Museum Sumpah Pemuda

Apakah kalian tahu Museum Sumpah Pemuda? Museum ini terletak di Jalan Kramat Raya No. 106, Jakarta Pusat. Di gedung inilah, para pemuda dahulu berkumpul untuk berdiskusi seputar peran dan kontribusi pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Tahukah kalian, gedung ini asalnya adalah rumah kos para pemuda milik Sie Kong Liang. Sie Kong Liang menjadikan rumahnya sebagai tempat kos para pelajar *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* (Stovia) dan *Rechtsschool.* Para pelajar yang menyewa rumah ini, di antaranya Mohammad Yamin, Amir Syarifudin, Surjadi, Sunarko, Kuncoro Purbopranoto, dan Mohammad Amir.

Ketika itu, rumah ini menjadi tempat pertemuan para pelajar dan pemuda. Mereka mendiskusikan banyak hal seputar perjuangan Bangsa Indonesia. Tempat ini semakin kesohor setelah organisasi-organisasi pergerakan kepemudaan juga sering menjadikan rumah ini sebagai tempat pertemuan. Beberapa di antaranya Sekar Roekoen, Pemuda Indonesia, dan Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia. Bahkan, Bung Karno pun cukup sering datang ke tempat ini.

Pada 15 Agustus 1928, tempat ini dijadikan markas untuk merancang Kongres Pemuda II. Para pemuda sepakat menunjuk Ketua PPPI, Sugondo Joyopuspito, sebagai pemimpin kongres. Hingga akhirnya, momen bersejarah itu pun tiba, yakni pembacaan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Rumah ini menjadi saksi sejarah berlangsungnya peristiwa yang menjadi tonggak semangat kebangkitan nasional.

Pada masa Gubernur Ali Sadikin, pada 1973 rumah ini dipugar dan kemudian diresmikan menjadi Gedung Sumpah Pemuda. Hal ini atas usulan dari salah satu pelaku sejarah, yaitu Sunario Sastrowardoyo. Kemudian, pada 16 Agustus 1979 gedung ini diserahkan pengelolaannya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada 7 Februari 1983 sesuai SK Mendikbud No. 029 Tahun 1983, gedung ini diubah menjadi Museum Sumpah Pemuda.

Sebagai visualisasi kronologis dan situasi berlangsungnya Sumpah Pemuda, kalian saksikan video atau pindai QR-Code berikut ini ya:

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 Sejarah, kronologis, tempat lokasi dan peserta Kongres (Nur Ichtiar)
https://www.youtube.com/watch?v=E9nxd2fs-tw

Siswa Aktif

Setelah kalian membaca apersepsi dan menonton tautan video di atas, ceritakanlah di depan kelas kalian gambaran situasi Kongres Pemuda II yang berlangsung pada masa itu. Berilah tanggapan atas pemaparan teman kalian.

Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mempelajari tata negara dan pemerintahan. Semoga kalian sudah memahami ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Negeri ini terbuka bagi siapa saja putra-putra terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin. Karenanya, kalian mesti semangat belajar dan menempa diri agar kelak bisa mengisi pos-pos kepemimpinan untuk berkontribusi bagi negeri ini.

Berbicara semangat berkontribusi bagi negeri, sejak dahulu para pemuda bangsa ini sudah menunjukkan keteladanannya bagi kita. Salah satunya kita bisa simak pada sejarah dan peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda lahir menjadi tonggak kebangkitan nasional yang dimotori para pemuda. Nah kalian sebagai bagian dari generasi muda bangsa ini, mesti mampu mengartikulasikan semangat Sumpah Pemuda untuk merancang kontribusi bagi Indonesia.

A. Sejarah Lahirnya Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda

Pernahkah ada pengemis tua yang datang ke rumah kalian? Ia meminta makan kepada kalian karena belum makan seharian. Kalian pasti merasa iba kepadanya. Tahukah kalian pada masa penjajahan dulu, rakyat Indonesia banyak yang kelaparan karena sulit mendapatkan makanan.

Kalian bisa menonton film perjuangan kemerdekaan, seperti Cut Nyak Dien, November 1828 Diponegoro, Merdeka atau Mati Surabaya 1945, Jenderal Sudirman, Darah Garuda, dan lainnya. Dalam film-film tersebut, kita memperoleh gambaran rakyat Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan Belanda.

Kalian bisa menonton film-film perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah melalui Pusat Sumber Belajar di sekolah kalian atau melalui *channel YouTube* yang menayangkannya. Pada film-film tersebut kalian bisa menyaksikan perjuangan bangsa Indonesia melawan keserakahan penjajah yang ingin mengeruk kekayaan negeri Indonesia.

Sejatinya, Indonesia adalah negeri yang kaya dengan sumber daya alam. Berbagai bahan tambang tertimbun dalam perut bumi Indonesia. Tanah Indonesia juga sangat subur. Pertanian dan perkebunannya melimpah. Karenanya, kita mesti bersyukur kepada Tuhan kepada Tuhan Maha Esa atas karunia ini.

Sebagai bentuk rasa syukur, kalian harus mampu menjaga karunia sumber daya alam melimpah ini. Kalian tidak boleh merusak lingkungan alam. Ketika kalian nanti menjadi pejabat atau pengusaha, jangan mengeksploitasi alam secara berlebihan. Karena, hal itu pasti akan merusak keseimbangan alam.

Kekayaan sumber daya alam inilah yang membuat Bangsa Belanda tertarik menjajah Indonesia karena syahwat keserakahannya. Selama masa penjajahan, penjajah Belanda mengeruk harta kekayaan negeri ini dan membawanya ke negeri mereka. Sementara, rakyat Indonesia hanya dijadikan kuli dan terjerembab dalam kebodohan dan kemiskinan. Kerja rodi dan tanam paksa merupakan contoh kebijakan penjajah Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia.

Gambar 4.2 Kerja rodi adalah salah satu kebijakan penjajah Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia
Sumber: Wikipedia/www.indozone.id (2019)

Di tengah pengerukan sumber daya alam Indonesia oleh penjajah Belanda, ada beberapa politisi Pemerintah Kerajaan Belanda yang menyampaikan kritik. Mereka adalah Baron Van Hoevel, Frans Van Deputte, dan Mr. C.T. Van Deventer. Ketiganya menegaskan bahwa Pemerintah Kerajaan Belanda ikut bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat Hindia Belanda (Indonesia).

Mereka mendesak agar Pemerintah Kerajaan Belanda memberikan balas jasa atas kekayaan alam Hindia Belanda yang dikeruk. Desakan politik itu mempengaruhi Pemerintah Kerajaan Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada September 1901. Politik etis ini bertujuan memberikan kesempatan kepada Bumi Putra untuk mengenyam pendidikan agar menjadi tenaga terampil dan terlatih. Kemudian, dipekerjakan sebagai tenaga administrasi perkantoran. Jadi, sebenarnya kebijakan politis etis ini untuk kepentingan penjajah kolonial juga.

Politik etis menyasar tiga bidang utama, yaitu pendidikan, pertanian, dan kependudukan. Pendidikan diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada Bumi Putra untuk mengenyam pendidikan, baik di Indonesia maupun ke negeri Belanda. Pada bidang pertanian dibuat saluran-saluran irigasi untuk mengairi sawah dan ladang. Dibangun pula jalan-jalan lintas kota untuk akses dan mobilitas distribusi barang. Sementara, kependudukan diwujudkan dengan transmigrasi, yaitu memindahkan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang lebih sedikit penduduknya.
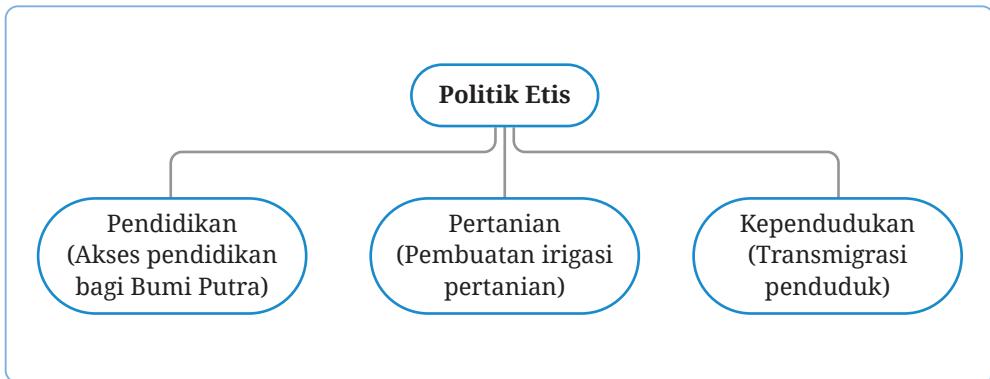
Meski pendidikan hanya bisa diakses oleh kalangan Bumi Putra tertentu, tetapi setidaknya kebijakan ini memberikan kesempatan kepada sebagian putra-putra Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Dari sinilah lahir kalangan terpelajar. Merekalah yang kemudian memberikan warna baru dalam upaya perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui jalur pergerakan organisasi dan politik.

Gambar 4.3 Kalangan terpelajar yang lahir dari kebijakan politik etis Belanda.
Sumber: Senandika/www.senandika.web.id (2017)

Kalangan terpelajar ini secara intensif membangkitkan kesadaran sebangsa dan setanah air kepada rakyat Indonesia. Dari sini lahirlah berbagai organisasi pergerakan, misalnya Jami'atul Khair, Sarekat Dagang Islam yang

kemudian bertransformasi menjadi Sarekat Islam, Budi Utomo, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia (PNI), Muhammadiyah, dan Nahdhatul Ulama.

Organisasi pergerakan tersebut memberikan nuansa baru dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan merebut kemerdekaan tidak hanya ditempuh secara fisik dengan angkat senjata. Namun, juga dilakukan melalui jalur pendidikan, ekonomi, serta diplomasi politik dan internasional.

Keberadaan berbagai organisasi pergerakan tersebut saling mengisi satu sama lain. Setiap organisasi pergerakan memiliki kefokusan perjuangan. Titik persamaannya adalah semua organisasi pergerakan mencita-citakan dan memperjuangkan Indonesia merdeka. Titik tolaknya dimulai dari tumbuhnya kesadaran perasaan sebangsa dan setanah air. Inilah yang menjadi agenda bersama berbagai organisasi pergerakan. Mereka terus berupaya menumbuhkan kesadaran sebangsa dan setanah air kepada rakyat Indonesia.

Dalam selang waktu yang tidak lama dan berjalan seiring lahirnya organisasi pergerakan, lahir pula organisasi-organisasi kepemudaan. Ada Jong Java, Jong Sumateranen Bond, Jong Batak, Jong Islamieten Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Jong Minahasa. Organisasi kepemudaan ini lahir dalam rentang waktu 1915 sampai 1924.

Gambar 4.4 Semangat kebangkitan nasional melahirkan berbagai organisai pemuda.
Sumber: Majalah Nabawi/www.majalahnawabi.com (2018)

Organisasi kepemudaan tersebut awalnya bersifat kedaerahan. Namun kemudian, muncul kesadaran dari para tokoh pemuda pentingnya membangun persatuan dalam organisasi kepemudaan. Kesadaran ini coba diwujudkan dengan melaksanakan Kongres Pemuda I pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Namun, sayangnya kongres ini belum menghasilkan kemufakatan gerakan perjuangan kepemudaan.

Dalam Kongres Pemuda I tersebut, muncul gagasan agar organisasi-organisasi kepemudaan melakukan fusi (melebur jadi satu organisasi). Namun, gagasan ini tidak sepenuhnya disetujui. Sebagian organisasi kepemudaan mengusulkan federasi (kesatuan dalam keragaman organisasi). Sebagian organisasi kepemudaan menyampaikan bahwa organisasi pemuda berbasis kedaerahan tetap dibutuhkan untuk memperkokoh latar belakang kedaerahan menuju persatuan nasional. Sampai akhir kongres, belum bisa mencapai titik temu antarorganisasi kepemudaan.

Setelah Kongres Pemuda I, lahir organisasi Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI). PPPI secara intensif melakukan pendekatan dan komunikasi kepada berbagai organisasi kepemudaan. Tujuannya agar organisasi kepemudaan bersatu dalam garis perjuangan. Format fusi atau federasi menjadi tidak terlalu penting. Faktor terpenting adalah adanya kesadaran dan kesamaan pandangan akan pentingnya persatuan bangsa. Pada akhirnya, disepakati akan digelar Kongres Pemuda II pada 27 – 28 Oktober 1928 di Batavia.

Sugondo Joyopuspito, Ketua PPPI, didaulat sebagai ketua pelaksana. Sementara itu, Joko Marsaid menjadi wakil ketua, Mohammad Yamin sebagai sekretaris, dan Amir Syarifuddin sebagai bendahara. Pengurus inti tersebut dibantu oleh Johan Mohammad, Konco Sungkono, Senduk, Johanes Leimena, dan Rochyani.

Kongres Pemuda II dilaksanakan selama dua hari, yaitu 27 – 28 Oktober 1928. Ada tiga tempat yang digunakan melaksanakan kongres. Hari pertama bertempat di Gedung Katholieke Jongelingen Bond, Lapangan Banteng. Hari kedua bertempat di Gendung Oost Java Bioscoop (sekarang Jl. Medan Merdeka Utara, No. 14) hingga tengah hari. Kemudian, sore hari pertemuan dilanjutkan di Gedung Indonesia Clubhuis Jl. Kramat Raya, No. 106 Jakarta (sekarang disebut Museum Sumpah Pemuda).
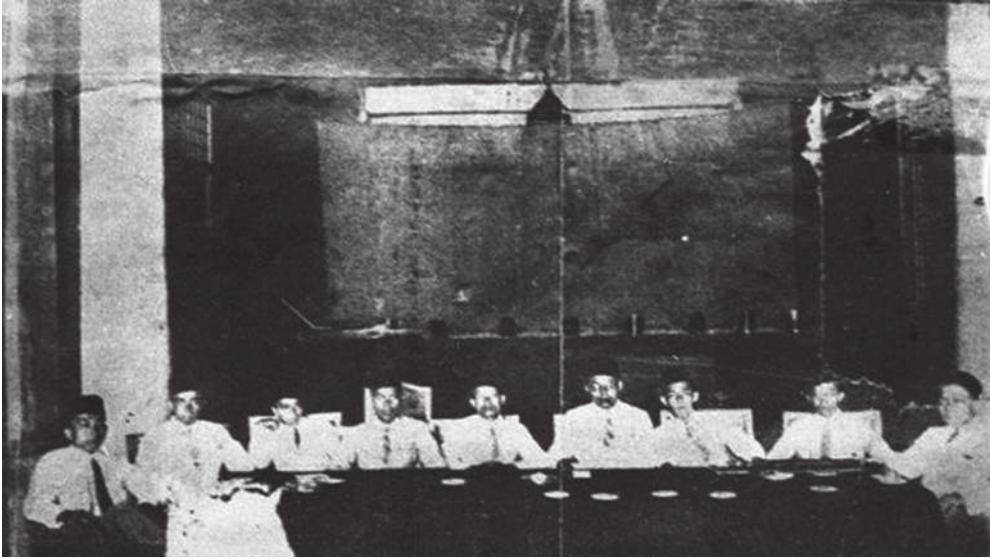
Gambar 4.5 Suasana sidang Kongres Pemuda II 27-28 Oktober 1928 hingga lahirlah Sumpah Pemuda
Sumber: Kompas/Dudi Sudibyo/www.padang.tribunnews.com (2020)

Kongres Pemuda II dihadiri kurang lebih 750 pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan. Pada kongres tersebut, Sugondo, sebagai ketua pelaksana kongres, berulang kali menegaskan pentingnya persatuan para pemuda untuk memperjuangkan Indonesia merdeka.

Kalian bisa membayangkan situasi dan atmosfirnya. Tentu tidaklah mudah menyatukan berbagai organisasi kepemudaan dalam satu visi, pandangan, dan arah gerak perjuangan menuju Indonesia merdeka. Mereka mesti saling menyesuaikan untuk mencari titik temu. Di sinilah sikap jiwa besar para pemuda dilatih dan diuji.

Selain isu pendidikan dan gerakan kepanduan, isu sentral Kongres Pemuda II adalah pentingnya membangun persatuan dan nasionalisme. Hingga akhirnya, atas kesamaan pandangan sebangsa, setanah air, senasib, dan sepenanggungan, para pemuda bermufakat mendeklarasikan Sumpah Pemuda sebagai komitmen perjuangan bersama.

SUMPAH PEMUDA

1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.
3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Naskah Sumpah Pemuda ditulis oleh Mohammad Yamin dan disetujui oleh Sugondo. Kemudian, dibacakan di hadapan para peserta kongres. Deklarasi Sumpah Pemuda disambut dengan pekik semangat para pemuda. Pada kesempatan itu pula, diperdengarkan pertama kali lagu kebangsaan Indonesia Raya karya WR. Supratman. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan hanya diiringi alunan biola, tetapi tetap syahdu.

Setelah Sumpah Pemuda dideklarasikan, kesadaran sebangsa setanah air yang harus bersatu melawan penjajah Belanda semakin menguat. Sumpah Pemuda merupakan penegasan semangat persatuan dan nasionalisme guna mewujudkan Indonesia merdeka. Sejak saat itu, perjuangan para pemuda dalam memperjuangan kemerdekaan Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat dan berskala nasional.

Terwujudnya persatuan bangsa Indonesia yang disimbolkan dengan Sumpah Pemuda merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Para pemuda ketika itu pun menyadari bahwa mewujudkan persatuan adalah bagian dari perintah agama. Spirit keagamaan ini semakin mendorong para pemuda untuk mewujudkan persatuan bangsa hingga lahirlah Sumpah Pemuda.
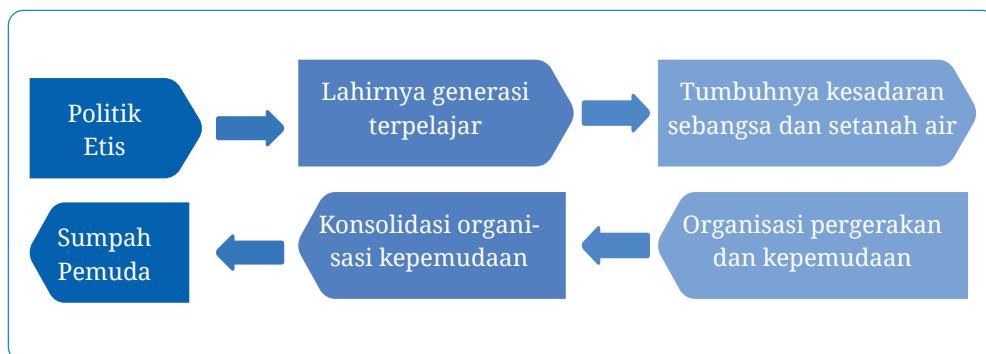
Siswa Aktif

Rancanglah simulasi pembelajaran bermain peran Sumpah Pemuda bersama ketua kelas kalian dengan bimbingan guru. Tentukanlah siapa yang berperan menjadi ketua kongres, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan tim pendukung lainnya. Siapkan teks skenarionya *(script writing)*.

Jika semua sudah siap, lakukan simulasi berlangsungnya Kongres Sumpah Pemuda II pada 27–28 Oktober 1928 silam. Perankan karakter tokoh masing-masing dengan penghayatan. Munculkan suasana atmosfirnya, ketegangannya, semangatnya, dan kebersamaannya, hingga pendeklarasian Sumpah Pemuda.

B. Nilai-Nilai Luhur dalam Sumpah Pemuda

Bagi kalian yang sudah disiplin membaca buku setiap hari, apa yang membuat kalian mau mengalokasikan waktu untuk membaca buku setiap hari? Apa sih dorongan yang mendorong kalian mengalahkan aktivitas lainnya dan memilih membaca buku? Pastilah itu karena nilai-nilai luhur yang sudah tertanam dalam diri kalian.

Dalam pandangan kalian, membaca itu perintah agama dan kebutuhan kalian sebagai pelajar. Nah pandangan ini meresap dan menjadi nilai dalam diri kalian. Karena sudah menjadi nilai, maka mampu memberikan semangat dari dalam diri untuk melakukan perbuatan atau aktivitas sesuai nilai tersebut. Karena itulah, kalian jadi disiplin dan terbiasa membaca buku setiap hari.

Nah coba kalian pikirkan dan bayangkan, rasanya tidak mungkin terwujud persatuan sampai lahir Sumpah Pemuda jika tidak dilandasi nilai-nilai luhur yang ada dalam diri setiap pemuda ketika itu. Tanpa adanya nilai-nilai luhur yang melandasi, maka kemungkinan yang akan terjadi ketika Kongres Pemuda II adalah sikap egoisme dan mementingkan organisasi masing-masing.

Nilai-nilai luhur tersebut bersumber dari nilai religiusitas. Agama mengajarkan untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Tuhan menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Sikap inilah yang muncul dalam momen Kongres Sumpah Pemuda II. Sehingga, bisa berjalan lancar dan tercapai tujuan Kongres.

Nah apa saja nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda? Inilah yang akan kita gali bersama. Setelah mengkajinya, harapannya kalian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

1. Nilai Persatuan

Ketika itu, para pemuda terhimpun dalam berbagai organisasi kepemudaan sesuai latar belakang daerah masing-masing. Ada Jong Java, Jong Sumateranen Bond, Jong Batak, Jong Islamieten Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Jong Minahasa. Jika diibaratkan, organisasi-organisasi kepemudaan itu seperti batang-batang lidi yang terserak. Tidak memiliki kekuatan dan mudah dipatahkan jika masih terpisah-pisah.

Hal inilah yang disadari oleh para pemuda ketika itu. Belajar dari perjuangan Bangsa Indonesia generasi sebelumnya yang bersifat kedaerahan, maka mudah dipatahkan oleh penjajah Belanda. Karena itulah, para pemuda menggagas perlunya persatuan pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Nilai persatuan inilah yang terus dikampanyekan dan ditanamkan kepada setiap pemuda. Meski berbeda agama, suku, bahasa, dan latar belakang organisasi, mereka bersepakat untuk mempersatukan diri sebagai pemuda Indonesia.

Nilai persatuan inilah yang mengikat dan membingkai pandangan para pemuda ketika itu. Hingga akhirnya Sumpah Pemuda pun dideklarasikan sebagai simbol persatuan para pemuda Indonesia. Mereka berhimpun dalam satu barisan perjuangan memerdekakan Indonesia dari penjajahan.

Bagaimana penerapan nilai persatuan dalam konteks sekarang? Kalian bisa mewujudkannya di lingkungan sekolah. Sekolah kalian pasti memiliki visi yang ingin dicapai. Nah visi ini mesti menjadi arah perjuangan semua elemen sekolah, termasuk siswa. Dalam hal ini, organisasi-organisasi siswa di sekolah mesti bersatu memajukan sekolah.

Jangan ada persaingan tidak sehat antar organisasi siswa di sekolah. Jangan pula ada sikap menganggap satu organisasi lebih penting dan berperan daripada organisasi lainnya. Misalnya, OSIS lebih penting dan keren daripada Pramuka atau Palang Merah Remaja (PMR). Sikap seperti ini bisa menimbulkan perpecahan di kalangan siswa. Akhirnya, siswa terpecah menjadi golongan-golongan yang saling unjuk gigi untuk menjatuhkan organisasi lainnya. Hal ini pastilah berdampak pada pencapaian visi sekolah.

Nah belajar dari para pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda, mari jadikan organisasi-organisasi siswa di sekolah bersatu dalam arah geraknya, yaitu bersama mencapai visi sekolah. Program kerja yang dicanangkan adalah program yang berorientasi pada pencapaian visi sekolah. Dengan demikian, meski berbeda organisasi, kalian bisa bersatu untuk mencapai tujuan bersama.

Gambar 4.6 Pengurus OSIS dan MPK melaksanakan rapat kerja bersama membahas program-program kerja selama setahun kepengurusan
Sumber: Radar Semarang/www.radarsemarang.jawapos.com (2017)

2. Rela Berkorban

Tidaklah mungkin ada diskusi-diskusi di kalangan para pemuda ketika itu tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia, tanpa adanya nilai rela berkorban yang tertanam dalam diri mereka. Mereka mengalami kegelisahan menyaksikan penderitaan rakyat Indonesia. Mereka terus berpikir apa yang bisa dilakukan untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan.

Gambar 4.7 Memberikan tempat duduk di dalam angkutan umum kepada ibu hamil adalah bentuk implementasi nilai rela berkorban.
Sumber: Screenshoot Instagram/www.tribunbatam.id (2018)

Karena itu, lahirlah berbagai organisasi kepemudaan yang memiliki cita-cita membebaskan Indonesia dari penjajahan. Pemikiran dan perjuangan nyata tersebut lahir karena adanya sikap rela berkorban. Mereka mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, dan materi yang dimiliki untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Mereka tidak hitung-hitungan dan berharap pengorbanan mereka dibayar dengan rupiah. Hingga Indonesia mer-

deka dan mulai membangun, para pemuda itu tidak menuntut apa-apa dari negeri ini. Inilah nilai rela berkorban yang ditampilkan para pemuda ketika itu.

Nah belajar dari para pemuda yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia, kalian bisa mengimplementasikan nilai rela berkorban mulai dari hal sederhana di lingkungan sekolah. Misalnya, melaksanakan tugas piket kebersihan kelas dengan tanggung jawab meski kalian harus pulang lebih akhir.

Selain itu, bentuk lainnya misalkan, saat kalian naik angkutan umum setelah pulang sekolah, lalu mendapati seorang ibu hamil tidak memperoleh tempat duduk. Maka, kalian bisa berdiri dan memberikan tempat duduk kalian. Ini merupakan implementasi dari nilai rela berkorban.

Kalian bayangkan, jika setiap warga Indonesia menerapkan nilai rela berkorban, maka akan terwujud harmoni dalam kehidupan. Harmoni ini akan dirasakan di level masyarakat maupun yang lebih luas cakupannya, level kabupaten/kota, provinsi, dan bahkan negara.

3. Cinta Tanah Air dan Bangsa

Cinta tanah air dan bangsa adalah nilai yang mendorong para pemuda bergerak memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak rela harkat dan martabat Bangsa Indonesia dicabik-cabik penjajah. Mereka marah mendapati kekayaan alam negeri ini dikeruk demi memuaskan keserakahan penjajah.

Nilai cinta terhadap tanah air dan bangsa membuat para pemuda ketika itu tidak hanya memikirkan daerahnya masing-masing. Namun, menyatukan pandangan mereka dalam bingkai Indonesia. Bukan hanya Jawa yang harus merdeka, namun semua wilayah di Indonesia mesti merdeka dari penjajahan. Nilai cinta tanah air dan bangsa membuat para pemuda tidak bisa tidur nyenyak sebelum menyaksikan Indonesia merdeka.

Dalam konteks sekarang, kalian bisa menerapkan nilai cinta tanah air dan bangsa dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Kalian bisa mengonsumsi buah-buahan lokal asli Indonesia. Misalnya, jeruk Medan, apel Malang, mangga Indramayu, melon Ngawi, dan lainnya. Dari sisi cita rasa, buah-buahan lokal sebetulnya tidak kalah dari buah-buahan impor.

Selain itu, ketika ada pihak-pihak luar yang mengancam kedaulatan batas wilayah Indonesia, seperti yang pernah diberitakan beberapa waktu lalu, kalian bisa berpartisipasi aktif menyuarakan kedaulatan Indonesia. Cara paling sederhana menulis status tentang pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia di media sosial yang kalian miliki. Ini juga merupakan bukti cinta tanah air dan bangsa.

Gambar 4.8 Mengonsumsi produk-produk lokal asli Indonesia merupakan bentuk sederhana dari cinta terhadap tanah air dan bangsa.
Sumber: Riau Pos/www.riaupos.jawapos.com (2020)

4. Semangat Persaudaraan

Para pemuda pencetus Sumpah Pemuda tidaklah memiliki hubungan persaudaraan secara nasab atau kekeluargaan. Namun, mereka terikat dalam semangat persaudaraan. Sehingga, tidak ada kecemburuan ketika yang menjadi ketua kongres adalah Sugondo yang berasal dari Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Karena, sejatinya Sugondo tidak mewakili PPPI, melainkan mewakili semua pemuda ketika itu.

Semangat persaudaraan pula yang menjadikan kongres pemuda II berjalan lancar. Andaikan bukan karena semangat persaudaraan, besar kemungkinan Kongres Pemuda II akan diwarnai ketegangan dan gesekan. Laiknya dalam sebuah keluarga yang bersaudara sedang bermusyawarah, demikianlah gambaran para pemuda yang menjalani kongres pemuda II.

Gambar 4.9 Sikap empati dan membantu teman merupakan bentuk perwujudan nilai semangat persaudaraan.
Sumber: Republika/Putra M. Akbar/https://www.republika.co.id (2018)

Dalam konteks sekarang, kalian bisa mewujudkan nilai semangat persaudaraan dengan teman-teman di sekolah kalian. Misalnya, bila ada teman yang kesulitan membayar uang kegiatan sekolah, kalian bersama teman sekelas bisa iuran untuk

membantunya. Bantuan kalian pasti sangat berarti bagi teman kalian. Ini menunjukkan nilai semangat persaudaraan.

Prinsip nilai semangat persaudaraan adalah munculnya rasa empati terhadap kesulitan yang dialami teman kalian. Kemudian, melakukan aksi untuk meringankan beban kesulitannya. Selain itu, nilai semangat persaudaraan juga bisa diwujudkan dengan semangat sukses bersama.

Bukan “paling” yang mesti dikedepankan, melainkan “saling”. Bukan siapa paling hebat, paling pintar, paling berjasa, melainkan semua saling membantu, saling mengisi, saling menopang dan mendorong maju. Sukses dan maju bersama itu jauh lebih indah dan bermakna dibandingkan kalian sukses dan maju sendirian.

5. Mengutamakan Kepentingan Bangsa

Kepentingan bangsa mesti didahulukan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengapa? Karena, kepentingan bangsa menyangkut kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Para pemuda peserta Kongres Pemuda II jelas menunjukkan sikap mengutamakan kepentingan bangsa. Mereka tidak memikirkan kepentingan organisasinya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Karenanya, dalam Kongres Pemuda II kita tidak menemukan adanya kepentingan-kepentingan terselubung organisasi-organisasi kepemudaan ketika itu. Semuanya bersepakat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Semuanya sepakat menyisihkan perbedaan latar belakang demi mengutamakan kepentingan bangsa, yaitu tercapainya kemerdekaan Indonesia.

Komitmen mengutamakan kepentingan bangsa terlihat dari kegigihan para pemuda untuk mewujudkan Kongres Pemuda II. Meski Kongres Pemuda I dua tahun sebelumnya belum membuahkan hasil, para pemuda ketika itu tidak menyerah. Karena, mereka menyadari bahwa pada dasarnya setiap pemuda pasti memikirkan dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan dan organsasinya.

Mereka berusaha menyatukan para pemuda dalam satu kepentingan bangsa. Bersatu padu berjuang mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Mereka menyadari perjuangan pemuda akan sampai pada titik temu jika tujuannya adalah kepentingan bangsa.

Nah dalam konteks sekarang, kalian bisa mewujudkan nilai kepentingan bangsa dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Misalnya, di lingkup desa. Desa dengan berbagai rukun warga adalah satuan pemerintahan terkecil yang memiliki program kerja. Program kerja desa sesungguhnya turunan dari program kerja satuan pemerintahan di atasnya.

Ketika kalian berpartisipasi dalam program-program pembangunan desa, itu artinya kalian berkontribusi bagi pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah salah satu kepentingan bangsa yang sangat penting untuk diperjuangkan bersama.

Contoh lain, pendidikan adalah program penting dalam pembangunan nasional. Program ini diturunkan sampai satuan pendidikan terkecil, yaitu sekolah. Nah ketika kalian berpartisipasi mengalokasikan waktu, tenaga, dan pikiran kalian untuk memajukan program-program sekolah, sesungguhnya kalian sudah berkontribusi mewujudkan kepentingan bangsa meningkatkan kualitas pendidikan.

Contoh nyata, sekolah kalian memiliki program sekolah adiwiyata dengan *brand* sekolah ramah hijau. Kalian bisa berpartisipasi dengan menanam satu pohon di halaman sekolah meski kalian harus menyisihkan uang jajan untuk membeli bibit tanaman tersebut.

Gambar 4.10 Mewujudkan sekolah Adiwiyata merupakan bentuk perwujudan nilai mengutamakan kepentingan bangsa dengan memajukan pendidikan.
Sumber: Kemenag Gorontalo/https://gorontalo.kemenag.go.id (2018)

6. Menerima dan Menghargai Perbedaan

Sebagaimana umumnya dalam sebuah kongres, pada Kongres Pemuda II pun terjadi perbedaan pendapat dan pandangan dari setiap organisasi kepemudaan. Namun, perbedaan itu tidak menjadikan mereka berpecah. Mengapa? Karena, nilai menerima dan menghargai perbedaan tertanam pada

diri para pemuda ketika itu. Perbedaan itu biasa, namun semua bersepakat untuk saling menghargai. Dari sinilah terbangun persatuan hingga melahirkan Sumpah Pemuda.

Perbedaan tidak mungkin dihilangkan karena itu suatu keniscayaan. Maka, poin pentingnya adalah bagaimana kita mampu mengelola perbedaan itu dengan saling menghargai. Kemudian, mengoptimalkan perbedaan itu menjadi modal untuk saling mengisi kekurangan masing-masing. Bukankah irama yang indah terwujud karena adanya perbedaan nada? Bukankah pelangi menjadi indah karena adanya perpaduan berbagai warna? Demikianlah cara kita memandang dan mengelola perbedaan.

Nah kalian juga harus mampu menerapkan nilai menerima dan menghargai perbedaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Warna kulit kalian dengan teman-teman mungkin berbeda, bahasa daerah, tingkat ekonomi, suku, dan agama juga mungkin berbeda-beda. Nah kalian mesti saling menghormati dan menghargai.

Tingkat dan jenis kecerdasan kalian juga mungkin berbeda. Namun, kalian harus menyadari kecerdasan itu bermacam-macam. Boleh jadi teman kalian kurang cerdas dalam bidang eksakta, tetapi dia pasti memiliki kecerdasan bidang lainnya, misalnya linguistik.

Karenanya, dalam rapat-rapat OSIS, Pramuka, MPK, atau organisasi sekolah lainnya, perbedaan pandangan itu biasa, kalian mesti mencari titik temunya. Sikap terbaik adalah saling menghargai dan mengoptimalkan perbedaan itu untuk saling mengisi dan membangun sekolah bersama-sama.

Gambar 4.11 Perbedaan pandangan dan pendapat dalam organisasi adalah hal biasa. Sikap terbaik adalah saling menghargai keragaman menuju persatuan.
Sumber: SMK 45/www.smk45.sch.id (2019)

7. Semangat Gotong-Royong dan Kerja Sama

Para pemuda peserta Kongres Pemuda II menyadari bahwa kongres tidak akan berhasil mencapai tujuan jika tidak ada semangat gotong-royong dan kerja sama. Bukanlah hal mudah untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda II yang dihadiri sekitar 750 pemuda. Butuh persiapan dan pengelolaan detail yang baik.

Karena itu, para pemuda saling mengisi dan membantu. Mereka bergotong-royong dan bekerja sama dalam harmoni. Ibarat sebuah pohon, ada yang mengambil peran sebagai akar, batang, ranting, daun, yang akhirnya bisa berbuah lebat. Tidak ada perasaan paling berjasa di antara mereka. Semuanya berjasa. Karena, jika ada bagian kecil organisasi yang tidak bekerja, maka pastilah secara keseluruhan organisasi akan terganggu.

Dalam konteks sekarang, kalian bisa menerapkan nilai semangat gotong-royong dan kerja sama di lingkungan sekolah. Sebuah tugas atau pekerjaan akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Misalnya, dalam sebuah kegiatan sekolah telah ditunjuk dan dibentuk panitia. Maka, bagilah peran masing-masing setiap divisi dan tentukan ruang lingkup tanggung jawabnya.

Berdasarkan ruang lingkup dan tanggung jawab itulah, setiap divisi atau bagian menjalankan tugasnya masing-masing dalam bingkai sinergi. Bukan bekerja masing-masing tanpa ada kerja sama. Pembagian divisi atau bagian agar jelas siapa mengerjakan apa. Namun, dalam rangka siapa mengerjakan apa tersebut, dilakukan dalam bingkai dan semangat gotong-royong dan kerja sama.

Gambar 4.12 Nilai gotong-royong dan kerja sama bisa diwujudkan dengan bersinergi dalam melaksanakan kegiatan sekolah
Sumber: Kemenag Kalsel/www.kalsel.kemenag.go.id (2018)
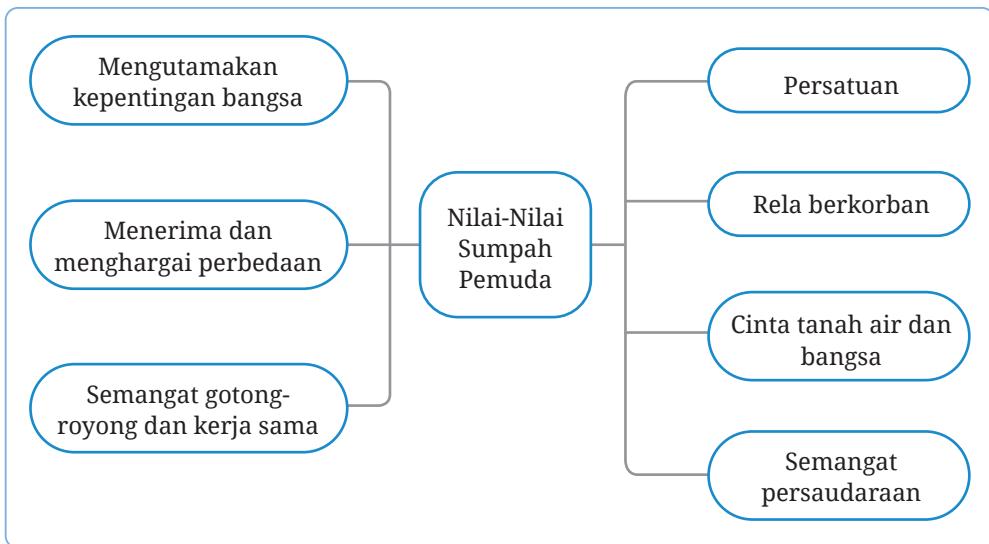
Siswa Aktif

1. Sebuah desa mengalami kekeringan. Sumur-sumur mereka kering. Hanya ada satu sumber mata air yang masih mengalir. Namun, letaknya cukup jauh di kaki pegunungan. Terbentang jarak sekitar 4 kilometer dari pemukiman warga.

   Bila kalian menjadi kepala desa tersebut, bagaimana cara kalian mengalirkan air dari mata air tersebut ke pemukiman warga?

2. Sebuah komplek perumahan di kota mengalami masalah saluran drainase yang tidak berfungsi baik, sehingga setiap kali hujan deras, komplek tersebut kebanjiran.

   Bila kalian menjadi ketua RW komplek tersebut, bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

C. Sumpah Pemuda dan Kontribusi di Era Reformasi

Pernahkah kalian melihat pohon yang tidak berbuah? Ada pohon tinggi menjulang, namun tidak menghasilkan buah. Tentu saja kebermanfaatannya kurang bisa dirasakan. Ini sebuah ilustrasi bagi kalian, jangan sampai kalian menjulang tinggi ilmunya, tetapi kurang memberikan kebermanfaatan bagi oranglain dan lingkungan.

Spirit Sumpah Pemuda adalah spirit kontribusi. Sebagai bagian dari generasi muda, pernahkah kalian berpikir tentang kontribusi apa yang bisa dilakukan di era reformasi ini? Sejarah perjalanan bangsa ini selalu lekat dengan peran dan kontribusi pemuda.

Pemuda adalah kunci kemajuan sebuah bangsa. Dari sejarah perjalanan bangsa ini, kita bisa belajar bahwa perubahan sosial, bahkan negara selalu dipelopori oleh para pemuda. Selain Sumpah Pemuda, kita juga menyaksikan perjuangan dramatis para pemuda dalam mengarsiteki proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Drama "penculikan" Bung Karno dan Bung Hatta adalah strategi Sukarni, Chaerul Saleh, dan para pemuda lainnya untuk memanfaatkan momentum kekalahan Jepang dari Sekutu dalam perang dunia II. Para pemuda ketika itu berpikir cepat dan revolusioner. Akhirnya, kita sama-sama menyaksikan peristiwa bersejarah kedua setelah Sumpah Pemuda, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Gambar 4.13 Kualitas pemuda adalah kunci kemajuan bangsa
Sumber: mbsnews/Yusuf Setiadi/www.mbsnews.id (2020)

Tahun 1966 pada penghujung masa orde lama, para pemuda pula yang memelopori perubahan bangsa dan negara dengan unjuk rasa menyuarakan Tritura (tiga tuntutan rakyat). Tritura yang digerakkan oleh pemuda menjadi langkah awal perubahan bangsa dan negara menuju era orde baru.

Kemudian, pada Mei 1998, para pemuda kembali menjalankan perannya sebagai *agent of change* (aktor perubahan). Kali ini orde baru mesti tumbang setelah Indonesia terjerembab ke jurang krisis ekonomi. Lahirlah era reformasi yang menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia hingga saat ini.

Maka, pertanyaan yang perlu kalian pikirkan adalah bagaimana merekonstruksi semangat Sumpah Pemuda di era reformasi? Tujuannya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Seperti kalian ketahui, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan dari bangsa ini. Di sinilah ruang tanggung jawab dan kontribusi kalian sebagai pemuda. Para pemuda masa kini harus kembali menjalankan peran dan tanggung jawabnya, sebagaimana para pemuda angkatan 1928. Beberapa masalah bangsa di era reformasi yang perlu kalian pikirkan rencana kontribusinya adalah sebagai berikut:

Pertama, pendidikan masih menjadi masalah bagi bangsa ini. Belum semua anak Indonesia bisa mengakses pendidikan. Masih banyak anak Indonesia yang tidak bisa sekolah atau mengenyam pendidikan. Belum lagi disparitas kualitas pendidikan di berbagai daerah juga masih menganga lebar.

Kedua, kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini yang terus menghantui. Tingkat kesejahteraan akan berdampak pada tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga. Pendidikan yang rendah akan menyebabkan kesulitan memperoleh kesejahteraan dan kesehatan yang laik. Pendidikan dan kesejahteraan ibarat dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Ketiga, kedaulatan pangan belum bisa terwujud, padahal Indonesia adalah negeri agraris dan maritim. Kalian bisa bayangkan Indonesia adalah negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Harusnya Indonesia menjadi negara maritim yang kuat. Indonesia juga memiliki jutaan hektar lahan dan hutan. Ini merupakan potensi sangat besar bagi Indonesia untuk mencapai kedaulatan pangan.

Lantas, apa yang bisa kalian lakukan? Rancanglah rencana kontribusi unggulan kalian. Saat ini kalian memang masih berada di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama, tetapi pemikiran dan imajinasi kalian bisa menembus sekat ruang dan waktu. Kalian bisa melakukan *jumping* (lompatan) pemikiran sampai dua puluh tahun yang akan datang.

Nah tetapkanlah target kontribusi kalian dua puluh tahun yang akan datang bagi bangsa dan negara Indonesia. Lalu, tarik mundur sampai posisi kalian saat ini. Dari situ rancanglah peta jalannya untuk menuju target kontribusi yang sudah kalian tetapkan itu. Pasti kalian akan mendapati hari-hari yang menggairahkan untuk dijalani dan diperjuangkan.

Sebagai gambaran kontribusi bagi bangsa, dua pelajar bernama Ahmad Faisal dan Wildani Fadhillah melakukan penelitian *Biticel-dy (Biodegradable Plastic Cellulosa Diapers): Aplikasi Limbah Popok Bayi Berbasis Selulosa Asetat*

Sebagai Inovasi Plastik Biodegradable. Penelitian mereka berhasil meraih medali perak pada ajang Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI) 2020 yang diselenggarakan Kemendikbud.

Penelitian dua pelajar ini bisa menjadi solusi permasalahan limbah popok bayi. Kalian bisa menyimak video penelitian mereka pada tautan berikut ini.

Video penelitian Limbah Popok Bayi Berbasis Selulosa Asetat Sebagai Inovasi Plastik Biodegradable
https://www.youtube.com/watch?v=uuRXSg81Fkk
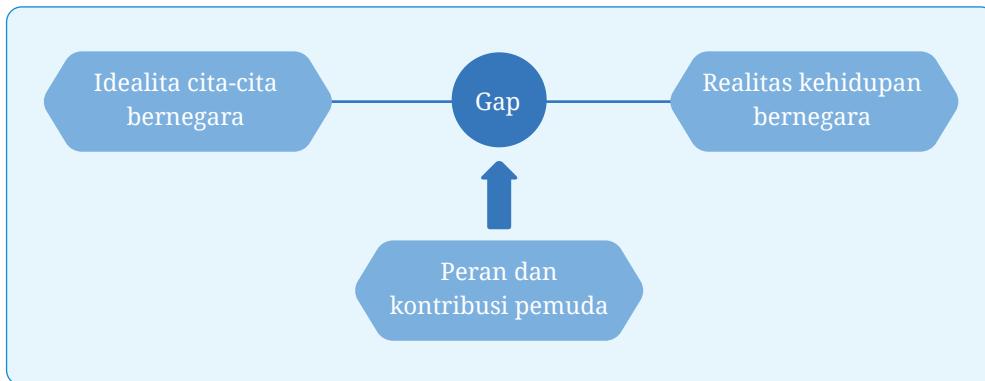
Siswa Aktif

Berpikirlah mendalam, tetapkan target kontribusi terbaik kalian dua puluh tahun yang akan datang bagi bangsa dan negara Indonesia. Lalu, tarik mundur sampai posisi kalian saat ini. Rancanglah peta jalannya. Tuangkan dalam bentuk *mind mapping* (peta pikiran).

Kemudian, presentasikan di depan kelas secara bergantian. Setiap kali teman kalian selesai mempresentasikan, sematkan doa untuk kesuksesannya dan berikan apresiasi.

Perhatikanlah contoh berikut ini.
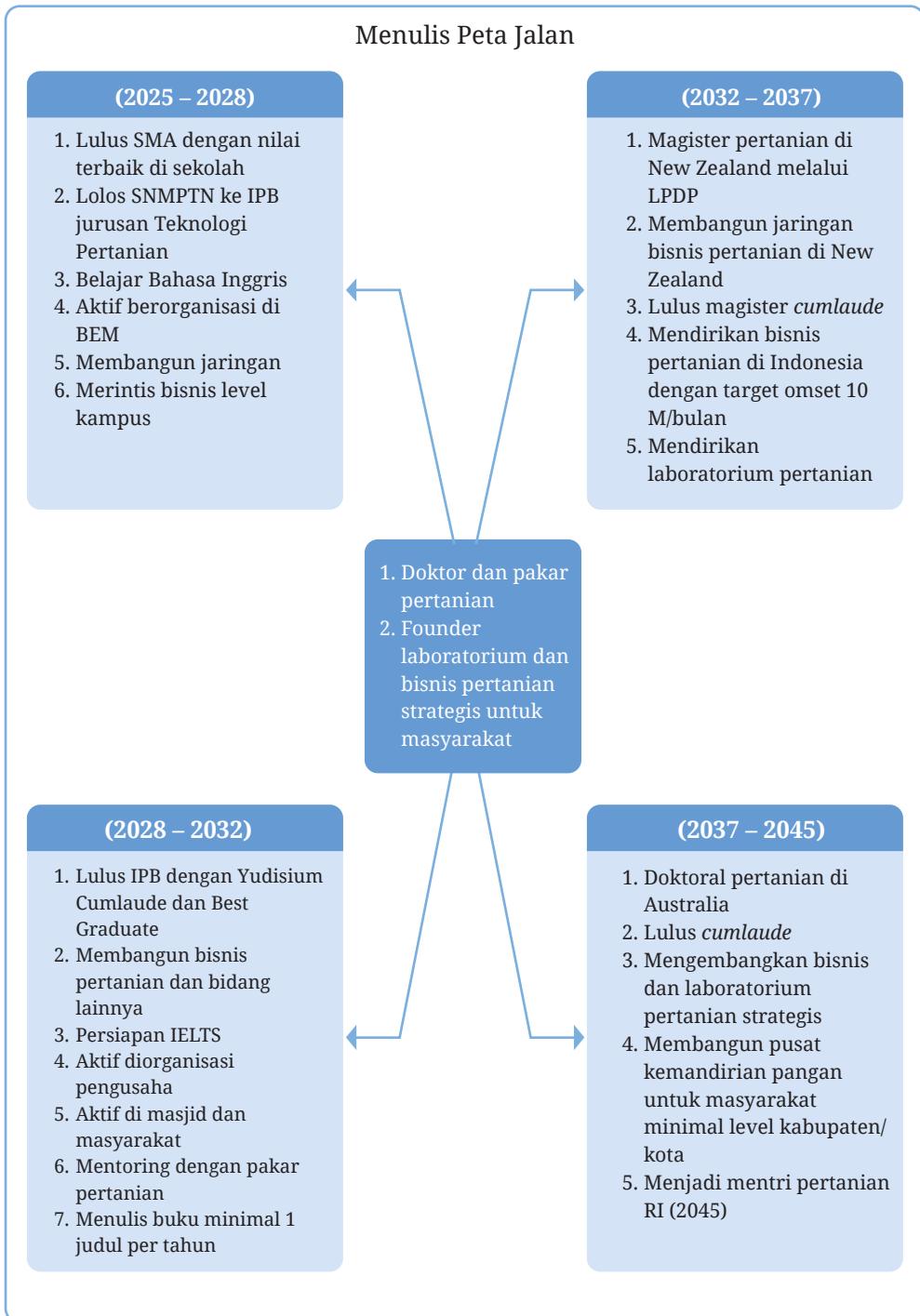
Ringkasan Materi

1. Kebangkitan nasional diawali dengan lahirnya kebijakan politik etis dari penjajah Belanda yang melahirkan generasi terpelajar yang menyerukan semangat persatuan dan nasionalisme.

2. Semangat persatuan dan nasionalisme melahirkan berbagai organisasi pergerakan dan kepemudaan yang puncaknya lahirlah Sumpah Pemuda.

3. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sumpah pemuda adalah nilai persatuan, rela berkorban, cinta terhadap tanah air dan bangsa, semangat persaudaraan, mengutamakan kepentingan bangsa, menerima dan menghargai perbedaan, semangat gorong-royong dan kerja sama.

4. Pemuda adalah agen perubahan dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Setidaknya, pada peristiwa Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan, transisi dari orde lama ke orde baru, dan dari orde baru ke orde reformasi.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi kebangkitan nasional dan sumpah pemuda, cobalah kalian identifikasi perilakumu sehari-hari di sekolah dan di masyarakat. Tulislah perilakumu yang mencerminkan aspek-aspek di bawah ini!

No	Aspek	Perilaku
1.	Nilai persatuan	1. 2. 3

2.	Nilai rela berkorban	1. 2. 3
3.	Nilai cinta terhadap tanah air dan bangsa	1. 2. 3
4.	Nilai semangat persaudaraan	1. 2. 3
5.	Nilai mengutamakan kepentingan bangsa	1. 2. 3
6.	Nilai menerima dan menghargai perbedaan	1. 2. 3
7.	Nilai rela berkorban	1. 2. 3

Tautan Pengayaan

Kebangkitan nasional merupakan momentum bagi Bangsa Indonesia untuk menggalang persatuan guna merebut kemerdekaan dari penjajah kolonial Belanda. Nah supaya semakin merasakan semangat kebangkitan nasional, kalian simak tautan video berikut ini.

Pembelajaran PPKn Kelas VIII "Semangat Kebangkitan Nasional 1908" (Millenial Citizenship)
https://www.youtube.com/watch?v=oeGNV3mwrtk

Uji Kompetensi

Cermatilah peristiwa-peristiwa di bawah ini. Lalu, tuliskan pendapatmu untuk menjawab persoalan yang diajukan.

1. Pada sebuah sekolah terdapat organisasi siswa OSIS, MPK, PMR, dan Pramuka. Suatu hari, organisasi-organisasi sekolah mengadakan rapat kerja bersama. Setiap organisasi menyampaikan program kerjanya masing-masing. Ternyata didapati tumpang tindih program kerja antara organisasi-organisasi tersebut. Namun, setiap organisasi bersikukuh tidak mau mengurangi, apalagi menghilangkan program kerjanya. Rapat kerja pun *deadlock* (terkunci).

   Bila kalian dimintai pendapat, bagaimana pendapat kalian sebagai solusi dan titik temu dari persoalan di atas?

2. Ketua RW mengadakan program pengaspalan jalan warga atas bantuan pencairan dana desa. Pengaspalan meliputi lima RT. Semua warga perwakilan RT datang bergotong-royong dan bekerja sama membersihkan jalanan yang akan diaspal. Hanya, ada satu RT yang tidak ada perwakilan warganya. Usai pengaspalan selesai, ketua RT yang tidak mengirimkan perwakilan warganya tersebut, menyampaikan protes karena pengaspalan di wilayah RT-nya kurang rapi, tidak seperti RT-RT lainnya.

   Jika kalian menjadi Ketua RW, bagaimana cara kalian menyelesaikan persoalan di atas?

3. Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia di bawah Kanada. Panjangnya mencapai 99.093 kilometer. Namun, faktanya Indonesia masih menjadi negara pengimpor garam.

   Menurut analisis kalian, apa faktor yang menyebabkan Indonesia masih menjadi negara pengimpor garam? Sebagai generasi muda, apa pemikiran yang kalian tawarkan untuk mengatasi gap antara produksi dan kebutuhan konsumsi garam?

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2021
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Untuk SMP Kelas VIII
Penulis : Muhammad Sapei, Trezadigjaya, Prayogo
ISBN : 978-602-244-448-0

Bab V
Jati Diri Bangsa dan Budaya Nasional

Tujuan Pembelajaran:

1. Peserta didik mampu menunjukkan sikap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia.
2. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku berpartisipasi dalam upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan nasional.
3. Peserta didik mampu menunjukkan sikap menghayati budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa.
4. Peserta didik mampu menunjukkan sikap bangga terhadap budaya nasional dalam kancah global.

Peta Konsep
Jati Diri Bangsa dan Budaya Nasional
Budaya Nasional sebagai Identitas dan Jati Diri Bangsa
Pelestarian dan Pemajuan Budaya Nasional
Budaya Nasional sebagai Alat Pemersatu Bangsa
Tantangan Budaya Nasional di Era Globalisasi

Gambar 5.1 Solidaritas warga mengatasi dampak pandemi
Sumber: Kompas/Garry Lotulung/www.kompas.com (2020)

Pandemi Menguatkan Solidaritas Sosial

Sejak melanda Indonesia pada Maret 2020, pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan pada kehidupan masyarakat, terutama kesehatan. Ketika gelombang kedua Covid-19 terjadi, banyak warga masyarakat yang terinfeksi virus corona. Akses terhadap layanan kesehatan menjadi kebutuhan mendesak.

Menghadapi situasi sulit dan kritis tersebut, masyarakat bahu-membahu menanggulangi warga yang terdampak pandemi. Warga melakukan iuran membeli ambulans secara swadaya untuk membawa warga yang terpapar virus corona. Ada yang melakukan koordinasi dengan berbagai rumah sakit untuk memberikan informasi ketersediaan ruang rawat. Ada pula yang menyiapkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan warga yang melakukan isolasi mandiri.

Selain bidang kesehatan, pandemi juga berdampak terhadap ekonomi. Sebagian warga masyarakat ada yang dirumahkan, bahkan ada pula yang harus kehilangan pekerjaan karena mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menyikapi realitas tersebut, warga kembali menunjukkan solidaritas sosialnya. Mereka menggalang dana untuk melakukan bakti sosial berupa membagikan sembako gratis secara berkala kepada warga yang terdampak pandemi secara ekonomi.

Tahukah kalian, itulah jati diri bangsa Indonesia. Sejak dahulu, bangsa ini memiliki semangat solidaritas sosial yang kuat. Bangsa Indonesia senantiasa empati dan peduli melihat saudaranya mengalami kesusahan. Pada masa pandemi, jati diri bangsa ini semakin mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagaimana bentuk aktivitas warga yang menunjukkan solidaritas sosialnya terhadap sesama yang terdampak pandemi, kalian bisa saksikan video berikut ini.

Pembatasan sosial harus bergeser ke solidaritas sosial (Jabar *Digital Service*)
https://www.youtube.com/watch?v=KNFv4IulfIA

Siswa Aktif

Setelah kalian membaca apersepsi (pemantik pelajaran) dan menonton video pembatasan sosial harus bergeser ke solidaritas sosial, buatlah film pendek dengan durasi antara 2–3 menit menggunakan kamera gawai. Film yang dibuat menunjukkan jati diri dan budaya Bangsa Indonesia, seperti kesederhanaan, kesantunan, kegigihan, kesetiakawanan sosial, dan kejujuran.

Gunakan aplikasi *KineMaster* untuk *editing* video. Aplikasi *KineMaster* bisa diunduh di-*Playstore* atau *Appstore*. Kemudian, unggah ke akun media sosial kalian sebagai bentuk mempromosikan budaya Bangsa Indonesia. Bila tidak memungkinkan, buatlah dalam bentuk reportase. Kemudian, tempelkan pada mading sekolah.

Pada pembahasan sebelumnya, kalian sudah mempelajari kebangkitan nasional dan sumpah pemuda. Semoga kalian sudah memahami latar belakang lahirnya kebangkitan nasional dan sumpah pemuda ya. Namun, yang lebih penting lagi adalah kalian mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sumpah pemuda dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk perwujudan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Salah satu nilai luhur dalam sumpah pemuda adalah nilai persatuan. Kalian harus mampu berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Nah salah satu cara untuk menjaga persatuan bangsa adalah dengan melestarikan budaya nasional. Selain sebagai jati diri bangsa, budaya nasional bisa menjadi alat pemersatu bangsa.

Nah pertanyaannya apakah kalian masih mengenal ragam budaya nasional? Untuk bisa melestarikan budaya nasional, tentu saja kalian harus mengenal ragam budaya nasional terlebih dahulu. Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kekayaan budaya masing-masing. Ragam kekayaan budaya suku bangsa ini membentuk menjadi satu kekayaan budaya nasional sebagai jati diri bangsa Indonesia.

A. Budaya Nasional sebagai Identitas dan Jati Diri Bangsa

Bila kalian pergi ke negara-negara di Eropa, Australia, atau Amerika, maka kalian akan mendapati karakteristik budaya yang berbeda dengan Bangsa Indonesia, baik dari budaya berpakaian, berperilaku, makanan, gaya hidup, bahasa maupun kesenian. Mengapa bisa berbeda? Karena, adanya perbedaan nilai-nilai yang mendasari kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Barat.

Kebudayaan merupakan refleksi dari nilai-nilai yang dianut oleh sebuah komunitas atau masyarakat, baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional. Sejak dahulu Bangsa Indonesia adalah bangsa religius. Nilai-nilai religio ini kemudian terkristalisasi menjadi Pancasila. Pancasila menjadi falsafah hidup Bangsa Indonesia.

Gambar 5.2 Kebudayaan merupakan refleksi dari nilai-nilai yang dianut oleh sebuah masyarakat
Sumber: reportersatu/www.reportersatu.com (2020)

Karena itu, ragam kebudayaan yang lahir dari Bangsa Indonesia adalah kebudayaan yang berkarakteristik religius. Kebudayaan yang dilandasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, kebudayaan yang kental dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai kesopanan sebagai pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sebagai contoh, dalam masyarakat Minangkabau, terdapat seni pertunjukan tradisional bernama Randai yang sarat akan falsafah, etika, dan pelajaran hidup orang Minang. Dalam masyarakat Serang-Banten, terdapat seni pertunjukan Terebang Gede yang sarat nilai-nilai spiritualitas dan sosial. Dalam masyarakat Karangasem-Bali, terdapat tradisi Megibung yang sarat nilai-nilai kebersamaan. Dalam masyarakat Dayak di Kalimantan, terdapat tradisi *nataki* yang mengajarkan kearifan dalam mengolah sumber daya alam. Budaya-budaya di atas lahir dari nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Gambar 5.3 Seni pertunjukan Randai asli Minangkabau yang menggabungkan seni drama, tari, musik, dan teater.
Sumber: minang nantigo/www.seringjalan.com (2016)

Inilah yang membedakan kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan bangsa-bangsa lain. Kebudayaan Indonesia atau kebudayaan nasional yang terbentuk dari nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia inilah yang membentuk identitas dan jati diri Bangsa Indonesia.

Jadi, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat Indonesia membentuk kebudayaan lokal yang kemudian mengkristal menjadi kebudayaan nasional. Kemudian, pada akhirnya membentuk identitas dan jati diri bangsa.

Karena itu, sebagai generasi muda bangsa ini, kalian harus menunjukkan sikap syukur karena masyarakat Indonesia memiliki kebudayaan yang dilandasi nilai-nilai luhur. Maka, kalian harus mampu menerjemahkan nilai-nilai religi dan sosial yang terkandung dalam budaya masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
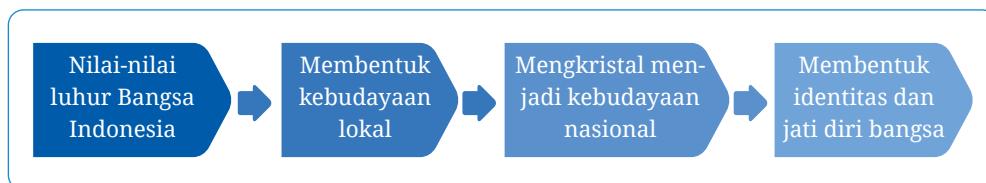
Siswa Aktif

Kalian pasti tahu batik 'kan?! Batik telah menjadi salah satu budaya nasional. Bahkan, batik diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia asli Indonesia pada 2 Oktober 2009. Wah hebat ya. Nah tahukah kalian bahwa motif dan corak batik di Indonesia berbeda-beda. Ada batik Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Papua, dan daerah lainnya.

Melakukan penelusuran informasi tentang ragam batik nusantara. Pilihlah satu jenis motif batik dan jelaskan makna dibalik motif batik tersebut. Buatlah dalam bentuk poster dan tempel di majalah dinding sekolah kalian. Lengkapi dengan gambar motif batiknya ya.

Perhatikan contoh berikut ini!

Batik motif *Wahyu Tumurun Latar Pethak Gagrak Ngayogyakarta.* Batik motif ini sudah ada sejak masa Penembahan Senopati, lalu disempurnakan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan dikukuhkan oleh Sultan Hamengkubuwono I.

Makna dibalik motif batik wahyu tumurun adalah sebagai berikut:

1. *Elar*: Sayap malaikat.
2. *Sawang*: Ayam jago, simbol waktu fajar.
3. *Ketopong*: Mahkota terbang, simbol kemuliaan.
4. *Lung-lungan*: Cabang-cabang tumbuhan, simbol tolong menolong dalam kebaikan.
5. *Kusuma* (bunga) dan buah sawo kecik, simbol perbuatan baik akan harum seperti bunga.
6. *Isen-isen*: Susunan batu granit yang keras, simbol jangan sampai kita memiliki hati keras yang susah menerima nasihat.

B. Pelestarian dan Pemajuan Budaya Nasional

Apakah kalian memiliki barang yang bagi kalian sangat berharga? Bisa jadi karena ada pengalaman bermakna terkait barang tersebut atau karena pemberian dari orang yang kalian cintai. Kalian menyimpan barang itu dengan baik. Jangan sampai rusak atau hilang. Karena, jika sampai rusak, apalagi hilang, maka hilang pula pengalaman berkesan dan maknanya.

Misalnya, seorang anak perempuan yang diberikan hadiah kalung indah oleh ibunya. Pastilah ia akan menjaganya dengan baik. Bukan hanya karena kalung benda berharga, namun makna yang terkandung dalam pemberian itu jauh lebih berharga. Inilah yang membuat dia terus menjaganya.

Demikian pula dengan warisan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan kristalisasi dari kebudayaan-kebudayan lokal. Kebudayaan lokal merupakan warisan kearifan nenek moyang kita. Banyak nilai luhur yang terkandung dalam kebudayaan lokal. Karenanya, sudah semestinya kita menjaga dan melestarikannya agar tidak punah, bahkan memajukannya agar terus berkembang.

Bila kita lakukan survei terhadap generasi muda bangsa ini terkait pengenalan mereka terhadap budaya lokal asal daerahnya, barangkali banyak yang tidak bisa menjawab dengan baik. Jika mengenal saja tidak, bagaimana bisa melestarikan dan memajukan. Agar muncul rasa tanggung jawab untuk melestarikan dan memajukan budaya nasional, tentulah harus terlebih dahulu mengenalinya secara utuh.

Gambar 5.4 Seni pertunjukan Gambang Semarangan gencar dipentaskan untuk menjaganya agar tidak punah.
Sumber: ein institute/www.ein-institute.org (2017)

Saat ini, banyak budaya nasional yang terancam punah karena kehilangan generasi yang mau melestarikannya. Sebagai contoh, seni pertunjukan Gambang Semarang sebagai identitas budaya Semarang, yang mencakup seni musik, vokal, tari, dan lawak. Seni pertunjukan ini gencar disosialisasikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan oleh Pemerintah Daerah Semarang untuk menjaga kelestariannya. Sementara, Tembang Dolanan yang merupakan satu di antara budaya Semarangan boleh dikatakan telah punah.

Fenomena semakin pudarnya budaya kesenian lokal tidak hanya terjadi di Semarang, tetapi diberbagai daerah di Indonesia. Generasi muda masa kini lebih memilih dan menyukai kesenian musik modern, seperti *drumband,* gitar, biola, dan lainnya. Bahkan, di sekolah-sekolah perkotaan banyak didapati kegiatan ekstrakurikuler *drumband*. Sementara, kegiatan ekstrakurikuler kesenian musik atau tari tradisional jarang ada dan kalaupun ada, sepi peminatnya.

Melestarikan dan memajukan kebudayaan nasional sejatinya amanah konstitusi negeri ini. Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan:

> *Ayat 1; Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.*
>
> *Ayat 2; Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.*

Sebagai penerjemahan dari amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dengan adanya undang-undang ini, maka upaya yang mesti dilakukan oleh Bangsa Indonesia bukan sekadar pelestarian budaya, melainkan pelestarian dan pemajuan budaya.

Jika pelestarian lebih bermakna merawat dan mempertahankan, pemajuan bermakna melakukan upaya-upaya agar budaya nasional terus berkembang. Sehingga, keragaman budaya yang kita miliki berdampak pada meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia, memandu pembentukan karakter bangsa, serta mempengaruhi perkembangan peradaban dunia.

Gambar 5.5 Sejumlah anak belajar angklung sebagai bentuk melestarikan budaya nasional.
Sumber: daerah kita/www.daerahkita.com (2016)

Pokok-pokok pikiran pelestarian dan pemajuan kebudayan nasional sekurang-kurangnya tertuang dalam pasal 1, 4, dan 5. Pasal 1 menyebutkan tentang pengertian kebudayaan, kebudayaan nasional, dan pemajuan kebudayaan.

Ayat 1; Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.

Ayat 2; Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.

Ayat 3; Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Sementara, pasal 4 menyebutkan tentang tujuan pemajuan kebudayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
2. Memperkaya keberagaman budaya;
3. Memperteguh jati diri bangsa;
4. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
6. Meningkatkan citra bangsa;

7. Mewujudkan masyarakat madani;
8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
9. Melestarikan warisan budaya bangsa; dan
10. Mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Selanjutnya, pasal 5 menyebutkan objek pemajuan kebudayaan meliputi:

1. Tradisi lisan;
2. Manuskrip;
3. Adat istiadat;
4. Ritus;
5. Pengetahuan tradisional;
6. Teknologi tradisional;
7. Seni;
8. Bahasa;
9. Permainan rakyat; dan
10. Olahraga tradisional.

Undang-undang ini lahir sebagai pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina objek-objek pemajuan kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia.

Meskipun demikian, tentu saja tidaklah bijak bila kita menyerahkan sepenuhnya upaya pelestarian dan pemajuan budaya nasional kepada pemerintah. Sebagai warga negara yang mewarisi ragam budaya nasional tersebut, maka kita sebagai masyarakat juga dituntut berperan serta. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam melestarikan dan memajukan budaya nasional adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran dan Penerapan Budaya Nasional

Mempelajari ragam budaya nasional merupakan langkah awal untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya nasional. Karena itu, kalian bisa mulai dengan mempelajari budaya lokal daerah kalian masing-masing. Budaya nasional terbentuk dari serangkaian budaya lokal yang tersebar di nusantara.

Cobalah kalian amati, kenali, dan praktikkan budaya lokal daerah kalian. Kalian pelajari, hayati, dan terapkan nilai-nilai luhur di balik budaya lokal tersebut. Misalnya, budaya Leuit dalam masyarakat Sunda.

Leuit artinya lumbung padi. Leuit merupakan budaya dalam masyarakat sunda. Pada masa dahulu, setelah panen padi, maka setiap warga yang

memiliki sawah menyetorkan sebagian padi hasil panennya dan dikumpulkan di Leuit secara sukarela.

Saat musim paceklik tiba, maka padi yang tersimpan di Leuit akan dibagikan kepada warga desa. Sehingga, tidak ada warga desa yang kelaparan. Keberadaan Leuit menjamin kebutuhan pangan warga. Dalam budaya Leuit, terdapat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, di antaranya kesetiakawanan sosial, solidaritas, dan kebersamaan.

Karena itu, sebagai bentuk melestarikan budaya nasional, buatlah kelompok dan lakukan aktivitas berikut ini bersama kelompok kalian:

1. Temukan tiga budaya lokal daerah kalian masing-masing
2. Temukan juga tiga budaya lokal dari luar daerah kalian
3. Tuangkan dalam bentuk esai pendek dan lengkapi dengan gambar
4. Presentasikan di depan kelas

Gambar 5.6 Sampek merupakan alat musik tradisional Suku Dayak atau masyarakat Kayaan.
Sumber: indozone/www.indozone.id (2015)

Gambar 5.7 Cungklik, alat musik khas Nusa Tenggara Barat.
Sumber: pustakabudaya/www.pustakabudaya.id (2020)

2. Sosialisasi dan Promosi Kebudayaan Nasional

Sosialisasi dan promosi kebudayaan menjadi upaya penting untuk menjaga kelestarian dan kemajuan budaya nasional. Kegiatan ini bisa dilakukan dalam skala lokal, regional, maupun nasional. Pada lingkup sekolah pun sangat memungkinkan diselenggarakan semacam festival kebudayaan. Bahkan, pada lingkup kelas sekalipun. Misalnya, festival kuliner nusantara.

Kalian bisa membuat kelompok dalam kelas. Kemudian, setiap kelompok mencari dan menemukan makanan khas satu daerah. Jika memungkinkan, kalian membuat atau membeli makanan khas tersebut. Namun, jika tidak memungkinkan, kalian bisa menggambarkannya secara visual dalam bentuk presentasi salindia.

Setiap kelompok mempresentasikan makanan khas daerah yang telah dipilihnya. Jika memungkinkan membuat atau membeli makanan tersebut, maka setiap kelompok bisa saling bertukar dan mencicipi makanan khas daerah masing-masing. Jika tidak memungkinkan, cukup dengan presentasi dan saling menanggapi antar kelompok.

Gambar 5.8. Rendang, makanan khas Padang, yang sudah mendunia
Sumber: rendangddeniapeh.id/www.galamedia.pikiran-rakyat.com (2020)

Pada lingkup sekolah, ada sebuah sekolah di Bogor setiap tahun rutin menyelenggarakan kegiatan Olimpiade Humaniora Nusantara. Kegiatan ini berskala nasional karena pesertanya sekolah-sekolah yang berasal dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam olimpiade ini, diselenggarakan berbagai perlombaan, seperti opera, dokumenter budaya, festival budaya, dan festival kuliner nusantara.

Kegiatan Olimpiade Humaniora Nusantara merupakan contoh promosi budaya nasional kepada pelajar dan masyarakat. Kalian bisa menyaksikan antusiasme pelajar dalam menampilkan ragam budaya nasional sesuai daerah masing-masing.

Gambar 5.9 Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor meresmikan kegiatan Olimpiade Humaniora Nusantara 2019.
Sumber: SMART Ekselensia/www.metropolitan.id (2019)

3. Adaptasi Kebudayaan Lokal

Adaptasi kebudayaan lokal terhadap unsur-unsur baru bisa menjadi alternatif upaya untuk melestarikan dan memajukan budaya lokal. Adaptasi ini tanpa menghilangkan substansi makna dari kebudayaan lokal tersebut. Dengan adanya adaptasi terhadap unsur-unsur kebaruan, diharapkan generasi muda tertarik untuk mempelajari dan melestarikan budaya lokal.

Adaptasi unsur kebaruan bisa berupa tambahan alat musik kontemporer, mengombinasikan gerakan tari dengan tari kontemporer, atau mungkin dari aspek lirik lagunya. Namun demikian, tentu saja adaptasi kebudayan lokal tidak boleh dilakukan secara serampangan.

Adaptasi kebudayaan lokal harus dilakukan oleh para pegiat yang ahli dan memahami betul filosofi budaya lokal tersebut. Sehingga, tidak mengurangi atau menghilangkan makna yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, baru disosialisasikan kepada masyarakat umum secara luas.

Sebagai contoh, seni pertunjukan Terebang Gede asal Serang, Banten. Kesenian ini sudah ada sejak masa Sultan Ageng Tirtayasa pada abad ke-16 M. Kini, seni Terebang Gede telah mengalami adaptasi budaya dengan seni marawis yang berkembang cukup pesat akhir-akhir ini.

Tidak hanya itu, adaptasi juga terjadi pada alat-alat musik yang digunakan dengan masuknya sener drum, bass drum, jimbe, dan sambal. Demikian penuturan wawancara lisan dengan Mistar, pegiat seni Terebang Gede, sebagaimana dikutip Rikza Fauzan dan Nashar dari Pendidikan Sejarah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Gambar 5.10 Seni pertunjukan Terebang Gede asli Serang, Banten, mengalami adaptasi dengan memasukkan seni musik Marawis.
Sumber: merdeka/www.digtio.id (2018)
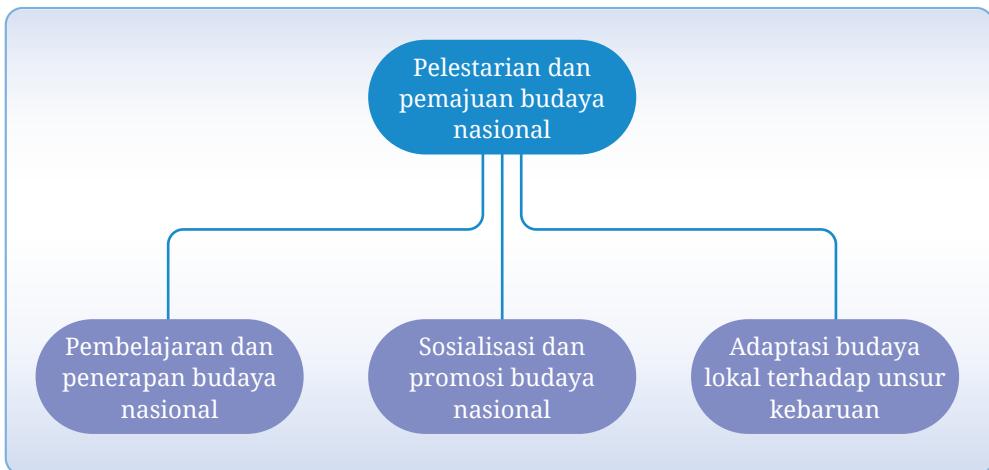
Siswa Aktif

Buatlah kelompok-kelompok belajar. Carilah ragam tarian daerah dan pilih salah satu untuk dipentaskan di depan kelas. Berlatihlah bersama teman-teman satu kelompok.

Kemudian, pentaskanlah di depan kelas kalian secara bergantian. Rekamlah setiap penampilan kelompok. Gabungkan jadi satu video dengan tema pentas kebudayaan. Unggahlah ke akun kalian. Bila tidak memungkinkan, buatlah dalam bentuk reportase, lalu tempel di mading sekolah kalian.

C. Budaya Nasional sebagai Alat Pemersatu Bangsa

Apakah kalian tahu batik? Ya, batik merupakan salah satu kekayaan budaya nasional. Bahkan, batik telah diakui oleh UNESCO, salah satu badan PBB yang menangani pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sebagai salah satu warisan budaya dunia asal Indonesia. Hebat ya!

Nah, tahukah kalian mengapa batik diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia? Menurut penjelasan Yulia Ayu, wakil ketua Yayasan Lasem Heritage, ada tiga alasan batik diakui sebagai warisan budaya dunia, yaitu pertama, ilmu membatik diturunkan dari generasi ke generasi. Mulai pemilihan canting, cara mencanting, motif dan coraknya, sampai pewarnaannya.

Kedua, batik menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Mulai menggendong bayi, khitanan atau sunatan, pernikahan, hingga menutup jenazah orang yang sudah meninggal, semuanya menggunakan batik.

Ketiga, batik digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai pakaian sehari-hari sejak dahulu hingga saat ini. Batik bukan hanya digunakan dalam suasana non formal, namun juga dalam suasana formal, seperti pakaian dinas kantor dan seragam sekolah. Bahkan, batik juga menjadi busana resmi perwakilan bangsa Indonesia pada acara-acara internasional.

Gambar 5.11 Batik merupakan kekayaan budaya nasional yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia.
Sumber: Antara/Harviyan Perdana/https://travel.kompas.com (2020)

Batik bukan hanya digunakan oleh masyarakat Jawa, namun juga dikenakan oleh masyarakat Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dll. Batik setiap daerah Indonesia memiliki motif, corak, dan makna berbeda sesuai kearifan lokal masing-masing. Hal ini menunjukkan batik bukan hanya menjadi budaya nasional, namun juga menjadi alat pemersatu bangsa.

Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari sekitar 300 suku bangsa dengan keragaman budaya dan adat istiadat yang berbeda. Sejatinya, ini semua merupakan karunia yang besar dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Ini merupakan potensi luar bisa jika dikelola dengan baik. Indonesia bisa menjadi negara tujuan wisata dengan keragaman budaya sebagai unggulannya.
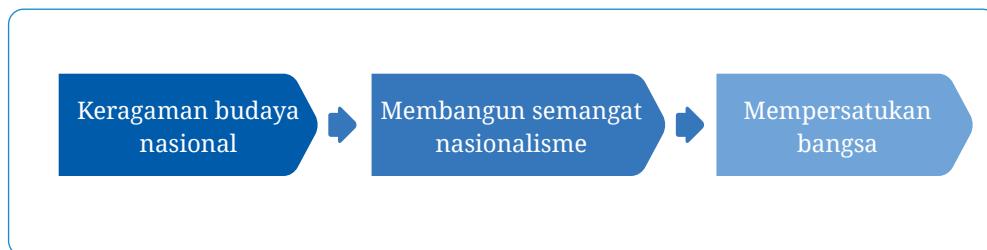
Siswa Aktif

Buatlah kelompok belajar, kemudian carilah tokoh budaya di daerah kalian. Lalu, buatlah janji untuk wawancara. Lakukanlah wawancara daring menggunakan *platform video conference*, seperti *zoom meeting, google meeting, whatsapp video*. Susunlah daftar pertanyaan yang akan kalian ajukan. Pertanyaan yang diajukan harus seputar budaya.

Hasil wawancara dibuat dalam tulisan esai kebudayaan sesuai pokok pembahasan dalam wawancara yang kalian lakukan. Kemudian, tempelkan di majalah dinding sekolah kalian

D. Kebudayaan Nasional dan Tantangan Era Globalisasi

Apakah kalian memiliki batik di rumah? Seberapa sering kalian memakai batik dalam sebulan? Jika kalian perhatikan, motif dan corak batik berbeda-beda. Inilah kekayaan budaya batik masyarakat Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Karenanya, kalian harus bangga dengan ragam budaya nasional. Kalian harus percaya diri menunjukkan identitas budaya nasional dalam pergaulan global.

Gambar 5.12 Para siswi asal Indonesia mementaskan Tari Genjring asal Jawa Barat dalam ajang festival budaya internasional di Turki pada 2013.
Sumber: Alsyukro universal/www.alsyukrouniversal.org (2013)

Tahukah kalian, pada 2 Oktober 2009, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) telah resmi mengesahkan batik sebagai salah satu warisan budaya dunia asli Indonesia. Pencapaian ini tidaklah didapat dengan mudah. Pengakuan ini merupakan buah dari promosi budaya batik ke kancah global. Meski sempat diwarnai ketegangan dengan Malaysia yang mengklaim batik motif parang rusak sebagai budaya Malaysia, tetapi pada akhirnya UNESCO mengesahkan batik sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia.

Karena itu, sebagai generasi muda, kalian dituntut mampu menyuarakan dan mempromosikan budaya nasional di kancah global. Salah satu cara yang bisa kalian tempuh adalah mengikuti festival budaya internasional. Kalian bisa proaktif mengusulkan kepada sekolah agar bisa mengirimkan siswa dan siswinya mengikuti ajang festival kebudayaan internasional. Hal ini juga sebagai wadah aktualisasi kegiatan ekstrakurikuler kesenian yang ada di sekolah.

Sebagai contoh, sebuah sekolah tingkat SMP di Tangerang Selatan berhasil mengirimkan siswi-siswinya mengikuti festival kebudayaan internasional di Turki. Keberangkatan mereka dilepas oleh Wali Kota Tangerang Selatan ketika itu. Mereka berangkat ke Turki untuk mempromosikan ragam budaya tarian khas Indonesia. Mereka mementaskan tari saman asal Aceh, tari Genjring asal Jawa Barat, dan tari-tarian lainnya.

Selain aktif mengikuti festival kebudayaan internasional, upaya menjaga budaya nasional dari tantangan globalisasi juga bisa dilakukan dengan aktif membuat konten seputar budaya nasional, lalu mengunggahnya ke laman-laman kebudayaan. Perkembangan teknologi informasi mesti dimanfaatkan dengan baik untuk mempromosikan budaya nasional ke dunia internasional.

Pada sisi negara, pemerintah semestinya secara rutin dan aktif mendaftarkan hak paten budaya nasional Indonesia ke UNESCO. Selain itu, membuat program promosi dan publikasi budaya nasional ke masyarakat internasional. Kekayaan ragam budaya nasional, mestinya mampu menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Hal ini akan menghasilkan devisa bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ketika Bangsa Indonesia aktif mempromosikan budaya nasional ke kancah global, maka budaya nasional akan semakin di kenal oleh masyarakat internasional. Hal ini bisa mencegah klaim sepihak oleh bangsa lain atas kekayaan budaya nasional. Selain itu, juga berdampak positif bagi citra dan posisi Negara Indonesia dalam dunia internasional.

Namun demikian, selain menyimpan sisi peluang, era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi juga menyimpan ancaman bagi eksistensi budaya nasional. Beberapa kearifan lokal masyarakat Indonesia tergusur oleh kehadiran teknologi yang merambah berbagai dimensi kehidupan.

Penggunaan teknologi perlu diimbangi dengan mempertimbangkan kearifan lokal agar budaya nasional tetap terjaga. Kita tidak menafikan sisi positif dari teknologi, namun nilai budaya nasional tetap mesti dijaga. Karena itu, pemikiran yang mesti dikedepankan adalah mencari titik temu antara keduanya agar justru saling menguatkan.

Contohnya, tradisi bertani tradisional yang sarat dengan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan perlu dipertemukan dengan teknologi mesin traktor yang menghadirkan efisiensi. Hal ini bisa diwujudkan, misalnya dengan sistem tandur padi bersama-sama usai pembajakan sawah menggunakan mesin traktor. Dengan demikian, budaya gotong royong dan kebersamaan tidak hilang, namun pemanfaatan teknologi dalam pengolahan sawah juga bisa dilakukan untuk efisiensi biaya produksi.

Karena itu, kita perlu melakukan filterisasi dan membatasi. Kita tidak bisa menolak kehadiran teknologi karena menghadirkan efisiensi pada berbagai aspek kehidupan. Namun demikian, pada skala tertentu, semestinya kita mampu membatasi penggunaan teknologi agar budaya dan kearifan lokal bisa tetap terpelihara. Setidaknya, pada masyarakat-masyarakat pedesaan yang relatif bersifat homogen struktur sosialnya. Dengan demikian, kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia tetap terjaga dan tidak hilang.
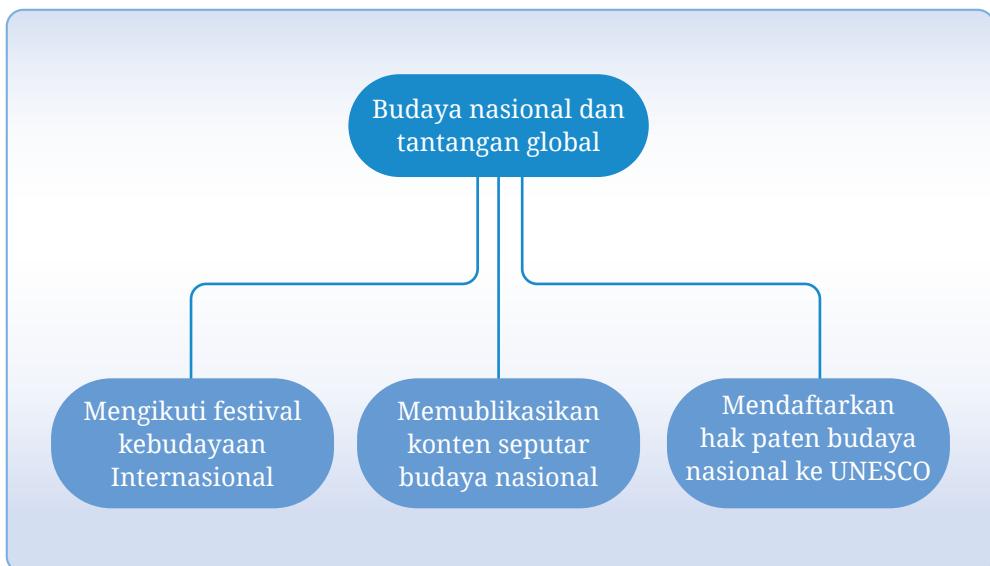
Siswa Aktif

Bersama guru kalian, rencanakanlah kunjungan ke destinasi budaya yang ada di daerah kalian. Buatlah reportase kegiatan kunjungan tersebut. Lengkapi dengan dokumentasi foto, bila perlu video. Kemudian, unggah ke media sosial kalian ya.

Ringkasan Materi

1. Nilai-nilai luhur yang terdapat dalam masyarakat Indonesia melahirkan budaya lokal. Kemudian, terkristalisasi menjadi budaya nasional dan membentuk identitas dan jati diri bangsa.

2. Upaya pelestarian budaya nasional bisa dilakukan dengan pembelajaran budaya nasional, sosialisasi dan promosi budaya nasional, dan adaptasi kebudayaan lokal.

3. Keragaman budaya nasional membentuk semangat nasionalisme dan mempersatukan bangsa.

4. Upaya memajukan budaya nasional dalam tantangan global bisa dilakukan dengan cara mengikuti festival kebudayaan internasional, memublikasikan konten-konten budaya, dan mendaftarkan hak paten budaya nasional.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi jati diri bangsa dan budaya nasional, carilah tiga budaya dari daerah asal kalian. Lalu, identifikasi perilakumu yang menunjukkan upaya pelestarian budaya tersebut dan tulis pada kolom realita perilaku. Bila perilakumu belum mencerminkan pelestarian budaya, maka apa rencana kalian untuk bisa berpartisipasi dalam pelestarian budaya daerah kalian. Tulislah dalam rencana perilaku.

No	Budaya Lokal	Realita Perilaku	Rencana Perilaku
1.		1. 2. 3	
2.		1. 2. 3	
3.		1. 2. 3	

Tautan Pengayaan

Budaya nasional merupakan identitas dan jati diri bangsa yang terbentuk dari nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia. Karenanya, kalian harus bangga dengan budaya Indonesia. Nah, agar lebih menghayati pentingnya budaya nasional sebagai jati diri bangsa, kalian simak tautan video berikut ini.

Kebudayaan sebagai Identitas Nasional
(Humaniora TGP)
https://www.youtube.com/watch?v=v-96GVhYbx8

Uji Kompetensi

Cermatilah peristiwa-peristiwa di bawah ini. Lalu, tuliskan pendapatmu untuk menjawab persoalan yang diajukan.

1. Pada sebuah sekolah terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Secara umum ada seni tari dan seni bela diri. Tari Tango asal Argentina ternyata lebih menarik para siswi untuk mendaftar, sementara pendaftar Tari Saman asal Aceh relatif sepi pendaftar. Sementara, pada seni bela diri, ekstrakurikuler karate lebih digemari daripada pencak silat merpati putih.

   Bagaimana pendapat kalian terhadap fenomena di atas? Apa solusi yang kalian tawarkan agar budaya nasional lebih banyak diminati oleh siswa dan siswi di sekolah tersebut?

2. Ada seorang pelajar yang lolos program pertukaran budaya ke Korea Selatan. Pelajar ini memang sangat menggemari budaya Korea Selatan. Namun, pada sisi lain, ia kurang mengenali budaya nasional, bahkan budaya lokal asal daerahnya.

   Menurut kalian, bagaimana sebaiknya sikap pelajar ini? Apakah pelajar ini sebaiknya membatalkan program pertukaran budaya tersebut dan mengenali terlebih dahulu budaya nasional atau seperti apa?

3. Banyak budaya nasional dan kearifan lokal yang terancam punah, seperti Gambang Semarangan, Terebang Gede, dan Nataki. Padahal, budaya nasional tersebut bisa jadi destinasi wisata menarik.

   Jika kalian menjadi menteri pariwisata, apa yang kalian rencanakan dan programkan untuk memajukan budaya nasional?

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2021

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Untuk SMP Kelas VIII

Penulis : Muhammad Sapei, Trezadigjaya, Prayogo

ISBN : 978-602-244-448-0

Bab VI
Literasi Digital dalam Kebinekaan Bangsa

Tujuan Pembelajaran:

1. Peserta didik mampu menghayati pentingnya merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital.
2. Peserta didik mampu menerapkan etika berinternet dalam interaksi di dunia digital sebagai bentuk keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Peserta didik mampu menjelaskan hubungan literasi digital dengan kemajuan bangsa.

Peta Konsep
Literasi Digital dalam Kebinekaan Bangsa
Merawat Kebinekaan Bangsa melalui Literasi Digital
Etika Berinternet (Netiket)
Literasi Digital untuk Kemajuan Bangsa
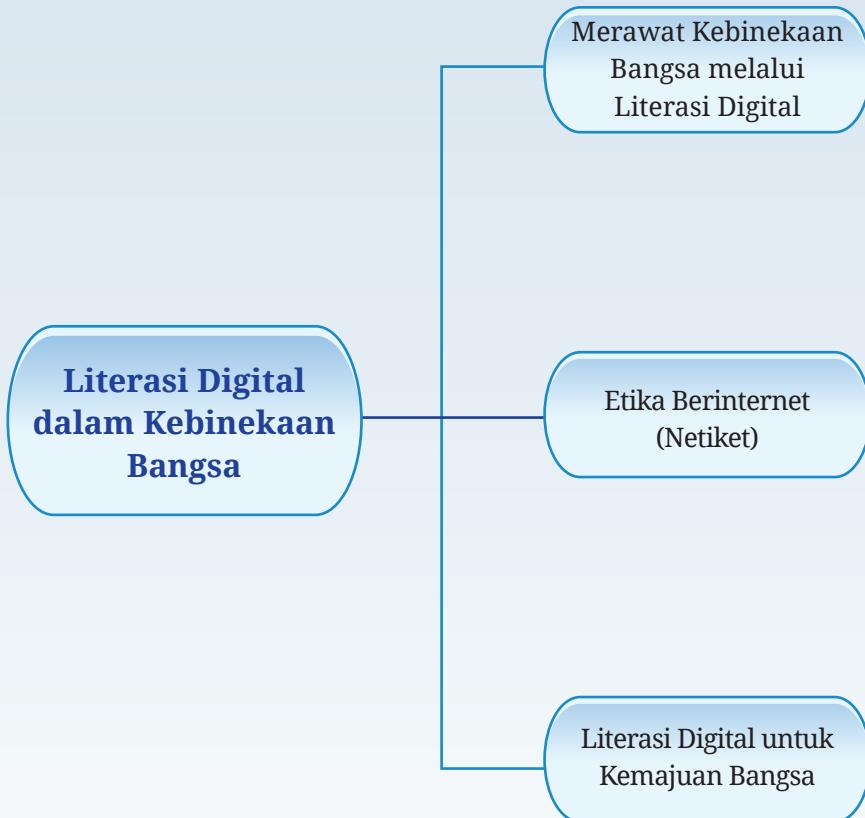
Gambar 6.1 Sekali memposting, maka akan tersebar ke dunia maya.
Sumber : Pixabay/https://www.republika.co.id (2020)

Think Before Posting

Apakah kalian pernah membaca atau mendengar berita tentang seorang artis papan atas pernah membuat kicauan di media sosial yang isinya menyinggung sebuah program acara televisi? Artis tersebut menulis dalam akun media sosialnya bahwa program acara televisi tersebut sebagai, "Pembunuh, setan, *burn in hell.*" Sontak kicauan tersebut menimbulkan kegaduhan di lini masa media sosial.

Kalian juga barangkali pernah mendengar berita tentang cuitan seorang ibu di media sosial yang menceritakan pengalamannya tentang buruknya pelayanan sebuah rumah sakit. Cuitan tersebut mendapat respons cukup keras dari pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit menganggap cuitan itu telah menyerang nama baik rumah sakit. Kasus ini berujung pada penuntutan secara hukum.

Ada juga postingan seseorang di akun media sosialnya yang dinilai mencemarkan nama baik sebuah institusi pendidikan di sebuah kota di Jawa Barat. Postingan ini sontak saja menimbulkan protes keras dari para netizen. Akhirnya, kasus ini juga berujung pada penuntutan secara hukum.

Tiga kasus di atas sekadar contoh betapa pentingnya *think before posting* (berpikir sebelum memublikasi). Saat ini jagad internet umumnya dan media sosial khususnya, seolah telah menjadi hutan belantara yang setiap orang bebas menulis dan memublikasi sesuai selera. Tentu saja hal ini berpotensi memunculkan hal-hal

kontraproduktif yang bisa bermuara pada saling hujat, fitnah, dan intimidasi. Ini sangat berbahaya bagi kerukunan hidup beragama dan berbangsa.

Untuk semakin membangkitkan kesadaran pentingnya etika dan literasi digital dalam berselancar di dunia maya, kalian tonton dan simak tautan atau pindai QR-Code video berikut ini:

Netiket, Etika dalam berinternet (Lily)
https://www.youtube.com/watch?v=ucy3p02EYa4

Siswa Aktif

Lakukanlah proses wawancara kepada psikolog atau guru Bimbingan Konseling di sekolah kalian. Pertanyaan mayornya adalah apakah kecenderungan orang yang memproduksi atau menyebarkan berita atau informasi bohong berkaitan dengan gangguan mental?

Kembangkanlah pertanyaan mayor tersebut menjadi pertanyaan-pertanyaan minor untuk memperoleh data yang lengkap. Kemudian, tulislah menjadi sebuah esai atau artikel dan publikasikan ke internet melalui blog. Kalian bisa membuat alamat blog dengan *blogspot* atau *wordpress*.

Kita sudah sampai pada akhir materi PPKn kelas VIII SMP/MTs. Tidak terasa ya kalian sudah belajar lima bab materi PPKn. Kali ini kalian akan mempelajari tentang literasi digital dalam kebinekaan bangsa.

Kebinekaan bangsa perlu dirawat di era digital ini agar Bangsa Indonesia tetap harmoni dalam keragaman. Karena itu, kalian harus mampu menerapkan etika literasi digital saat berselancar di dunia maya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi jangan sampai digunakan untuk hal-hal tidak produktif. Justru kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Inilah pentingnya mempelajari literasi digital.

A. Merawat Kebinekaan Bangsa Melalui Literasi Digital

Derasnya arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ibarat pedang bermata dua. Ia bisa menghadirkan manfaat, namun juga berpotensi memunculkan mudarat. Tergantung bagaimana penggunaannya.

Perlu kalian ketahui, pengguna internet hadir dengan bebagai macam latar belakang agama, suku, dan budaya. Penggunanya bukan hanya lintas provinsi, bahkan lintas negara. Karenanya, kalian perlu memperhatikan keragaman pengguna internet tersebut. Hindari menulis dan memublikasi konten yang bisa menimbulkan kegaduhan dan pertikaian.

Jumlah pengguna internet diberbagai negara terus bertambah, tak terkecuali di Indonesia. Artinya, internet seperti dunia baru. Pengguna internet di Indonesia termasuk sepuluh besar di dunia, baik dari segi jumlah pengguna maupun rata-rata lama menggunakan internet dalam sehari.

Berdasarkan riset *platform* manajemen media sosial *HootSuite* dan agensi marketing sosial *We Are Social bertajuk "Global Digital Reports 2020"*, sebagaimana dikutip oleh kumparan, menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175.4 juta orang atau sekitar 64% dari jumlah penduduk Indonesia. Sementara, jumlah pengguna media sosial sebanyak 160 juta orang atau setara dengan 59% jumlah penduduk Indonesia.

Gambar 6.2 Data pengguna internet dan media sosial di Indonesia.
Sumber: hootsuite/www.kumparan.com (2020)

Masih menurut data riset yang sama, rata-rata pengguna internet di Indonesia berselancar di dunia maya selama 7 jam 59 menit dalam sehari. Rasio ini melampaui angka rata-rata global penggunaan internet dalam sehari yang berkisar 6 jam 43 menit.

Dari data di atas, kalian bisa bayangkan dunia maya menjadi dunia baru yang digandrungi masyarakat Indonesia. Melalui dunia maya yang tak bersekat, setiap orang bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan siapapun. Beragam informasi pun bisa dengan mudahnya diproduksi atau dikonsumsi.
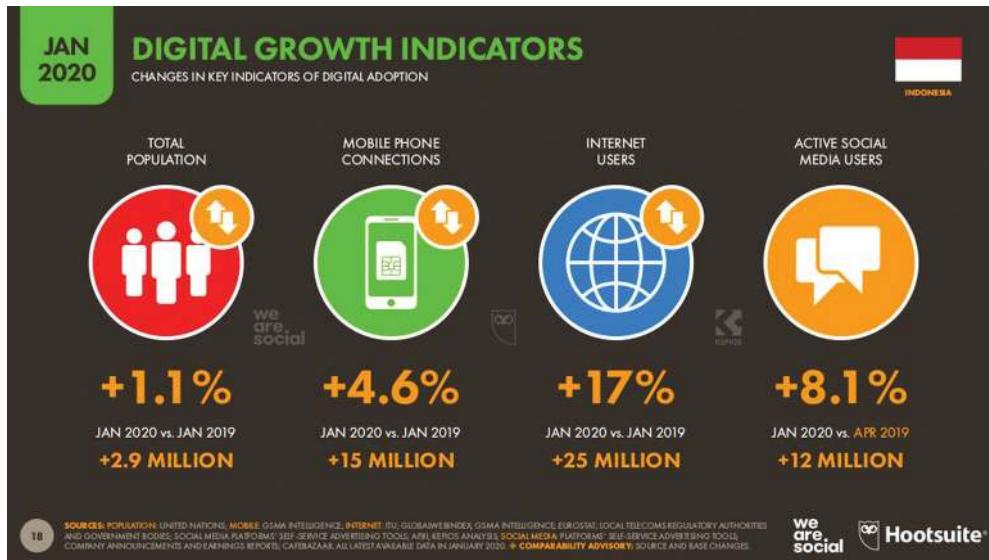
Gambar 6.3 Data indikator pertumbuhan digital di Indonesia.
Sumber: hootsuite/www.kumparan.com (2020)

Masalahnya, ketika konten informasi yang tersebar di dunia maya bermuatan negatif. Misalnya, ujaran kebencian, informasi bohong untuk memfitnah, dan konten negatif lainnya. Maka, hal ini sangat berbahaya dan mengancam kerukunan dalam kebinekaan. Nilai luhur bangsa Indonesia yang terbiasa hidup rukun dalam kebinekaan bisa terkikis.

Berita atau informasi bohong yang dipublikasikan secara berulang-ulang, secara perlahan akan mempengaruhi opini publik. Bahkan, bisa jadi pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, secara perlahan akan dianggap sebagai kebenaran. Penelitian yang dilakukan oleh Van Der Bilt dari Universitas Tennessee membuktikan data itu.

Karena itulah, penting sekali memberikan literasi digital bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial sebagai *digital native* (generasi yang ketika lahir, teknologi informasi sudah mengitarinya).

Gambar 6.4 Generasi milenial adalah digital native yang perlu mendapatkan pendidikan literasi digital.
Sumber: detik/Putri Aini/www.detik.com (2017)

Menurut David Bawden, dalam *Information and digital literacies; a review of concepts,* literasi digital meliputi beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan membangun informasi dari berbagai sumber terpercaya.
2. Kemampuan menyajikan dan memahami informasi dengan verifikasi validitas dan kelengkapan sumber dari internet.
3. Kemampuan membaca dan memahami materi informasi yang tidak berurutan *(non sequential)* dan dinamis.
4. Kemampuan menghubungkan informasi dalam media konvensional (koran) dengan media berjaringan (internet).
5. Kemampuan melakukan saringan terhadap informasi yang diperoleh.
6. Kemampuan mengomunikasikan dan memublikasikan informasi.

Memberikan pendidikan literasi digital bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu melalui pendekatan formal di sekolah dan pendekatan non formal di masyarakat. Melalui pendekatan pendidikan formal bisa dilakukan dengan cara menjadikan teknologi informasi inhern dalam proses pembelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, terdapat kompetensi membaca, menyimak, menulis, dan berkomunikasi.

Maka, proses pembelajaran membaca, menyimak, menulis, dan berkomunikasi bisa dilakukan melalui media informasi digital, seperti blog, website, dan media sosial. Kalian bisa membaca berbagai berita dari berbagai sumber internet, lalu menganalisis dan membedakan antara berita bohong dan berita valid.

Bagaimana kita bisa mengidentifikasi berita bohong? Menurut penjelasan Ketua Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Fitnah, Septiaji Eko Nugroho, sebagaimana dikutip Antara, berita bohong bisa diidentifikasi dari beberapa ciri berikut ini:

Pertama, judul umumnya provokatif. Berita bohong biasanya menggunakan judul provokatif atau bombastis. Tujuannya untuk memancing orang membaca dengan harapan terpengaruh dengan isi berita yang dibuat.

Kedua, nama dan situs media tidak jelas. Laman situs berita bohong biasanya tidak jelas dan tidak terdaftar di Dewan Pers. Tidak memiliki standar jurnalistik dan tidak mengikuti pedoman pemberitaan media siber.

Ketiga, nama penulis berita tidak ada. Berita bohong biasanya tidak menyantumkan nama penulisnya, sehingga tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Nama penulis merupakan standar dalam sebuah pemberitaan. Ini menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas pemberitaan yang dibuat.

Keempat, foto hasil editan. Berita bohong biasanya menggunakan foto-foto yang sudah diedit untuk mengesankan efek dramatis, kemarahan, dan emosi lainnya yang ingin dicapai pembuat berita. Karenanya, cek keaslian foto dengan melakukan penelusuran melalui google.

Melalui pendampingan guru, kalian bisa berlatih menulis sebuah berita secara benar atas suatu peristiwa dan mempublikasikannya ke media sosial. Kalian juga bisa mengakses dan berselancar pada berbagai website yang bermanfaat untuk pembelajaran. Kalian juga bisa mencoba berbagai aplikasi pembelajaran.

Gambar 6.5 Sumber berita dan informasi dari surat kabar memiliki tingkat validitas yang baik.
Sumber: radar kudus/Achmad Ulil Albab/www.radarkudus.jawapos.com (2018)

Pendekatan non formal bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan di masyarakat, seperti kegiatan keagamaan, karang taruna, dan lainnya. Sebagai bagian dari masyarakat, kalian bisa turut berpartisipasi mengedukasi masyarakat agar melek literasi digital. Pengetahuan yang telah diperoleh di sekolah, kalian aktualisasikan di masyarakat.

Dengan memiliki kemampuan literasi digital, masyarakat menjadi mampu memilah dan memilih informasi dari dunia maya yang bermanfaat dan produktif untuk mereka. Masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dengan menyampaikan opini secara bijak melalui berbagai kanal media terkait persoalan-persoalan masyarakat dan bangsa.

Dengan demikian, kalian telah memberikan sumbangan nyata untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang melek literasi digital. Ini juga berarti kalian telah berperan serta dalam upaya merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital.

Siswa Aktif

Lakukanlah penelusuran berita atau informasi dari berbagai sumber internet. Pilihlah dua informasi atau berita yang memiliki nilai validitas tinggi dan rendah. Lakukanlah analisis dan jelaskan mengapa berita yang satu termasuk kategori berita valid, sementara berita satu lagi termasuk kategori berita bohong *(hoax)*.

Diskusikan bersama dalam kelompok. Kemudian, setiap kelompok mempresentasikan di depan kelas, sementara kelompok lain memberikan tanggapan. Buatlah materi presentasi menggunakan *power point* atau *prezi*.

B. Etika Berinternet (Netiket)

Pernahkah kalian membayangkan apa jadinya bila orang saling hujat? Pasti tidak nyaman. Kehidupan akan jadi gaduh. Nah tahukah kalian bahwa sekarang ini kehidupan tidak hanya di dunia nyata, namun juga ada kehidupan dunia maya. Bahkan, di era digital sekarang ini, sebagian orang, terutama generasi milenial, justru lebih banyak menghabiskan waktunya di dunia maya dibanding dunia nyata.

Karena itu, sebagaimana dalam kehidupan dunia nyata, kehidupan dunia maya pun semestinya menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai. Namun, sayangnya saat ini kita masih banyak mendapati kegaduhan di dunia maya akibat orang-orang yang tidak menerapkan etika saat berselancar di dunia maya.

Gambar 6.6 Ujaran kebencian dalam dunia maya berpotensi merusak kerukunan hidup beragama dan berbangsa.
Sumber: jalan damai/www.jalandamai.net (2019)

Kegaduhan dan keributan di dunia maya, bila sering terjadi, juga berpotensi merusak kerukunan hidup beragama dan berbangsa. Apalagi jika konten kegaduhannya seputar suku, agama, dan ras. Bahkan, ini sangat berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa.

Nah sebagai generasi milenial, kalian harus berpartisipasi dalam mewujudkan dunia maya yang kondusif dan produktif. Cara yang bisa kalian lakukan adalah dengan menerapkan etika berinternet (netiket). Netiket menjadi penting untuk menjaga kerukunan dalam kebinekaan.

Prinsip umum pertama netiket adalah *think before posting* (pikirkan sebelum publikasikan). Sadarkah kalian, sekali kalian menekan tombol enter mengunggah, itu artinya konten yang kalian unggah menjadi milik umum. Ia dengan mudahnya tersebar dan beranak-pinak tanpa bisa dikendalikan. Semakin banyak orang yang membagikan unggahan kalian, semakin meluas jangkauan dan jelajahnya. Bahkan, bisa jadi sudah bukan lintas kota atau provinsi lagi, melainkan sudah lintas negara.

Karena itu, penting sekali kalian berpikir terlebih dahulu sebelum mengunggah. Apakah postingan kalian bermanfaat? Jika tidak bermanfaat, sebaiknya urungkan mempostingnya. Jika bermanfaat, kalian juga harus berpikir apakah bisa menyinggung perasaan orang lain atau bahkan sebuah komunitas, suku, dan golongan? Apakah unggahan kalian bisa menimbulkan kegaduhan?

Prinsip umum kedua netiket adalah saring sebelum *sharing* (bagikan). Bila kalian mendapatkan konten tentang suatu hal, maka menyaring terlebih dahulu. Jangan asal bagikan. Pastikan konten tersebut benar, valid, dan bermanfaat. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, jangan bagikan. Karena, konten seperti itu akan menimbulkan kegaduhan.

Nah supaya lebih jelasnya berikut ini adalah netiket yang bisa kalian perhatikan dan terapkan saat berselancar di dunia maya:

1. Menulis atau memposting informasi yang valid dan benar.
2. Jangan mengunggah konten yang bisa mengganggu atau merugikan orang lain serta menimbulkan kegaduhan sosial.
3. Jangan menyampuri postingan yang bukan menjadi urusan kalian.
4. Jangan mengintip apalagi mencuri data orang lain.
5. Jangan membajak hak kekayaan intelektual orang lain.
6. Hati-hati dalam penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital pada umumnya menunjukkan penulisnya sedang marah, kecewa, dan emosi negatif lainnya. Gunakan huruf kapital pada konteks yang tepat. Misalnya, untuk penegasan dengan jumlah huruf kapital yang wajar.
7. Membalas pesan pribadi secara pribadi, jangan membalas pesan pribadi di forum umum, seperti lini masa media sosial, *group whatsapp,* atau *carbon copy* pada email.
8. Berhati-hatilah dalam meneruskan *(forward)* pesan atau konten. Telitilah dulu validitas konten atau pesan tersebut, pastikan bukan *hoax* (konten bohong) atau *spam* (konten sampah).
9. Menuliskan komentar, mengajukan, dan menjawab pertanyaan dengan tepat dan sopan dalam forum-forum dunia maya, seperti lini masa media sosial.
10. Saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat.
11. Pilihlah konten dalam dunia maya yang bermanfaat dan produktif.

Gambar 6.7 Mari terapkan etika berinternet
Sumber: Pemda Paser/http://ppid.paserkab.go.id (2019

Setelah kalian menerapkan netiket untuk diri sendiri, sebaiknya kalian juga aktif mempromosikannya. Ajaklah teman-teman kalian di sekolah untuk juga menerapkan netiket saat berselancar di dunia maya. Kesannya memang kecil dan sederhana. Namun, bayangkan jika semua pelajar berpikir hal yang sama, maka secara alami akan terjadi gerakan nasional penerapan netiket.

Sejatinya, menerapkan etika berinternet merupakan perintah agama dan bentuk keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran agama menerangkan bahwa ketika kita memperoleh informasi, terlebih informasi meragukan atau dari sumber meragukan, maka lakukanlah proses verifikasi dan konfirmasi. Sehingga, kita tidak terjatuh pada perbuatan merugikan orang lain.

Dengan demikian, semoga kehidupan di dunia maya berangsur-angsur membaik. Dunia maya dipenuhi dengan konten bermanfaat dan narasi sejuk dalam bingkai saling menghormati dan menghargai.

Siswa Aktif

Bentuklah kelompok belajar. Lalu, buatlah video pendek berdurasi maksimal 2 menit sekreatif mungkin. Isinya tentang imbauan menerapkan etika dalam berinternet.

Kalian bisa menggunakan aplikasi *KineMaster* untuk mengedit video sederhana. Tampilkan video yang kalian buat di depan kelas. Kemudian, kompilasi jadi satu dan unggah ke media sosial kalian ya.

C. Literasi Digital untuk Kemajuan Bangsa

Pernahkah kalian menonton tutorial sebuah keterampilan tertentu, kemudian kalian mencoba dan mempraktikkannya? Misalnya, bagi kalian yang perempuan, pernahkah kalian menonton lewat saluran *YouTube* tutorial membuat *brownis?* Setelah menonton tutorial tersebut, kalian mencoba membuat *brownis.* Ternyata rasanya enak sekali. Lalu, kalian terpikir untuk menjualnya di kantin sekolah. Dari jualan *brownis* tersebut, kalian mendapat penghasilan.

Dalam hal ini, kalian tidak hanya memiliki kemampuan digital, namun juga pemanfaatan digital. Kalian memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi digital yang bermanfaat untuk kalian tonton. Lalu, tidak berhenti sampai di situ. Pengetahuan baru yang kalian peroleh dari dunia digital tersebut, kalian terapkan dan manfaatkan untuk aktivitas ekonomi.

Mayes dan Fowler mengungkapkan bahwa literasi digital terdiri dari tiga level, yaitu *digital competence* (kompetensi digital), *digital usage* (pemanfaatan digital), dan *digital transformation* (transformasi digital).
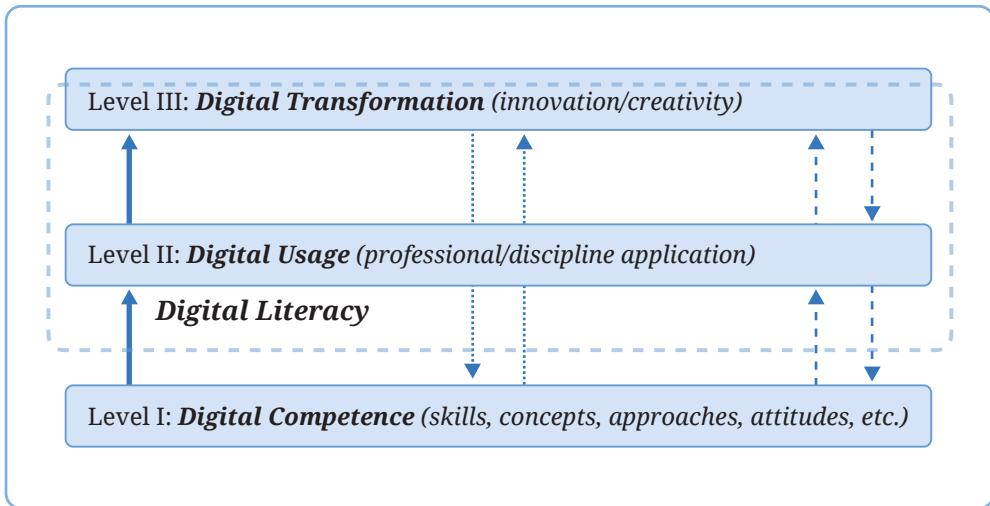
Gambar 6.8 Level literasi digital
Sumber: Allan Martin, Digital Literacy and the "Digital Society" (2008)

Digital competence adalah kemampuan untuk memilah dan mengolah saat berhadapan dengan berbagai informasi dalam dunia digital. *Digital usage* adalah kemampuan untuk memanfaatkan informasi yang sudah dipilah dan diolah tersebut untuk tujuan produktif, seperti untuk bisnis dan pendidikan. *Digital transformation* adalah kemampuan melakukan inovasi menghasilkan metode atau produk baru yang bermanfaat bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital.

Gambar 6.9 Inovasi digital untuk mengatasi persoalan bangsa
Sumber: antara/www.antaranews.com (2018)

Contoh *digital transformation* adalah Gojek. Nadiem Makarim memanfaatkan inovasi teknologi digital dengan membuat *platform* transportasi daring yang diberi nama Gojek. Dengan *platform* ini, masyarakat dengan mudah memanfaatkan jasa transportasi umum untuk berbagai kebutuhan. Bahkan, kemudian Gojek menghadirkan varian layanan baru selain jasa transportasi, seperti *Go-food* dan *Go-clean.* Inovasi Gojek bahkan mendisrupsi bisnis jasa transportasi umum.

Nah kalian bisa bayangkan jika para pelajar dan pemuda Indonesia memiliki kemampuan literasi digital sampai pada level *digital transformation,* maka ini akan berdampak pada kemajuan bangsa. Para pelajar dan pemuda Indonesia akan melahirkan inovasi-inovasi di berbagai bidang kehidupan dengan memanfaatkan teknologi digital. Pada akhirnya, inovasi-inovasi tersebut akan menggerakkan perekonomian bangsa dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Pada bidang berbeda, dua orang pemuda, Jim Oklahoma dan Andreas Sanjaya, membuat inovasi *platform* bernama iGrow. iGrow konsen pada bidang pertanian. iGrow memiliki mimpi membangun kemandirian pangan. Indonesia sebagai negara agraris semestinya memiliki pertanian yang kuat.

Saat ini sudah banyak sekali para petani di berbagai wilayah dan provinsi yang berhasil meningkatkan hasil pertaniannya dengan bantuan *iGrow*. Berkat rekam jejaknya ini, iGrow berhasil meraih penghargaan internasional di San Francisco, Amerika Serikat. Hebat ya.

Nah kalian bisa memulainya dari lingkungan sekitar di masyarakat. Untuk bisa melakukan inovasi digital, tentu saja kalian harus mengidentifikasi dulu permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kalian. Misalnya, di lingkungan Rukun Tetangga (RT), pengurus Posyandu kesulitan merekap data kesehatan ibu dan anak karena masih dilakukan secara manual.

Pengambilan data kesehatan ibu dan anak pun dilakukan secara manual dengan mengunjungi setiap rumah warga. Aktivitas ini cukup menyita waktu dan tenaga pengurus Posyandu. Perlu dicarikan solusi agar pengambilan data kesehatan dan pengolahannya bisa lebih mudah dan cepat.

Dalam hal ini, kalian bisa menerapkan teknologi digital untuk mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya, kalian mengajari pengurus Posyandu dan ibu-ibu di lingkungan RT kalian untuk menerapkan google formulir. Dengan memanfaatkan google formulir, data otomatis terinput secara *real time* dan bisa direkap dengan cepat dan mudah.

Karena itu, manfaatkanlah teknologi digital untuk hal-hal yang produktif bagi kemajuan masyarakat dan bangsa. Pelajari dan kuasai teknologi digital, lalu lakukan inovasi untuk kemajuan bangsa dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Siswa Aktif

Buatlah kelompok belajar. Kemudian, lakukanlah telusur informasi di dunia digital. Identifikasilah berbagai inovasi digital yang diinisiasi oleh para pemuda. Pilihlah bidang yang kalian minati. Cermati dan pelajari bagaimana para pemuda itu melakukan inovasi digital.

Kemudian, rancanglah inovasi digital pada bidang yang kalian minati. Buatlah dalam format *The Innovator's Method* karya Nathan Furr dan Jeff Dyer dari Harvard Business School. Presentasikan di depan kelas ya. Perhatikan gambar di bawah ini:
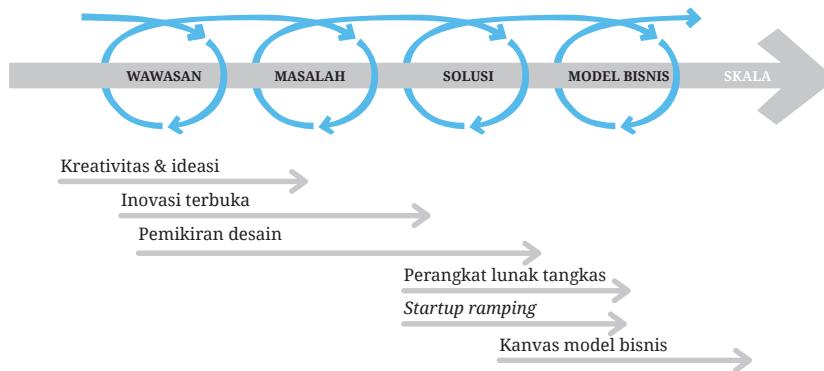
Ringkasan Materi

1. Pendidikan literasi digital penting diberikan kepada masyarakat, terutama generasi milenial, untuk merawat kebinekaan bangsa.
2. Etika berinternet harus diterapkan saat berselancar di dunia maya untuk mewujudkan kehidupan dunia maya yang damai dan produktif.
3. Literasi digital perlu dikembangkan sampai level tranformasi digital agar mampu menghasilkan inovasi digital yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi literasi digital dalam kebinekaan bangsa, identifikasilah perilaku kalian saat berselancar di dunia maya dengan memberikan tanda centang dan menuliskan rencana perbaikannya.

No	Netiket	Kesesuaian Perilaku		Rencana Perilaku
		Ya	Belum	
1.	Menulis atau memposting informasi yang valid dan benar.			
2.	Jangan memposting konten yang bisa mengganggu atau merugikan orang lain serta menimbulkan kegaduhan sosial.			
3.	Jangan menyampuri postingan yang bukan menjadi urusan kalian.			
4.	Jangan membajak hak kekayaan intelektual orang lain.			
5.	Jangan mengintip apalagi mencuri data orang lain.			
6.	Hati-hati dalam penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital pada umumnya menunjukan penulisnya sedang marah, kecewa, dan emosi negatif lainnya. Gunakan huruf kapital pada konteks yang tepat. Misalnya, untuk penegasan dengan jumlah huruf kapital yang wajar.			
7.	Membalas pesan pribadi secara pribadi, jangan membalas pesan pribadi di forum umum, seperti lini masa media sosial, *group whatsapp,* atau *carbon copy* pada *email.*			
8.	Berhati-hatilah dalam meneruskan *(forward)* pesan atau konten. Telitilah dulu validitas konten atau pesan tersebut, pastikan bukan *hoax* (konten bohong) atau *spam* (konten sampah).			

9.	Mengajukan dan menjawab pertanyaan dengan tepat dan sopan dalam forum-forum dunia maya.			
10.	Saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat.			
11.	Memilih konten dalam dunia maya yang bermanfaat bagi pengembangan diri.			

Tautan Pengayaan

Budaya literasi berperan penting dalam menciptakan masyarakat belajar dan cerdas. Masyarakat belajar dan cerdas pada akhirnya akan mewujudkan kemajuan bangsa. Nah agar semakin mencintai budaya literasi, kalian simak tautan video berikut ini.

Indonesia Membaca, Indonesia Pintar (Adi Nugraha)
https://www.youtube.com/watch?v=AjYmVr9kHiE

Uji Kompetensi

Cermatilah peristiwa-peristiwa di bawah ini. Lalu, tuliskan pendapatmu untuk menjawab persoalan yang diajukan.

1. Ita memperoleh sebuah informasi dan membagikannya ke *whatsapp group.* Nina merasa informasi yang dibagikan Ita meragukan. Kemudian, Nina melakukan telusur informasi untuk mengkroscek kebenaran informasi tersebut. Nina menyimpulkan bahwa informasi yang dibagikan Ita tidak valid. Namun, Ita bersikeras bahwa informasi yang dibagikannya valid. Ita menunjukkan sumber internet informasi tersebut.

   Bagaimana pendapat kalian tentang perbedaan pendapat antara Ita dan Nina dalam menilai validitas informasi? Apa solusi yang bisa kalian tawarkan, terutama untuk menentukan secara objektif validitas informasi yang dibagikan Ita?

2. Edo mengajukan sebuah pertanyaan dalam *whatsapp* group yang diikutinya. Namun, hanya ada dua orang yang menanggapi. Dan itupun jawabannya kurang tepat menurut Edo. Sementara anggota yang lain tidak ada yang berkomentar.

   Menurut analisis kalian, mengapa pertanyaan dari Edo tidak ada yang menanggapi? Bagaimana sebaiknya sikap Edo terhadap dua komentar yang ada?

3. Sekolah kalian mengalami kesulitan untuk menyajikan secara *real time* data kehadiran siswa. Selama ini, absensi siswa dilakukan secara manual, sehingga harus direkap terlebih dahulu setiap akhir bulan.

   Menurut kalian, bagaimana cara yang sebaiknya dilakukan sekolah? Inovasi digital apa yang bisa ditawarkan untuk mengatasi persoalan tesebut?

Glosarium

agent of change	: aktor/pelaku perubahan
akuntabilitas	: tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu.
amandemen	: perubahan
check and balances	: mengawasi dan mengimbangi
chemistry	: keserasian, kepaduan dengan pasangan
class meeting	: perlombaan antarkelas setelah ujian semester di sekolah
daring	: dalam jaringan
deadlock	: terkunci, buntu
die stuferordnung der rechtnormen	: teori hirarki atau jenjang hukum
digital native	: generasi yang ketika lahir, teknologi informasi sudah mengitarinya
disintegrasi	: keadaan tidak bersatu padu, berpecah belah, hilangnya keutuhan dan persatuan
distribution of power	: pembagian kekuasaan
due process of law	: asas legalitas hukum
efisiensi	: suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
eksekutif	: lembaga negara pelaksana undang-undang
eksternalitas	: biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi.
equality before the law	: persamaan dalam hukum
federasi	: kesatuan dalam keragaman organisasi
filterasasi	: penyaringan terhadap unsur asing

fiskal	: segala urusan yang berkenaan dengan pajak atau pendapatan negara.
formell gesetz	: undang-undang formal
fusi	: melebur jadi satu organisasi
hoax	: berita/konten bohong atau palsu
hak prerogatif	: kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya.
human trafficking	: perdagangan manusia
infrastruktur	: sistem kelembagaan yang keberadaannya bersifat non formal dalam suatu negara
inovasi	: penemuan yang berbeda dari yang suda ada atau sebelumnya
judicial review	: uji materil undang-undang
kongres	: pertemuan besar
konstitusional	: sesuai atau menurut undang-undang
legislatif	: lembaga negara penyusun undang-undang
leuit	: lumbung padi
moneter	: persoalan ekonomi terkait pertumbuhan dan peredaran uang di dalam suatu negara.
otonom	: berdiri sendiri, menentukan arah sendiri
otoriter	: berkuasa secara sewenang-wenang
politik etis	: politik balas budi
real time	: waktu seketika
staatsfundamentalnorm	: norma fundamental negara/sumber hukum
staatsgrundgesetz	: aturan dasar atau aturan pokok negara/ konstitusi/undang-undang dasar
suprastruktur	: sistem kelembagaan yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat
supremacy of law	: penegakan hukum

swapraja : daerah kesultanan/kerajaan yang bersifat otonom dalam susunan pemerintahan hindia belanda

the rule of law, not of man : hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya

think before posting : pikirkan sebelum publikasikan

unesco : organisasi internasional di bawah pbb yang membidangi pendidikan, sains, serta kebudayaan

validitas : jelas sumbernya dan akurat

verordnung & utonome

satzung : aturan pelaksana/peraturan pemerintah/ peraturan daerah

yudikatif : lembaga negara pengawas jalannya undang-undang

yuridis : menurut atau secara hukum

yustisi : segala sesuatu yang berkaitan dengan peradilan dan kehakiman.

zebra cross : area untuk menyebrang jalan

zelfbestuurregelen : pemerintahan mandiri/otonom

zelfbestuur landschappen : wilayah pemerintahan mandiri/otonom

Daftar Pustaka

Alfian. 1980. *Politik, Kebudayaan, dan Manusia Indonesia.* Jakarta: LP3ES

Anggara. 2019. *Daerah Istimewa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dinamika Sejarah dan Perkembangannya.* Jakarta: Creative

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

________. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi.* Jakarta: Buana Ilmu Populer

Azhary, M. Tahir. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bogor: Kencana

Dicey, A.V. 1971. *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Mac-Millan

Hanifah, Abu. 1978. *Renungan tentang Sumpah Pemuda dalam Bunga Rampai Soempah Pemoeda*. Jakarta: Balai Pustaka

Huda, Ni'matul. 2005. *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review.* Yogyakarta: UII Press

_________. 2004. *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia: Pilihan atas Federalisme atau Negara Kesatuan*. Yogyakarta: UII Press

Kelsen, Hans. 2010. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemah oleh Rasul Muttakin. Bandung: Nusa Media

Mahfud MD, Mohammad. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan,* Jakarta: Rineka Cipta

Sulisworo, Dwi, dkk. 2012 *Pancasila sebagai Sistem Filsafat dan Implikasinya*. Jakarta: Universitas Ahmad Dahlan

Ubaidiah, A, dkk. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani.* Jakarta: IAIN Jakarta Press

Wiyono, Suko. 2013. *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.* Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press

Jurnal Ilmiah

Aminullah. 2020. “Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat”. Jurnal Ilmiah IKIP Mataram, Vol. 3. No.1

Arfa’i. 2013. “Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Perundang-undangan”. Jurnal Ilmu Hukum Inovatif, Vol. 6. No. 7

Asmaroini, Ambiro Puji. 2017. “Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya bagi Masyarakat di Era Globalisasi.” Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1. No. 2

Asshiddiqie, Jimly. 2004. “Gagasan Negara Hukum Indonesia”. Jurnal Hukum Jentera, Edisi 3

________. 2010. “Islam dan Tradisi Negara Konstitusional”. Disampaikan sebagai Keynote Speaker dalam Seminar Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan oleh IAIN Padang, 7 Oktober 2010.

Bawden, David. 2001. *“Information and Digital Literacies; a Review of Concepts”*. E-Journal, London University

Fauzan, Rikza, dan Nashar. 2017. “Mempertahankan Tradisi, Melestarikan Budaya: Kajian Historis dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Terebang Gede di Kota Serang”. Jurnal Candrasangkala, Vol. 3. No. 1

Furr, Nathan dan Dyer, Jeff. 2014. *“The Innovator’s Method”*. Harvard Business Review

Hadi W, Nur. 2006. “Etika Berkomunikasi di Dunia Maya dengan Netiquette”. Dipresentasikan dalam Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2006

Hamzani, Achmad Irwan. 2014. “Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya”. Jurnal Yustisia

Herlina S, Dyna. 2012. “Membangun Karakter Bangsa melalui Literasi Digital”. E-Journal UNY

Hutomo, Dimas. 2019. “Kedudukan Pancasila sebagai Sumber Hukum Negara”. Pusat Studi Hukum dan Kajian Indonesia

Martin, Allan. 2008. *"Digital Literacy and the Digital Society"* in Lankshear, Collin and Knobel, Michele (ed). "Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices". Online Publication

Mayes, Terry, and Fowler, Chris. 2018. *"Literacies in the Digital Age". Online Publication, Scotland University*

Nahak, Hildigardis M.I. 2019. "Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi". Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol. 5. No. 1

Puguh, Dhanang Respati. 2017. "Melestarikan dan Mengembangkan Warisan Budaya: Kebijakan Budaya Semarangan dalam Perspektif Sejarah". Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. 2. No. 1

Subarjo, Abdul Haris. 2017. "Perkembangan Teknologi dan Pentingnya Literasi Informasi untuk Mendukung Ketahanan Nasional". Jurnal Teknologi Angkasa, Vol. IX. No. 2

Susilo, Daniel dan Roesli, Mohammad. 2018. "Konsep Pemerintahan Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945". Jurnal Unisda, Vol. 2. No. 1

Sutoyo. 2016. "Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Disampaikan dalam *Focus Group* Discussion (FGD) Lembaga Pengkajian MPR RI bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang, 3 Mei 2016

Tri Karyanti. 2010. "Sumpah Pemuda dan Nasionalisme Indonesia". *E-Journal* Informatika, Universitas AKI

Widodo, Sutejo, K. 2012. "Memaknai Sumpah Pemuda di Era Reformasi". E-Journal Humanika Universitas Diponegoro

Yani, Ahmad. 2018. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-undang Dasar 1945". Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15. No. 2

Undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan

UU Nomor 23 Tahun 2014

UU Nomor 32 Tahun 2004

UU Nomor 18 Tahun 2001

UU Nomor 13 Tahun 2012

Daftar Sumber Gambar

https://jogja.tribunnews.com/2020/06/01/memperingati-hari-lahir-pancasila-2020-berikut-makna-dari-lima-simbol-di-lambang-negara?page=all diunduh pada 16 November 2020 pukul 07:52 WIB

https://www.liputan6.com/bola/read/3880993/liliyana-natsir-dan-puncak-pencapaiannya-di-olimpiade-2016-rio diunduh pada 16 November 2020 pukul 03:43 WIB

https://lumajangsatu.com/baca/ini-sejarah-pohon-beringin-raksasa-icon-alun-alun-lumajang diunduh pada 28 September 2021 pukul 08.06

https://aceh.antaranews.com/foto/57630/pembangunan-jembatan-gantung-daerah-terpencil diunduh pada 28 September 2021 pukul 08.12

https://semarangkota.go.id/p/842/kegiatan_pesantren_ramadhan_bagi_siswa_muslim_di_smp_n_9_semarang diunduh pada 28 September 2021 pukul 08.36

https://lombokpost.jawapos.com/pendidikan/15/02/2021/us-smp-mataram-terapkan-skema-daring-dan-luring/ diunduh pada 28 September 2021 pukul 08.48

https://id.pinterest.com/pin/259661353310187O1/ diunduh pada 16 November 2020 pukul 04:38 WIB

https://i1.wp.com/uns.ac.id/id/wp-content/uploads/Indonesia-Banget-Sivitas-Akademika-UNS-Kenakan-Baju-Adat-di-Dies-Natalis-ke-44.jpg?fit=1280%2C853&ssl=1 diunduh pada 16 November 2020 pukul 05:15 WIB

https://www.reqnews.com/the-other-side/18160/tidak-asal-ketuk-ternyata-ini-arti-ketukan-palu-hakim diunduh pada 30 September 2021 pukul 20.56

http://smpnj.sch.id/berita/detail/rapat-lpj-akhir-jabatan-mpkosis-smp-nurul-jadid-terapkan-protokol-kesehatan diunduh pada 30 September 2021 pukul 08.59

https://lombokpost.jawapos.com/pendidikan/15/02/2021/us-smp-mataram-terapkan-skema-daring-dan-luring/ diunduh pada 28 September 2021 pukul 08.48

https://id.pinterest.com/pin/791648440733083175/ diunduh pada 15 November 2020 pukul 02:19 WIB

https://republikseo.net/gambar-peta-indonesia/ diunduh pada 15 November 2020 pukul 02:17 WIB

https://gorontalo.kemenag.go.id/berita/502970/peringati-hari-hutan-siswa-mtsn-1-kota-gorontalo-tanam-pohon diunduh pada 30 September 2021 pukul 21.19

https://jambi.tribunnews.com/2018/07/29/bupati-sarolangun-rapat-bersama-presiden-jokowi-ini-yang-dibahas diunduh pada 15 November 2020 pukul 10:28 WIB

https://sumsel.tribunnews.com/2015/03/27/parade-foto-bermain-sambil-belajar diunduh pada 28 September 2021 pukul 09.15

https://www.blibli.com/friends/blog/hal-yang-perlu-diketahui-sebelum-mencoblos/ diunduh pada 15 November 2020 pukul 10:37 WIB

https://republika.co.id/berita/pg9zxt384/siswa-mtsn-1-bogor-belajar-demokrasi-di-pemilihan-ketua-osis diunduh pada 15 November 2020 pukul 10:39 WIB

https://m.tribunnews.com/metropolitan/2016/09/22/hakim-bisa-memutus-perkara-meskipun-terdakwa-tidak-mengakui-perbuatan diunduh pada 15 November 2020 pukul 10:45 WIB

https://thegorbalsla.com/nilai-nilai-pancasila/ diunduh pada 15 November 2020 pukul 10:49 WIB

https://www.liputan6.com/pilpres/read/3942984/ini-tata-cara-pencoblosan-pemilu-2019 diunduh pada 15 November 2020 pukul 11:11 WIB

https://www.klikwarta.com/menjaga-kedaulatan-pancasila-menjadi-tugas-bersama-seluruh-rakyat-indonesia diunduh pada 15 November 2020 pukul 11:21 WIB

https://www.teropongsenayan.com/92009-tiga-fakta-menarik-tentang-gedung-dpr-ri-di-senayan diunduh pada 15 November 2020 pukul 08:53 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Natsir diunduh pada 15 November 2020 pukul 09:04 WIB

https://www.beritasatu.com/jaja-suteja/nasional/569941/rangkaian-sidang-tahunan-mpr-2019 diunduh pada 15 November 2020 pukul 10.15 WIB

https://nasional.sindonews.com/read/106792/13/mahkamah-agung-kembangkan-aplikasi-informasi-perkara-korupsi-1595221626?showpage=all diunduh pada 15 November 2020 pukul 09:22 WIB

http://www.ukhuwah.sch.id/2016/12/video-siapkan-diri-jadi-pemimpin-osis.html diunduh pada 15 November 2020 pukul 09.08 WIB

https://pbs.twimg.com/media/EcJ23h_VcAILfxR.jpg diunduh pada 15 November 2020 pukul 09.13 WIB

https://manado.tribunnews.com/2019/10/25/menteri-wanita-era-sby-dan-jokowiini-ternyata-tak-punya-mobil diunduh pada 15 November 2020 pukul 09.18 WIB

https://karawangkab.go.id/berita/pelantikan-bupati-dan-wakil-bupati-terpilih diunduh pada 15 November 2020 pukul 09.41 WIB

https://agam.sumbar.polri.go.id/index.php/2018/11/18/anggota-polsek-tanjung-mutiara-bantu-anak-sekolah-menyeberang-jalan/ diunduh pada 28 September 2021 pukul 11.51

https://www.kratonjogja.id/upload/images/peristiwa/img_BS9CBFo.jpg diunduh pada 15 November 2020 pukul 10.01 WIB

http://mirror.acehprov.go.id/news/read/2016/11/15/3737/sekda-pimpin-upacara-hari-kesehatan-nasional-ke-52.html diunduh pada 15 November 2020 pukul 10.20 WIB

https://www.ussfeed.com/sejarah-hari-sumpah-pemuda-28-oktober-1928/ diunduh pada 13 November 2020 pukul 05:34 WIB

https://museumsumpahpemuda.kemdikbud.go.id/tentang-museum-sumpah-pemuda/ diunduh pada 13 November 2020 pukul 05:36 WIB

https://www.indozone.id/fakta-dan-mitos/4Wsd8m/romusha-tragedi-kerja-paksa-yang-memilukan diunduh pada 13 November 2020 pukul 05:44 WIB

https://majalahnabawi.com/jong-islamieten-bond-dan-soempah-pemoeda/ diunduh pada 13 November 2020 pukul 05:52 WIB

https://padang.tribunnews.com/2020/10/26/bunyi-teks-otentik-sumpah-pemuda-1928-hingga-fakta-peristiwa-kongres-pemuda-ii diunduh pada 13 November 2020 pukul 05:53 WIB

https://radarsemarang.jawapos.com/berita/pendidikan/2019/10/30/terapkan-sistem-belajar-mandiri/ diunduh pada 28 September 2021 pukul 16.20

https://batam.tribunnews.com/2018/12/03/viral-foto-wanita-hamil-tak-diberi-tempat-duduk-di-kereta-ternyata-ini-faktanya-pelaku-minta-maaf diunduh pada 13 November 2020 pukul 05:56 WIB

https://riaupos.jawapos.com/ekonomi-bisnis/09/04/2020/229013/buah-impor-mahal-buah-lokal-siap-rajai-indonesia.html diunduh pada 13 November 2020 pukul 05:57 WIB

https://www.republika.co.id/berita/pi55qw314/semangat-adul-menuntut-ilmu-2 diunduh pada 28 September 2021 pukul 12.01

https://warta-pendidikan.com/2020/03/13/posyandu-remaja-smp-negeri-2-bajawa-utara-bagikan-tablet-tambah-darah/ diunduh pada 13 November 2020 pukul 06:03 WIB

http://smk45.sch.id/galeri/25-oktober-2019-rapat-kerja-osis/ diunduh pada 13 November 2020 pukul 06:08 WIB

https://kalsel.kemenag.go.id/berita/515127/Sambut-Tahun-Ajaran-Baru-OSIS-MAN-1-HSU-Adakan-Gotong-Royong diunduh pada 13 November 2020 pukul 06:13 WIB

https://mbsnews.id/news/read/9146/Disela-Sela-Kesibukan-Bhabinkamtibnas-Ajarkan-Pemuda-Belajar-Mengaji diunduh pada 13 November 2020 pukul 06:24 WIB

https://bisniswisata.co.id/taman-budaya-kalsel-semarakkan-hari-tari-dunia/ diunduh pada 7 November 2020 pukul 08:02

https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/18/210000865/kisah-kisah-aksi-solidaritas-saat-pandemi-covid-19-di-indonesia?page=all diunduh pada 27 September 2021 pukul 20.33

https://reportersatu.com/menengok-tari-saman-tarain-khas-sumatera-utara/ diunduh pada 6 November 2020 pukul 11:17 WIB

https://seringjalan.com/asal-usul-dan-sejarah-tari-randai/ diunduh pada 6 November 2020 pukul 11:42 WIB

https://ein-institute.org/menelisik-asal-usul-gambang-semarang-simbol-keberagaman-warga-kota/ diunduh pada 6 November 2020 pukul 11:40 WIB

https://www.daerahkita.com/artikel/9/bermain-dan-belajar-angklung-di-saung-angklung-udjo diunduh pada 6 November 2020 pukul 07:01

https://www.indozone.id/news/d5s9DA/kebudayaan-kalimantan-timur-yang-beragam/read-all diunduh pada 7 November 2020 pukul 07:06

https://pustakabudaya.id/site/koleksi-detail?id=114 Alat+Musik+Tradisional+Nusa+Tenggara+Barat diunduh pada 7 November 2020 pukul 07:45 WIB

https://galamedia.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-35598094/sejarah-dan-filosofi-rendang-makanan-terlezat-di-dunia diunduh pada 7 November 2020 pukul 05:49 WIB

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tari-tradisional-grebeg-terbang-gede/115389 diunduh pada 9 November 2020 pukul 07:10 WIB

https://travel.kompas.com/read/2020/10/05/174000427/alasan-batik-indonesia-diakui-unesco-sebagai-warisan-budaya-dunia?page=all diunduh pada 27 September 2021 pukul 20.41

https://alsyukrouniversal.com/berita/junior-high-smp/916-pelajar-al-syukro-jadi-selebritis-di-turki diunduh pada 7 November 2020 pukul 08:09 WIB

https://www.kompasiana.com/image/sarifahgulakudo/59ed0bfca01dff1e385251e2/peran-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik-untuk-pendidikan-dan-pengajaran diunduh pada 10 November 2020 pukul 05:20 WIB

https://www.republika.co.id/berita/qjojpx463/telkomsel-mulai-rambah-perbatasan-indonesia-dan-timor-leste diunduh pada 28 September 2021 pukul 13.45

https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp/full diunduh pada 10 November 2020 pukul 04:56 WIB

https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp/full diunduh pada 10 November 2020 pukul 05:26 WIB

https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-3390371/5-hal-ini-perlu-dipertimbangkan-saat-akan-belikan-anak-handphone diunduh pada 10 November 2020 pukul 05:34 WIB

https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/03/14/56950/sarapan-informasi-dengan-baca-koran diunduh pada 10 November 2020 pukul 05:36 WIB

https://jalandamai.net/stop-ujaran-kebencian-di-sosmed.html diunduh pada 10 November 2020 pukul 05:39 WIB

http://ppid.paserkab.go.id/detailpost/bupati-pesan-jaga-suasana-kondusif-hindari-ujaran-kebencian-hoax diunduh pada 28 September 2021 pukul 14.07

https://ambon.antaranews.com/internasional/berita/1602546/inovasi-digital-untuk-mitigasi-covid-19?utm_source=antaranews&utm_medium=internasional&utm_campaign=antaranews diunduh pada 10 November 2020 pukul 10:12 WIB

Profil Penulis

Nama : Muhammad Sapei, S.Pd.I
Email : muhammad.syafiie@yahoo.com
Instansi : Dompet Dhuafa Pendidikan
Bidang Keahlian :
1. Pengembangan Sumberdaya Manusia
2. Penulisan dan Perbukuan

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

2017 – sekarang : Direktur Dompet Dhuafa Pendidikan
2015 – 2017 : GM SMART Ekselensia Indonesia Boarding School
2014 – 2015 : Manajer Litbang Makmal Pendidikan
2013 – 2014 : Kepala SD Islam Al-Syukro Universal

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

S-1 Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2001 – 2005)

Judul Buku/Karya dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Seni Menjalani Hidup Penuh Makna (Quanta-Elex Media, 2020)
2. Guru Sang Arsitek Peradaban (SR Institute, 2019)
3. Menjadi Bunda yang Dirindukan (Quanta-Elex Media, 2018)
4. Perempuan Dambaan Surga (Quanta-Elex Media, 2016)
5. Allah Dekat dan Bersamamu (Quanta-Elex Media, 2015)

Total 52 buku yang sudah ditulis.

Judul Penelitian/Artikel dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Filantropi dan Kapitalisme (Koran Republika, 24 Oktober 2020)
2. Menggagas Desa Wakaf (Koran Republika, 4 Agustus 2020)
3. Covid-19 dan Paradigma Belajar (Koran Republika, 24 Maret 2020)
4. Mengkaji Ulang Makna Remaja (Koran Republika, 10 Maret 2020)
5. Ekonomi Berbasis Wakaf (Koran Republika, 24 Januari 2020)
6. *Zakat Learning Design Related to Professional Character of High School Student Taking Course in SMA SMART Ekselensia Indonesia* (Institute of Teacher Education Batu Lintang, Malaysia, 2014)

Profil Penulis

Nama Lengkap : Trezadigjaya, S.Pd.,M.Si
Email : trezadigjaya@labschool.sch.id
Instansi : SMP Labschool Jakarta
Bidang Keahlian : PPKn

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):
1. Guru SMK Analis Kesehatan Tunas Harapan (2012-2013)
2. Guru SMP Labschool Jakarta (2013-sekarang)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:
1. SMA Negeri 1 Pondok Aren, Tangerang Selatan
2. S1 PPKn, Universitas Negeri Jakarta
3. S2 Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Tim Penulis, Buku Panduan Guru: Belajar Empati, UNESCO (2020)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. *Social Capital as an Instrument of Social Movement Aksi Cepat Tanggap (ACT): A Study of the Humanitarian Ship Program for Palestine. (2018)*

Informasi Lain dari Penulis/Penelaah/Ilustrator/Editor (tidak wajib):

- *Reviewer* Perangkat Ajar Pusat Asesmen dan Pembelajaran (2020)

Profil Penulis

Nama Lengkap : Prayogo, S.Kom
Email : prayogo@karakterpancasila.id
Instansi : Yayasan Karakter Pancasila
Bidang Keahlian : –

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Tahun 2008-2019, Staff Sekretariat Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PP AIPI)
2. Tahun 2012-2019, Programmer di Jaringan Damai Papua (JDP)
3. Tahun 2013-2019, Kontributor Riset di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik - LIPI)
4. Tahun 2020-sekarang, Manajer Riset dan Program di Yayasan Karakter Pancasila (YKP)

Kontribusi pada jurnal/prosiding/buku:

1. Jurnal Penelitian Politik LIPI, Volume 14 No. 2 Desember 2017
2. Jurnal Penelitian Politik LIPI, Volume 15 No. 2 Desember 2018
3. Buku. Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019. Tahun 2019
4. Buku. Peta Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019: Survei Pandangan Ahli. Tahun 2019.
5. Policy Paper Pendekatan Keamanan Insani dalam Mewujudkan Solidaritas dan Kerja Sama ASEAN di Tengah Pandemi Covid-19. Tahun 2020.

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. Diploma Tiga Tahun (D3), Bina Sarana Informatika, Jurusan Teknik Komputer, lulus tahun 2008
2. Strata Satu (S1) STMIK Nusa Mandiri, Jurusan Manajemen Informatika, lulus tahun 2014

Judul Buku/Karya dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Panduan Fasilitator Pelatihan Karakter Pancasila, Yayasan Karakter Pancasila, 2020
2. BPJS Ketenagakerjaan Berintegritas, Yayasan Karakter Pancasila, 2020

Profil Penelaah

Nama Lengkap : Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.
Email : sapriya@upi.edu
Instansi : Universitas Pendidikan Indonesia
Bidang Keahlian : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Guru Besar PKn UPI
2. Ketua Departemen/Program Studi PKn UPI (S1, S2, S3)
3. Sekretaris Jenderal Asosiasi Profesi PPKn Indonesia

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. (S1) Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan IKIP Bandung (1987)
2. (S2) Social Studies Education, La Trobe University, Melbourne, Australia (1998)
3. (S3) Pendidikan IPS (Kons. Pendidikan Kewarganegaran) UPI (2007)
4. Non Degree: National Academy on Political and Democratic Theory, Loyola Marrymount University, Los Angeles, USA (2001) 5. Non Degree: University Connect: Pre-service Teacher Practicum Training, *Michigan State University, Michigan, USA (2016)*

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Teori dan Landasan PKn, Bandung: Alfabeta (2011)
2. Indonesia Dalam Hubungan Internasional, Bandung: Lab PKn UPI (2012)
3. Disiplin Pendidikan Kewarganegaraan: Kultur Akademis dan Pedagogis (Editor), Bandung: Lab PKn UPI. (2017)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Analisis Kebutuhan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang S2 Sekolah Pascasarjana UPI, Civicus, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Volume 18, No. 1, 2014, hal 1-20; ISSN:1412-5463
2. Global Trend of Social Sciences Learning: Challenges and Expectations Toward ASEAN Community 2015, The Journal of Social Studies Education Vol. 3/ March 2014, ISSN: 2186-7860
3. Pendidikan Karakter Disiplin di Sekolah Dasar, Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan Juni 2014 Th.XXXIII No.2. hlm.286-295, ISSN 0216-1370 (Terakreditasi)

Profil Penelaah

Nama Lengkap : Adi Darma Indra, M.Pd.
Email : adidarmaindra@gmail.com
Instansi : SMPK 5 BPK PENABUR Bandung
Bidang Keahlian : PPKn

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Guru SMPK 5 BPK Penabur Bandung
2. Guru SMAN 24 Bandung

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S1 Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI Bandung
2. S2 Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana UPI Bandung

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Tidak ada

Profil Ilustrator

Nama Lengkap : Yuntarto
Email : bentarbintor@gmail.com
Kantor : PT. Macmuro Studio
Bidang Keahlian : Ilustrasi

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Ilustrator Whiteline Studio
2. Ilustrator Macmuro Studio
3. Ilustrator CV. Rumah Buku (rubu.co)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. DIII DKV Modern School of Design Yogyakarta, 2006

Buku yang Pernah DiLayout dan Tahun Pelaksanaan (10 Tahun Terakhir):

1. Menyongsong 2014-2019 Memperkuat Indonesia dalam Dunia Yang Berubah Daerah Analisis Strategis Badan Intelijen Negara (DAS-BIN) 2015
2. Majalah Zakat Baznas (2011-2018)
3. Company Profile Baznas (2017)
4. Annual Report Baznas (2017)
5. Kalender AQUA Danone (2018)
6. Annual Report Pelindo 1 Medan (2019)
7. Kalender Pelindo 1 Medan (2019)

Profil Penyunting

Nama : Yocta Nur Rahman
Email : yoctanurrahman@gmail.com
Instansi : Rubu.co
Bidang Keahlian : copy writter

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Wartawan di Jawa pos, 2014
2. Kontributor tempo.co, 2015
3. Editor Rubu 2016 - sekarang

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. MIN Tanjungsepreh Magetan tahun lulus 2003
2. MTs PSM Tanjungsepreh Magetan, tahun lulus 2006
3. SMA POMOSDA Nganjuk, tahun lulus 2009
4. UNY - S1 BK, tahun lulus 2013
5. UNY - S2 BK

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Majalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
2. Majalah Early Life Nutrition (ELN) Sarihusada
3. Majalah Metro Health (Rumah Sakit MNC Jakarta)

Profil Penata Letak (Desainer)

Nama Lengkap : Gunadi Kartosentono
Email : gaisani.gunadi@gmail.com
Kantor : CV. Rumah Buku
Bidang Keahlian : –

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. *Graphic Design* CV. Garas Comm
2. *Graphic Design* CV. Rumah Buku (rubu.co)
3. *Graphic Design* PT Aditya Media Yogyakarta

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. SMK YAPPI Wonosari, DIY

Buku yang Pernah DiLayout dan Tahun Pelaksanaan (10 Tahun Terakhir):

1. Buletin Early Life Nutrition Danone Sarihusada (2010-2017)
2. Menyongsong 2014-2019 Memperkuat Indonesia dalam Dunia Yang Berubah Daerah Analisis Strategis Badan Intelijen Negara (DAS-BIN) 2015
3. Majalah Zakat Baznas (2011-2018)
4. Company Profile Baznas (2017)
5. Annul Report Baznas (2017)
6. Kalender AQUA Danone (2018)
6. Annual Report Pelindo 1 Medan (2019)
7. Allergy Consumer Booklet NUTRICIA (2019)
8. Pregnancy and Breast Feeding Booklet NUTRICIA (2019)
9. Tematik Bahasa Inggris (2018-2020)
10. Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti (2018-2020)
11. Pendidikan Bahasa Bali (2018-2020)